



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2016, disusun berdasarkan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016 - 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Kubu Raya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahunan untuk periode Perencanaan Tahun 2016.

11. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
13. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2016, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2016, bertujuan:
 - a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
 - d. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan proses kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
 - f. menjamin komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakeholders pembangunan daerah dalam Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD hingga Musrenbang RKPD;

- g. meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta memiliki Daya Saing.
- (3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
 - b. Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016;
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2016, sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2016;
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2016.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2016 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 18 Mei 2015
PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 16

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 5
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I – 7
1.5 Maksud dan Tujuan	I – 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II – 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II – 1
2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi	II – 1
2.1.1.1 Geografi	II – 1
2.1.1.2 Topografi	II – 3
2.1.1.3 Geologi	II – 3
2.1.1.4 Hidrologi	II – 4
2.1.1.5 Klimatologi	II – 5
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	II – 6
2.1.2 Aspek Kependudukan	II – 8
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 10
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 10
A. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)	II – 10
B. Laju Inflasi Kabupaten	II – 16
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	II – 16

	D. Indeks Gini/Koefisien Gini	II – 17
	E. Pemerataan Pendapatan	II – 19
	F. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	II – 19
2.1.3.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II – 20
	A. Pendidikan	II – 21
	B. Kesehatan	II – 27
	C. Kemiskinan	II – 30
	D. Kepemilikan Tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan)	II – 32
	E. Kesempatan Kerja	II – 32
	F. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani)	II – 33
2.1.3.3	Seni Budaya dan Olahraga	II – 34
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II – 35
2.1.4.1	Fokus Pelayanan Umum	II – 35
	1. Pendidikan	II – 35
	2. Kesehatan	II – 40
	3. Lingkungan Hidup	II – 47
	4. Sarana dan Prasarana Umum	II – 49
	5. Penataan Ruang	II – 61
	6. Perhubungan	II – 62
2.1.4.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II – 67
	1. Penanaman Modal	II – 67
	2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II – 69
	3. Kependudukan	II – 72
	4. Ketenagakerjaan	II – 77
	5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II – 79
	6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II – 81
	7. Komunikasi dan Informasi	II – 84

8. Pertanahan	II – 86
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II – 87
10. Perpustakaan	II – 88
11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	II – 90
12. Pemuda dan Olahraga	II – 94
2.1.5 Aspek Daya Saing	II – 97
2.1.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II – 98
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	II – 98
2. Nilai Tukar Petani	II – 99
3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan)	II – 100
4. Produktivitas Total Daerah	II – 101
2.1.5.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II – 105
1. Aksesibilitas Daerah	II – 105
2. Penataan Wilayah	II – 108
3. Fasilitas Bank dan Non Bank	II – 108
4. Ketersediaan Air Bersih	II – 110
5. Fasilitas Listrik dan Telpon	II – 111
6. Ketersediaan Restoran	II – 114
7. Ketersediaan Penginapan	II – 115
2.1.5.3 Iklim Berinvestasi	II – 117
1. Keamanan dan Ketertiban	II – 117
2. Kemudahan Perijinan	II – 118
3. Penggunaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)	II – 120
4. Status Desa	II – 122
2.1.5.4 Sumber Daya Manusia	II – 123
1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Kelulusan S1, S2, S3)	II – 123

2.	Tingkat Ketergantungan	II – 124
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ..	II – 126
2.2.1	Dinas Pendidikan	II – 128
2.2.2	Dinas Kesehatan	II – 131
2.2.3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	II – 145
2.2.4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	II – 148
2.2.5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II – 151
2.2.6	Dinas Perhubungan	II – 154
2.2.7	Badan Lingkungan Hidup	II – 156
2.2.8	Dinas Kependudukan dan Catat Sipil	II – 158
2.2.9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	II – 161
2.2.10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II – 163
2.2.11	Dinas Koperasi dan UMKM	II – 165
2.2.12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	II – 168
2.2.13	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga	II – 170
2.2.14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	II – 173
2.2.15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II – 174
2.2.16	Sekretariat Daerah	II – 176
2.2.17	Sekretariat DPRD	II – 188
2.2.18	Inspektorat Kabupaten	II – 189
2.2.19	Badan Kepegawaian Daerah	II – 191
2.2.20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II – 193
2.2.21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	II – 196
2.2.22	Kecamatan Sungai Raya	II – 197
2.2.23	Kecamatan Kuala Mandor B	II – 199
2.2.24	Kecamatan Sungai Ambawang	II – 200
2.2.25	Kecamatan Terentang	II – 202
2.2.26	Kecamatan Batu Ampar	II – 203

2.2.27	Kecamatan Kubu	II – 204
2.2.28	Kecamatan Rasau Jaya	II – 205
2.2.29	Kecamatan Teluk Pakedai	II – 207
2.2.30	Kecamatan Sungai Raya	II – 209
2.2.31	Dinas Pendapatan Daerah	II – 211
2.2.32	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	II – 212
2.2.33	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	II – 213
2.2.34	Dinas Komunikasi dan Informatika	II – 215
2.2.35	Dinas Pertanian dan Peternakan	II – 218
2.2.36	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	II – 222
2.2.37	Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	II – 225
2.2.38	Dinas Kelautan dan Perikanan	II – 227
2.2.39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II – 229
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 232
2.3.1	Urusan Pendidikan	II – 232
2.3.2	Urusan Kesehatan	II – 232
2.3.3	Urusan Lingkungan Hidup	II – 232
2.3.4	Urusan Pekerjaan Umum	II – 233
2.3.5	Urusan Penataan Ruang	II – 236
2.3.6	Urusan Perencanaan Pembangunan	II – 236
2.3.7	Urusan Perumahan	II – 237
2.3.8	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II – 238
2.3.9	Urusan Penanaman Modal	II – 239
2.3.10	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II – 239
2.3.11	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II – 240
2.3.12	Urusan Ketenagakerjaan	II – 241
2.3.13	Urusan ketahanan Pangan	II – 241
2.3.14	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II – 242

2.3.15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..	II – 243
2.3.16	Urusan Perhubungan	II – 243
2.3.17	Urusan Komunikasi dan Informatika	II – 244
2.3.18	Urusan Pertanahan	II – 244
2.3.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politi Dalam Negeri	II – 244
2.3.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II – 245
2.3.21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II – 256
2.3.22	Urusan Sosial	II – 257
2.3.23	Urusan Kebudayaan	II – 257
2.3.24	Urusan Statistik	II – 258
2.3.25	Urusan Kearsipan	II – 258
2.3.26	Urusan Perpustakaan	II – 259
2.3.27	Urusan Kelautan dan Perikanan	II – 259
2.3.28	Urusan Pertanian	II – 260
2.3.29	Urusan Kehutanan	II – 261
2.3.30	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	II – 262
2.3.31	Urusan Pariwisata	II – 262
2.3.32	Urusan Industri	II – 264
2.3.33	Urusan Perdagangan	II – 265
2.3.34	Urusan Ketrasmigrasian	II – 265

BAB III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah	III – 1	<i>h</i>
3.1	Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III – 1	<i>r</i>
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 4	<i>p</i>
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 6	<i>f</i>
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 12	<i>t</i>
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 18	

BAB IV	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Ekonomi	IV – 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV – 2

4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 16
BAB V	Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2016	V – 1
5.1	Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah	V – 1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2016	V – 6
BAB VI	Penutup	VI – 1

Handwritten signature or initials in blue ink.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 2
Tabel 2.2	Persentase Luas Areal Berhutan Kabupaten Kubu Raya	II – 7
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 10
Tabel 2.4	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kubu Raya	II – 12
Tabel 2.5	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya	II – 13
Tabel 2.6	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kubu Raya	II – 14
Tabel 2.7	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya	II – 15
Tabel 2.8	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 16
Tabel 2.9	PDRB Perkapita Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 17
Tabel 2.10	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat	II – 18
Tabel 2.11	Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 22
Tabel 2.12	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 22
Tabel 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 23
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 24
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 26
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 27

Tabel 2.17	Rekapitulasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 28
Tabel 2.18	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya	II – 29
Tabel 2.19	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 s/d Tahun 2013	II – 31
Tabel 2.20	Kepemilikan Tanah Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 32
Tabel 2.21	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014	II – 33
Tabel 2.22	Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014	II – 34
Tabel 2.23	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 35
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 36
Tabel 2.25	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 36
Tabel 2.26	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 37
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..	II – 38
Tabel 2.28	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 39
Tabel 2.29	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 40
Tabel 2.30	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 40
Tabel 2.31	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 40
Tabel 2.32	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 42
Tabel 2.33	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 42
Tabel 2.34	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 43
Tabel 2.35	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 43

Tabel 2.36	Jumlah Dokter Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 45
Tabel 2.37	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 45
Tabel 2.38	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 46
Tabel 2.39	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 46
Tabel 2.40	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 47
Tabel 2.41	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 47
Tabel 2.42	Jumlah Pelanggan dan Air Terpakai Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 48
Tabel 2.43	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 49
Tabel 2.44	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 50
Tabel 2.45	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 51
Tabel 2.46	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 52
Tabel 2.47	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 52
Tabel 2.48	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 53
Tabel 2.49	Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 54
Tabel 2.50	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya	II – 55
Tabel 2.51	Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya	II – 56
Tabel 2.52	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 s/d Tahun .2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 57

Tabel 2.53	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 57
Tabel 2.54	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 58
Tabel 2.55	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 59
Tabel 2.56	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 60
Tabel 2.57	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 60
Tabel 2.58	Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 61
Tabel 2.59	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 62
Tabel 2.60	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 62
Tabel 2.61	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 63
Tabel 2.62	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 63
Tabel 2.63	Rasio Ijin Trayek Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 64
Tabel 2.64	Rasio Ijin Trayek Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 64
Tabel 2.65	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 65
Tabel 2.66	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun pada Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 66 <i>ml</i>
Tabel 2.67	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 67 <i>f</i>
Tabel 2.68	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 68
Tabel 2.69	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 68

Tabel 2.70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 69
Tabel 2.71	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 70
Tabel 2.72	Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 71
Tabel 2.73	Jumlah UKM BPR/LKM Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 72
Tabel 2.74	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	II – 73
Tabel 2.75	Proyeksi Penduduk Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya	II – 73
Tabel 2.76	Proyeksi Penduduk Tahun 2015 Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya	II – 74
Tabel 2.77	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 75
Tabel 2.78	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 76
Tabel 2.79	Penduduk Angkatan Tahun 2014 Kerja Kabupaten Kubu Raya ...	II – 77
Tabel 2.80	Penduduk Bekerja Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya	II – 78
Tabel 2.81	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 79
Tabel 2.82	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2011s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 80
Tabel 2.83	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 81
Tabel 2.84	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 81
Tabel 2.85	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 82
Tabel 2.86	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	II – 82

Tabel 2.87	Rasio Akseptor KB Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 83
Tabel 2.88	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 84
Tabel 2.89	Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 84
Tabel 2.90	Rasio Warnet Per 1000 Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 85
Tabel 2.91	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 86
Tabel 2.92	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 86
Tabel 2.93	Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 87
Tabel 2.94	Jumlah LPM Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 88
Tabel 2.95	Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 89
Tabel 2.96	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 90
Tabel 2.97	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 91
Tabel 2.98	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 91
Tabel 2.99	Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 93
Tabel 2.100	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 94
Tabel 2.101	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 95
Tabel 2.102	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 96
Tabel 2.103	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 97

Tabel 2.104	Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2011 s/s Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 98
Tabel 2.105	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat	II – 99
Tabel 2.106	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 101
Tabel 2.107	Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Konstan	II – 103
Tabel 2.108	Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Berlaku	II – 104
Tabel 2.109	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 105
Tabel 2.110	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 106
Tabel 2.111	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 107
Tabel 2.112	Rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015	II – 108
Tabel 2.113	Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya	II – 109
Tabel 2.114	Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kubu Raya	II – 109
Tabel 2.115	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya	II – 111
Tabel 2.116	Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Kubu Raya	II – 112
Tabel 2.117	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	II – 113
Tabel 2.118	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Kubu Raya	II – 114
Tabel 2.119	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Kubu Raya	II – 115
Tabel 2.120	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Kubu Raya	II – 116
Tabel 2.121	Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya	II – 117
Tabel 2.122	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Kubu Raya	II – 118
Tabel 2.123	Lama Proses Perijinan Kabupaten Kubu Raya	II – 119

Tabel 2.124	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Kubu Raya	II – 120
Tabel 2.125	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya	II – 121
Tabel 2.126	Status Desa Kabupaten Kubu Raya	II – 123
Tabel 2.127	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kubu Raya	II – 124
Tabel 2.128	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya	II – 125
Tabel 2.129	Evaluasi Pelaksanaan Perogram dan Kegiatan SKPD Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 dan Tahun 2014	II – 128
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013	III – 2
Tabel 3.2	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017	III – 7
Tabel 3.3	Target Pendapatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya	III – 9
Tabel 3.4	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 s/d Tahun 2017	III – 14
Tabel 3.5	Target Belanja Dalam Rencana Pembangunan dan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya	III – 16
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya Proyeksi Tahun 2017	III – 20
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya	III – 23
Tabel 4.1	Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 s/d Tahun 2019	IV – 2
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, S 4asaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	IV – 4
Tabel 4.3	Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya	IV – 17
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional	IV – 18
Tabel 4.5	Keselarasan Kewilayahan Tahun 2016	IV – 19
Tabel 5.1	Estimasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	V – 8

Tabel 5.2 Rekapitulasi Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun
2016 V – 13

mu
r
f
f

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I – 2
Gambar 1.2	Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP Sampai APBD	I – 7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya	II – 1
Gambar 2.2	Peta Penutupan Lahan Kabupaten Kubu Raya	II – 8
Gambar 2.3	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 s/d Tahun 2015	II – 8
Gambar 2.4	Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015	II – 9
Gambar 2.5	Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015	II – 9

R
R
R
R

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur tahun sebelumnya, disamping itu juga difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, sanitasi, lingkungan pemukiman dan peningkatan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergi

antar sektor dan antar wilayah, memperhatikan koordinasi antar SKPD dan berbagai pihak, baik akademisi, DPRD, lembaga kemasyarakatan non pemerintah, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi, serta memperhatikan hasil Musrenbang di tingkat Nasional, termasuk penyelenggaraan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD).

Dalam hubungannya dengan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar perencanaan dan penganggaran, dapat digambarkan melalui proses sebagai berikut:



Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Persiapan Penyusunan RKPD; Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Penyusunan Rancangan RKPD; Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan Penetapan RKPD, dengan menggabungkan beberapa unsur yaitu unsur politik, unsur teknokratik, unsur partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

Pendekatan Teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan pemangku kepentingan didalam penyusunan RKPD Tahun 2016.

Pendekatan Partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *Bottom-Up* dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan proses *Top-Down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program*. Penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 memperhatikan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 serta RKP Tahun 2016.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah.
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- v. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020.
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028.
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018.
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31).
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 1).
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 9).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun

2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029.

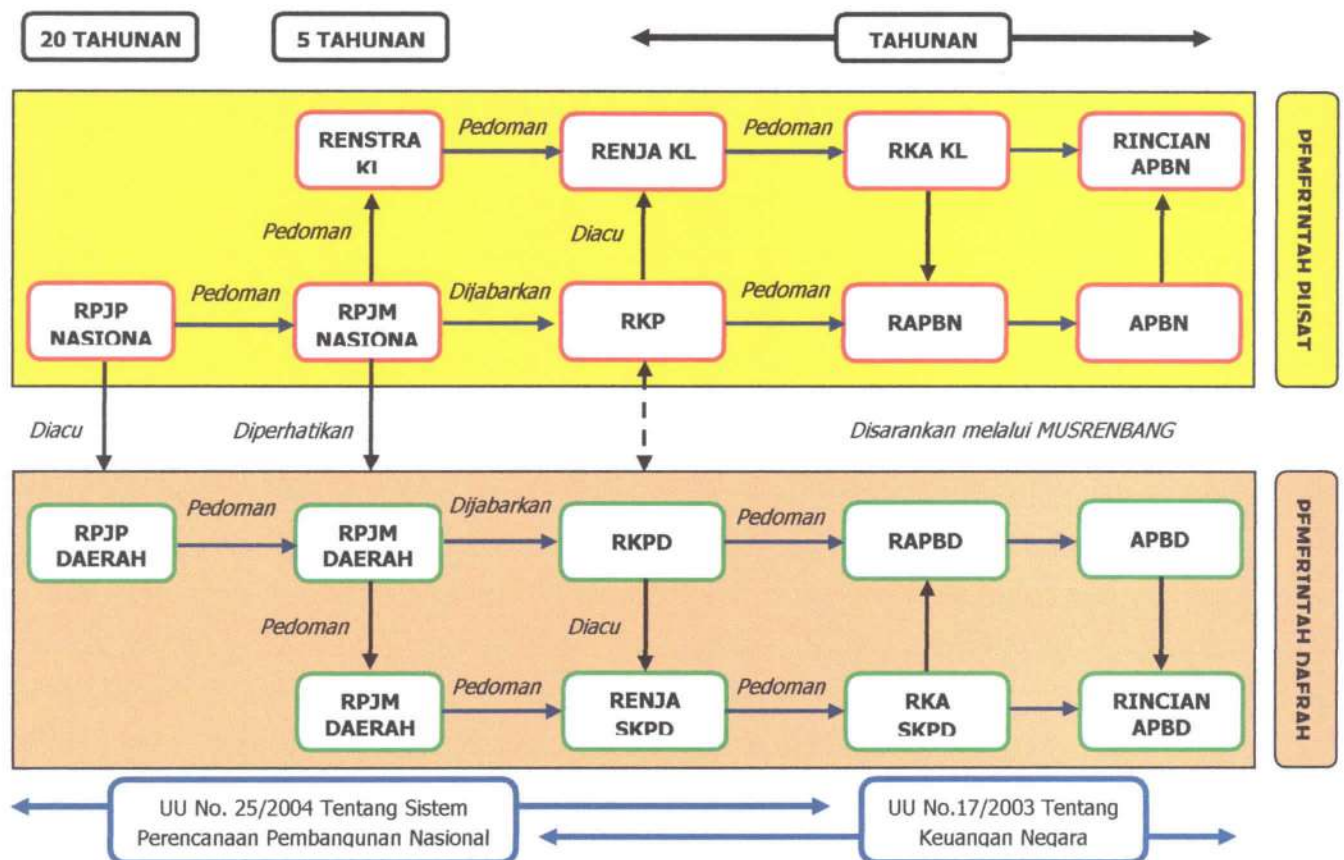
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan, untuk itu substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan memperhatikan dokumen perencanaan kabupaten/kota berbatasan pada umumnya dan kabupaten Kubu Raya pada khususnya, sehingga terwujud sinergi perencanaan.

Keterkaitan antar dokumen RKPD dan dokumen lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including the letters "P", "R", "f", and "f" arranged vertically.

Gambar 1.2

Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP Sampai APBD



Berdasarkan Gambar 1.2. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond an Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 disusun menjadi 6 (enam) Bab dan beberapa Sub Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum.
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen.
- 1.4 Sistematika Dokumen SKPD.
- 1.5 Maksud dan Tujuan.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 :

- a. Acuan dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.
- b. Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.
- c. Pedoman dan penjabaran bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2016.
- d. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016 sesuai dengan target tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Pub
n
f
f

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi

2.1.1.1 Geografi

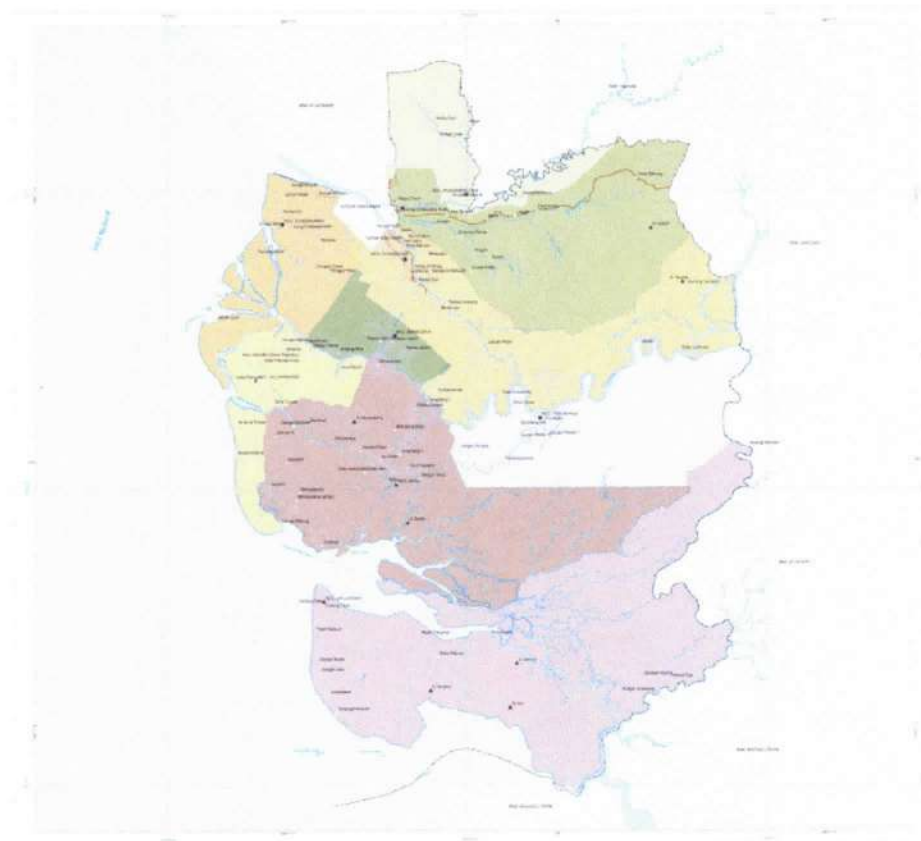
Secara Geografis, Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi $0^{\circ} 13' 27''$ Lintang Utara sampai dengan $1^{\circ} 00' 15''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 02' 47''$ Bujur Timur sampai dengan $109^{\circ} 58' 17''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kubu Raya secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Kondisi letak yang strategis menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai simpul transportasi utama di Kalimantan Barat, baik transportasi udara, darat maupun transportasi sungai, yang menjadi pembangkit kegiatan ekonomi. Simpul transportasi utama dimaksud ditunjang dengan keberadaan Bandara Supadio di Kecamatan Sungai Raya, dan Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) di Kecamatan Sungai Ambawang.

Di sisi lain, faktor ketersediaan lahan yang masih luas dan merupakan daerah *hinterland* yang berbatasan dengan Kota Pontianak, pembangunan infrastruktur jalan Trans-Kalimantan yang melintasi wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai penghubung antar Kabupaten bahkan antar provinsi, serta masuknya wilayah Kecamatan sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya ke dalam pusat kegiatan nasional, menjadi keunggulan Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan dan pertumbuhan kota baru di masa mendatang.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 118 Desa, sedangkan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2008 Skala 1:50.000 Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah mencapai 872.537,01 Ha. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batu Ampar, dengan luas 247.715,80 Ha atau 28,39% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Rasau Jaya yaitu 19.289,17 Ha atau 2,21% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Dan Jumlah Desa
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JUMLAH DESA	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	247.715,80	28,39
2	Terentang	Terentang	10	103.052,52	11,81
3	Kubu	Kubu	20	129.961,00	14,89
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	44.219,78	5,07
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	58.958,48	6,76
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	19.289,17	2,21
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	132.052,58	15,31
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	104.773,14	12,01
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	32.514,54	3,73
Kabupaten Kubu Raya			118	872.537,01	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Peta RBI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Skala 1:50.000

2.1.1.2. Topografi

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah dataran yang relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 3% seluas 702.320 Ha (98%), daerah lereng 3-14% seluas 7.205 Ha dan kelerengan diatas 40% seluas 850 Ha. Luas wilayah lautan seluas 2.197 Km² terdiri dari 1.437 km² luas laut dan 760 Km² luas perairan umum, dengan garis pantai sepanjang 194 Km dan memiliki 39 pulau-pulau kecil.

2.1.1.3. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak. Berdasarkan posisinya, terletak pada formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan kedalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. **Aluvial**, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Secara keseluruhan tanah aluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, tekstur beraneka ragam, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur, serta konsistensinya keras waktu kering dan teguh waktu lembab. Sifat kimia dari tanah jenis ini sedang sampai baik, reaksi tanahnya masam sampai netral, kandungan bahan organik rendah, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya, kesuburan tanahnya sedang sampai tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).

2. **Gleisol**, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. **Organosol Gley Humus** atau **Tanah Gambut** atau **Tanah Organik**, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi deferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. **Regosol**, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horizon penciri ochrik, histik atau sulfurik.

2.1.1.1 Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa Kabupaten bahkan beberapa provinsi.

Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Sedangkan Daerah Rawa terdiri dari:

1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas - Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III, IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR. Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl. Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak

- Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat - Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;
 3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;
 4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

2.1.1.2 Klimatologi

Iklim di Kubu Raya termasuk dalam type Iklim A (Schmit & Ferguson) yaitu iklim sangat basah dengan curah hujan bulanan diatas 100 mm dengan total curah hujan Tahunan rata-rata berkisar 3000 mm. Suhu rata-rata maksimum 33,4^o C terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum rata-rata 22,5^oC terjadi pada bulan Agustus. Kondisi topografi dan iklim di Kubu Raya sangat menunjang untuk invenstasi agrikultur.

Adapun keadaan angin di wilayah Kabupaten Kubu Raya kecepatan angin rata-rata tercatat sebesar 2 knot dan kecepatan maksimum terjadi pada bulan Juni yakni sebesar 45 knot. Temperatur dan Kelembaban Udara di suatu daerah antara lain dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dan iklim daerah tersebut. Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu wilayah Indonesia yang beriklim tropis salah satu cirinya adalah mempunyai temperatur udara yang tinggi atau panas. Apalagi letak Kabupaten Kubu Raya yang sangat dekat dengan garis Khatulistiwa sehingga temperatur udaranya lebih panas. Pada Tahun 2013, temperatur udara rata-rata yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio Kubu Raya berkisar 26,4° C sampai dengan 27,8° C. Suhu terendah tercatat pada bulan Pebruari yang tercatat sebesar 26,4° C sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu sebesar 27,7° C. Pada Tahun 2014, rata-rata kelembaban nisbi tercatat sekitar 85 persen. Lebih rendah apabila kita bandingkan dengan Tahun sebelumnya. Adapun kelembaban nisbi tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 88 persen dan kelembaban udara terendah tercatat pada bulan Agustus dan bulan September yaitu sebesar 82 persen.

2.1.1.3 Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil klasifikasi penutupan lahan di Kabupaten Kubu Raya dapat diidentifikasi sebanyak 19 kelas penutupan lahan (Tidak terdapat penutupan lahan yang berupa kelas awan dan kelas savanna/padang rumput) dengan persentase terbesar adalah kelas Hutan Rawa Sekunder yaitu seluas 248.813,08 Ha atau 28,51% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Persentase areal berhutan di Kabupaten Kubu Raya sebenarnya masih relatif besar jika dibandingkan dengan kelas penutupan lain, yaitu seluas 389.788,24 Ha atau sekitar 44,67 % dari luas Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 5.718,81 Ha (0,66%), Hutan Mangrove Primer seluas 34,25 Ha (0,00%), Hutan Mangrove Sekunder seluas 118.956,04 Ha (13,63%), Hutan Rawa Primer seluas 12.203,23 Ha (1,40%), Hutan Rawa Sekunder seluas 248.813,08 Ha (28,51%) dan Hutan Tanaman seluas 4.062,81 Ha (0,47%) sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Persentase Luas Areal Berhutan Kabupaten Kubu Raya

NO	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.718,81	0,66
2	Hutan Mangrove Primer	34,25	0,00
3	Hutan Mangrove Sekunder	118.956,04	13,63
4	Hutan Rawa Primer	12.203,23	1,40
5	Hutan Rawa Sekunder	248.813,08	28,51
6	Hutan Tanaman	4.062,81	0,47
7	Non Hutan	482.796,82	55,63
	Jumlah	872.585,06	100

Sumber : Penataan dan Pengelolaan Data Tematik Spasial KKR 2014 Bappeda Kabupaten Kubu Raya

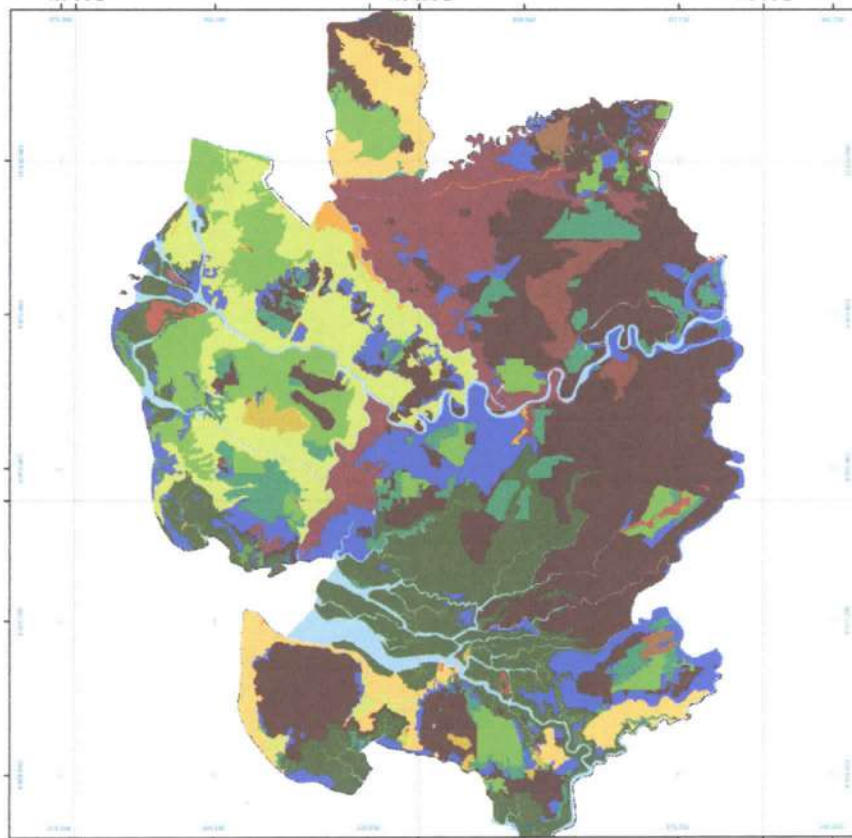
Sebaran areal berhutan di Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdapat di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai (Hutan Lahan Kering Sekunder), Kecamatan Batu Ampar (Hutan Mangrove Primer), Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang (Hutan Mangrove Sekunder), Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Terentang (Hutan Rawa Primer dan Sekunder), Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Ambawang (Hutan Tanaman). Selain lokasi-lokasi tersebut masih banyak terdapat lokasi-lokasi tertentu yang masih memiliki potensi kayu namun tidak dalam area yang luas dan sebagian besar merupakan daerah perbukitan.

Persentase lahan-lahan tidak produktif di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil penafsiran citra SPOT 4 mencapai 228.628,84 Ha atau sekitar 26,20% dari luas Kabupaten, yang antara lain berupa Semak Belukar seluas 4.755,53 Ha (0,54%), Semak Belukar Rawa seluas 97.448,68 Ha (11,17%), Lahan Terbuka seluas 53.269,81 Ha (6,10%) dan Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas 73.154,82 Ha (8,38%). Sebagian besar lahan-lahan tidak produktif tersebut berada di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Terentang.

Peta penutupan lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2

Peta Penutupan Lahan Kabupaten Kubu Raya



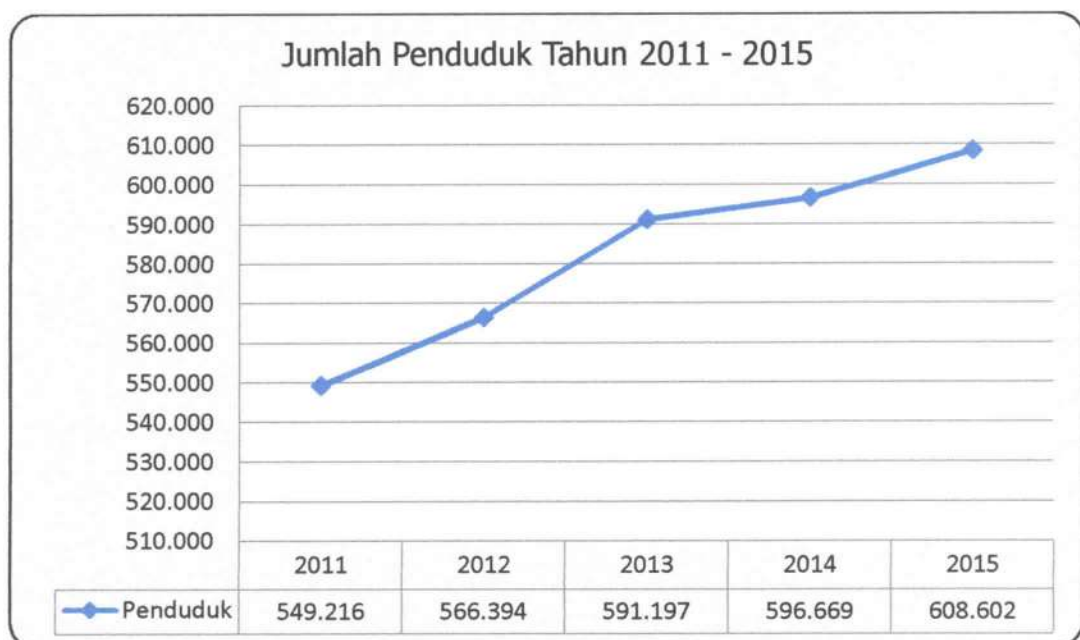
Sumber: Peta RBI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Skala 1:50.000

2.1.2 Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar dibawah:

Gambar 2.3

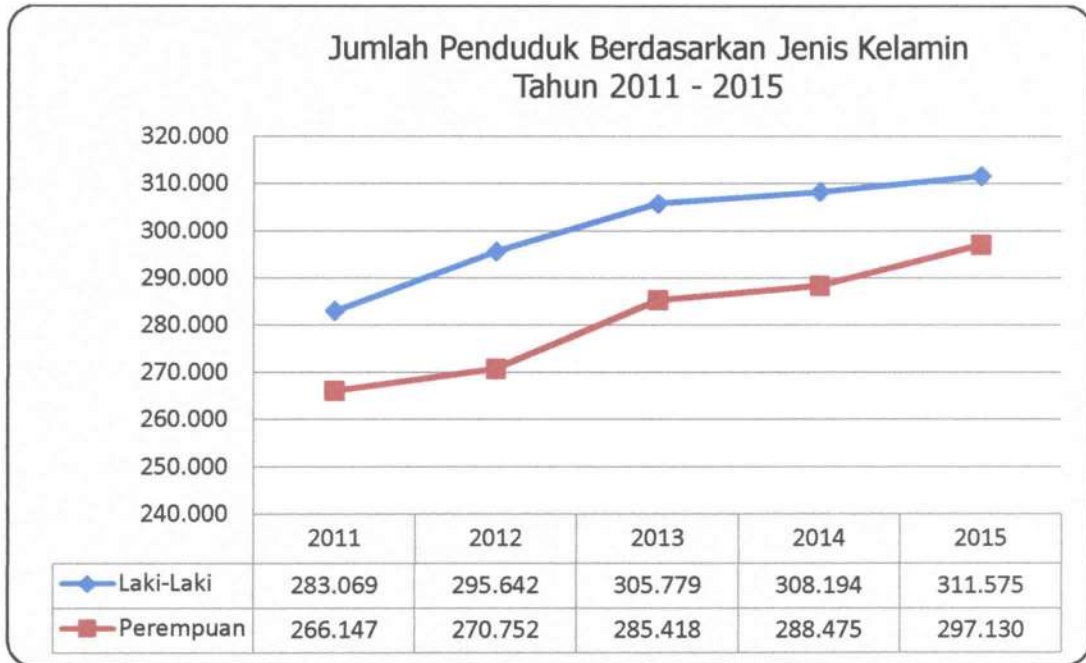
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Gambar 2.4

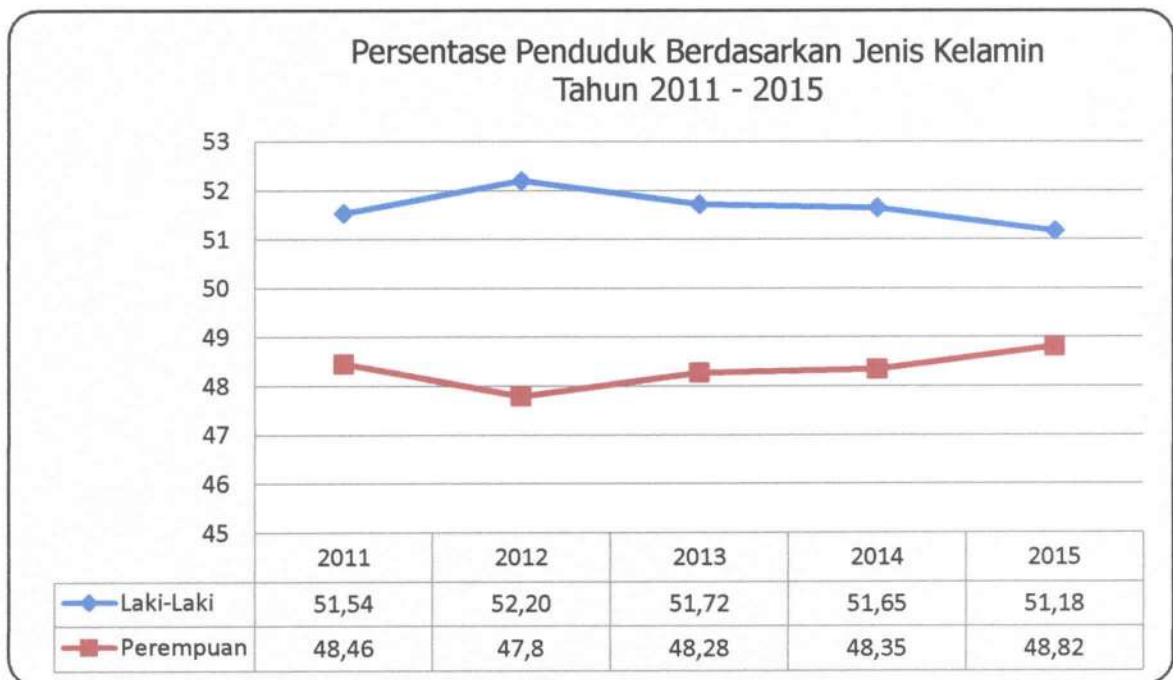
Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Gambar 2.5

Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari Gambar diatas bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 tercatat sebanyak 549.216 jiwa. Pada Tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2011 sebanyak 17.178 Jiwa atau 3,03% yaitu dari 549.216 jiwa menjadi 566.394 Jiwa. Tahun 2013 masih terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 24.803 jiwa atau 4,20% jumlah

penduduk menjadi 591,197 jiwa. Di Tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya tercatat sebanyak 596.669 jiwa atau naik sebanyak 5.472 jiwa atau 0,92% dari jumlah penduduk Tahun 2013. Dari 596.669 jiwa pada Tahun 2014, sebanyak 308.194 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 288.475 yang berjenis kelamin perempuan, dan Kecamatan Sungai Raya memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 226.638 atau sebesar 37,98% jiwa sedangkan yang terendah di Kecamatan Terentang sebanyak 12.673 jiwa atau sebesar 2,12%. Untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	(%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Batu Ampar	18.676	17.210	35.886	6,01
2	Terentang	6.665	6.008	12.673	2,12
3	Kubu	21.965	20.459	42.424	7,11
4	Teluk Pakedai	10.989	10.327	21.316	3,57
5	Sungai Kakap	62.455	58.776	121.231	20,32
6	Rasau Jaya	15.373	13.971	29.344	4,92
7	Sungai Raya	116.630	110.008	226.638	37,98
8	Sungai Ambawang	39.494	36.470	75.964	12,73
9	Kuala Mandor B	15.947	15.246	31.193	5,23
Jumlah		308.194	288.475	596.669	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator : Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan, Angka Kriminalitas yang tertangani.

A. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah

mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan produksi dari kegiatan ekonomi yang terdapat didalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Penyediaan kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dapat menjadi indikator semakin membaiknya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Publikasi Tahun 2014 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data PDRB Harga Konstan Tahun 2010 sebesar Rp. 4.936 Miliar, Tahun 2011 sebesar Rp. 5.258 Miliar, Tahun 2012 sebesar Rp. 5.610 Miliar, dan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.991 Miliar. Dari data diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya meningkat dari Tahun ke Tahun, dan yang memberikan kontribusi terbesar ada pada sektor industri pengolahan. Sedangkan berdasarkan PDRB harga berlaku Tahun 2010 sebesar Rp. 8.800 Miliar, Tahun 2011 sebesar Rp. 9.978 Miliar, Tahun 2012 sebesar Rp. 11.204 Miliar dan Tahun 2013 sebesar Rp. 12.745 Miliar, dengan kontribusi terbesar pada sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 sampai dengan 2014 Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku serta Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian	977	19,8	1.039	19,9	1.089	19,4	1.152	19,2	1.152	19,2
2	Pertambangan & Penggalian	20	0,4	22	0,4	24	0,4	26	0,4	26	0,4
3	Industri Pengolahan	2.265	46	2.366	45,1	2.458	43,8	2.576	43	2.576	43
4	Listrik, Gas & Air Bersih	25	0,5	28	0,5	32	0,6	34	0,5	34	0,5
5	Konstruksi	54	1,1	65	1,2	74	1,3	82	1,4	82	1,4
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	816	16,5	853	16,2	909	16,2	952	15,9	952	15,9
7	Pengangkutan & Komunikasi	438	8,9	514	9,8	620	11,1	728	12,2	728	12,2
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	107	2,2	117	2,2	130	2,3	143	2,4	143	2,4
9	Jasa-Jasa	229	4,6	249	4,7	272	4,9	295	5	295	5
	PDRB ADHK	4.936	100	5.258	100	5.610	100	5.991	100	5.991	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

Tabel 2.5

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian	1.661	18,9	1.862	18,7	2.016	18	2.189	17,2	2.189	17,2
2	Pertambangan & Penggalan	45	0,5	52	0,5	63	0,6	71	0,6	71	0,6
3	Industri Pengolahan	4.160	47,3	4.549	45,6	4.958	44,3	5.566	43,7	5.566	43,7
4	Listrik, Gas & Air Bersih	39	0,4	57	0,6	66	0,6	75	0,6	75	0,6
5	Konstruksi	137	1,6	285	2,9	360	3,2	457	3,6	457	3,6
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.539	17,5	1.697	17	1.922	17,2	2.105	16,5	2.105	16,5
7	Pengangkutan & Komunikasi	686	7,8	849	8,5	1.040	9,3	1.338	10,5	1.338	10,5
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	187	2,1	234	2,3	281	2,5	332	2,6	332	2,6
9	Jasa-Jasa	343	3,9	393	3,9	498	4,4	610	4,8	610	4,8
	PDRB ADHB	8.800	100	9.978	100	11.204	100	12.745	100	12.745	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

Tabel 2.6

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d Tahun 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kuba Raya

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian	977	1.661	1.039	1.862	1.089	2.016	1.152	2.189	1.152	2.189
2	Pertambangan & Penggalan	20	45	22	52	24	63	26	71	26	71
3	Industri Pengolahan	2.265	4.160	2.366	4.549	2.458	4.958	2.576	5.566	2.576	5.566
4	Listrik, Gas & Air Bersih	25	39	28	57	32	66	34	75	34	75
5	Konstruksi	54	137	65	285	74	360	82	457	82	457
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	816	1.539	853	1.697	909	1.922	952	2.105	952	2.105
7	Pengangkutan & Komunikasi	438	686	514	849	620	1.040	728	1.338	728	1.338
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	107	187	117	234	130	281	143	332	143	332
9	Jasa-Jasa	229	343	249	393	272	498	295	610	295	610
	PDRB	4.936	8.800	5.258	9.978	5.610	11.204	5.991	12.745	5.991	12.745

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuba Raya - PDRB Kabupaten Kuba Raya Tahun 2014

Tabel 2.7

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	PERTUMBUHAN	
		Hb (%)	Hk (%)
1	2	3	4
1	Pertanian	19,55	18,09
2	Pertambangan & Penggalian	0,42	0,54
3	Industri Pengolahan	44,38	45,02
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,55	0,55
5	Konstruksi	1,26	2,90
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	16,21	17,00
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,56	9,16
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	2,28	2,42
9	Jasa-Jasa	4,80	4,32
	PDRB	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

Dari Tabel diatas maka dapat ditarik beberapa ringkasan sebagai berikut:

1. Nilai Nominal PDRB Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami trend naik baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.
2. Indeks Location Quotient (LQ) yang paling tinggi adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan kemudian lapangan usaha Listrik, Gas dan Air Bersih dan lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu dari 6,51% pada Tahun 2011 meningkat menjadi 6,69% pada Tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 6,79% pada Tahun 2013.
4. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 44,38 % diikuti sector pertanian sebesar 19,55 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,21 %, sedangkan atas Harga Konstan (Hk) kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 45,02 % diikuti sektor pertanian sebesar 18,09 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,00 %.

B. Laju Inflasi Kabupaten

Terjadinya kenaikan harga barang/jasa akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, karena berpengaruh terhadap ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan. Tingkat perubahan harga digambarkan dengan indeks implisit/inflasi PDRB yang menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen dan cakupan harganya sangat luas. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cakupannya relatif terbatas beberapa komoditi dengan melihat perubahan harga pada tingkat konsumen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, laju inflasi Kabupaten Kubu Raya semakin turun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013. Tahun 2010 laju inflasi sebesar 8,80 dan pada Tahun 2013 laju inflasi sebesar 5,00, untuk Tahun 2014 masih mengikuti data Tahun 2013 yaitu sebesar 5,00, sedangkan rata-rata pertumbuhan 5 (lima) Tahun terakhir sebesar 5,10. Laju Inflasi Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014*)	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
Inflasi	8,80	6,46	5,25	5,00	5,00*)	5,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Selain masalah efisiensi, salah satu hal yang menjadi masalah klasik dalam perekonomian adalah pemerataan kesejahteraan. Pencapaian PDRB yang tinggi tanpa disertai pemerataan pendapatan maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Namun untuk melihat seberapa jauh pemerataan pendapatan yang diperoleh masyarakat sangatlah sulit. Indikator ini cukup mendukung untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan PDRB Per Kapita. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

PDRB Perkapita Kabupaten Kubu Raya terus mengalami trend meningkat dari 8.800.531,17 Juta di Tahun 2010, menjadi 9.978.601,17 Tahun 2011, Tahun 2012 sebesar 11.204.861,88 Juta pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2013 sebesar 12.745.849,87 Juta. Nilai PDRB Perkapita Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk berdasarkan data hasil Susenas, data jumlah penduduk ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

PDRB Per Kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan Tahun. PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9

PDRB Perkapita Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai PDRB Berlaku (Rp. Juta)	8.800.531,17	9.978.601,17	11.204.861,88	12.745.849,87	12.745.849,87
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	500.970	511.235	522.174	529.320	608.602
3.	PDRB Perkapita (Rp/Jiwa)	17.566.983,11	19.518.618,97	21.458.099,94	24.079.668,00	24.079.668,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

PDRB Perkapita Kabupaten Kubu Raya juga mengalami kenaikan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir, yakni Rp. 19.518.618,97 pada Tahun 2011 menjadi 21.458.099,94 di Tahun 2012 dan mencapai 24.079.668,00 pada Tahun 2013. PDRB Perkapita Kabupaten Kubu Raya juga menempati urutan ke 2 (dua) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

D. Indeks Gini/Koefisien Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah **G<0,30** berarti ketimpangan rendah, **0,30 ≤ G ≤ 0,50** berarti ketimpangan sedang dan **G > 0,50** berarti ketimpangan tinggi.

Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
Provinsi	0.37	0.36	0.36	0.37
Sambas	0.31	0.36	0.36	0.37
Bengkayang	0.30	0.33	0.35	0.34
Landak	0.20	0.26	0.34	0.31
Mempawah	0.40	0.31	0.33	0,31
Sanggau	0.34	0.34	0.32	0.32
Ketapang	0.41	0.31	0.38	0.32
Sintang	0.24	0.30	0.30	0.32
Kapuas Hulu	0.24	0.35	0.30	0,29
Sekadau	0.23	0.28	0.30	0.29
Melawi	0.28	0.27	0.33	0.28
Kayong Utara	-	0.34	0.33	0.31
Kubu Raya	0.29	0.34	0.38	0.38
Kota Pontianak	0.35	0.35	0.30	0.38
Kota Singkawang	0.32	0.31	0.34	0.38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Data berdasarkan Susenas Maret

Dari data diatas menunjukan bahwa Koefisien Gini Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun menunjukan trend naik dari 0,29 % di Tahun 2008, naik menjadi 0,34% pada Tahun 2009, menjadi 0,38% pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar 0,38%. Tahun 2010 dan Tahun 2011 Koefisien Gini Kabupaten Kubu Raya masih dibawah Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Tahun 2012 hingga Tahun 2013 Koefisien Gini Kabupaten Kubu Raya diatas Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Barat.

E. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:

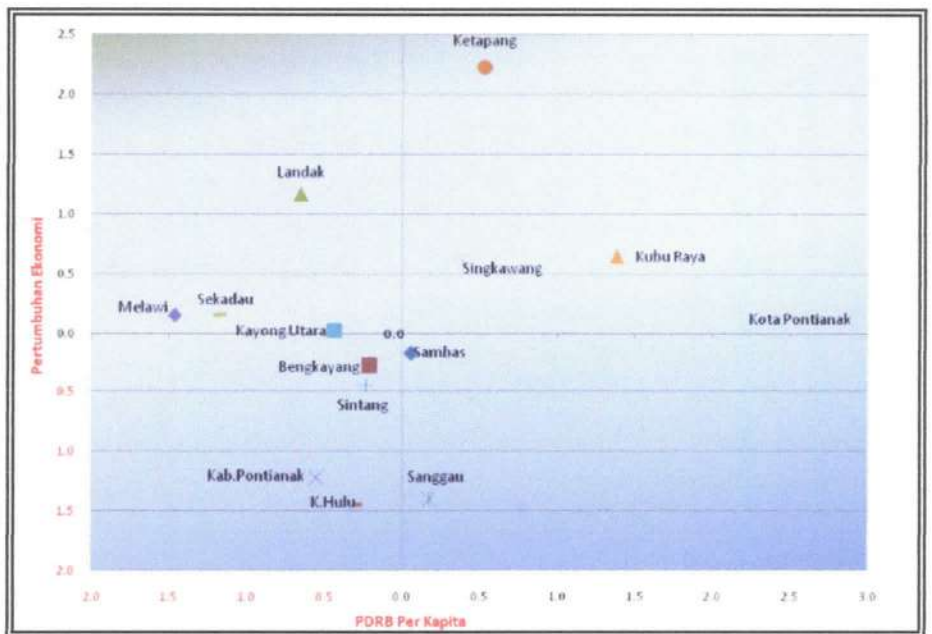
1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

F. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Pengukuran kesenjangan regional melalui pendekatan indeks akan digunakan berdasarkan analisis CVw (CV Williamson). Indeks CVw digunakan untuk indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar Kecamatan di suatu Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota di suatu Provinsi dalam waktu tertentu atau untuk mengukur kesenjangan pendapatan regional, khususnya pendapatan dalam pengertian indikator PDRB per kapita. Kesenjangan ekonomi antar wilayah menurut analisis CVw, menunjukkan kondisi kesenjangan wilayah dalam Provinsi Kalimantan Barat kecenderungan meningkat, hal tersebut diperlihatkan dengan nilai CVw dari Tahun ke Tahun.

Berkembangnya kawasan Kabupaten Kubu Raya ini didukung oleh keberadaan pusat kota utama yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Barat. Poros Pontianak-Mempawah di utara berpotensi berkembang lebih cepat dari sisi penduduk dan ekonomi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, sebagian besar karena dorongan perkembangan

konstruksi, manufaktur, perdagangan, jasa, pengeluaran pemerintah, dan bahan bangunan. Bahan bangunan adalah muatan utama dari Mempawah ke Pontianak. Rute itu kemungkinan besar calon yang kuat untuk jalan tol. Poros timur



Pontianak-Tayan dilayani dengan baik sekali oleh angkutan sungai, serta koridor selatan Trans Kalimantan ke tenggara, dan koridor utara yang menghubungkan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten di wilayah hulu. Sehingga Kabupaten Kubu Raya menikmati manfaat dari dampak pendapatan akibat peningkatan permintaan akhir atas output seluruh sektor yang lalu lintas di Provinsi Kalimantan Barat. Dari analisis Klassen pada Tahun 2011, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang masuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh.

Posisi letak Kabupaten Kubu Raya pada kwadran II berdasarkan typologi Williamson, dapat dipahami mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah baru pemekaran dan secara geografis berada pada daerah hinterland Kota Pontianak. Kondisi letak strategis tersebut menjadi Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah perlintasan baik daratan maupun moda transportasi sungai, yang menjadi pembangkit kegiatan ekonomi ikutan di sektor perdagangan dan jasa serta aktivitas investasi baru lainnya yang menopang kegiatan ekonomi produktif di Kabupaten Kubu Raya.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dibagi dalam 3 (tiga) Fokus yaitu: Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan. Fokus ke 3 (tiga) bidang ini dilakukan terhadap indikator-indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) dewasa adalah proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) dapat dipakai sebagai dasar Kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan Kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 dari 81,04 menjadi 88,32 pada Tahun 2015, sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kecamatan Tahun 2014 tertinggi yaitu 92,15 di Kecamatan Kuala Mandor B dan terendah di Kecamatan Teluk Pakedai yaitu 69,11. Angka Melek Huruf Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Angka Melek Huruf Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.11

Angka Melek Huruf (AMH)
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis	475.556	479.232	481.558	507.570	528.758
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	586.828	549.399	566.394	596.669	598.679
	Angka Melek Huruf	81,04	87,23	85,02	85,32	88,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.12

Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kecamatan Tahun 2014

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf
1	2	3	4	5
1	Batu Ampar	38.362	44.554	86,10
2	Terentang	14.118	16.720	84,44
3	Kubu	32.731	38.434	85,16
4	Teluk Pakedai	15.238	22.049	69,11
5	Sungai Kakap	118.512	142.939	82,91
6	Rasau Jaya	25.449	29.123	87,38
7	Sungai Raya	168.878	196.885	85,77
8	Sungai Ambawang	69.803	79.393	87,92
9	Kuala Mandor B	24.479	26.572	92,12
	Jumlah	507.570	596.669	85,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap Tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Tetapi, jumlah Tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah Tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi *kelebihan estimasi* atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Rata-Rata lama sekolah Kabupaten Kubu Raya menurut Kecamatan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami trend naik dari Tahun sebelumnya. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Batu Ampar	6,40	6,01	6,53	6,10	6,72	6,12	6,78	6,15	7,03	6,20
2	Terentang	6,14	6,00	6,22	6,01	6,35	6,05	6,50	6,08	6,70	6,10
3	Kubu	6,35	6,00	6,40	6,02	6,45	6,07	6,70	6,10	6,90	6,12
4	Teluk Pakedai	6,50	6,02	6,70	6,05	6,75	6,08	6,80	6,11	6,95	6,15
5	Sungai Kakap	7,00	6,10	7,10	6,12	7,15	6,15	7,20	6,20	7,25	6,25
6	Rasau Jaya	7,10	6,15	7,15	6,18	7,20	6,20	7,25	6,22	7,30	6,25
7	Sungai Raya	7,20	6,20	7,25	6,25	7,30	6,28	7,35	6,30	7,41	6,32
8	Sungai Ambawang	6,89	6,12	6,92	6,14	7,01	6,15	7,10	6,18	7,15	6,20
9	Kuala Mandor B	6,15	6,00	6,38	6,02	6,45	6,05	6,58	6,08	6,82	6,10
	Jumlah	6,64	6,06	6,74	6,10	6,82	6,13	6,92	6,16	7,06	6,19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 Tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 Tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti Angka Patisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan Angka Patisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Angka Patisipasi Murni (APM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 88,97 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 68,23 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 39,75. Untuk Tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 78,26 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 53,91 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 47,33. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya dan Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	59,982	60,840	61,697	63,164	57.515
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	67,412	68,441	69,471	70,500	73,493
	APM SD/MI	88,97	88,89	88,81	89,59	78,26
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	22,477	23,083	23,688	24,294	20.414
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	32.943	33.873	34.803	35.734	37.886
	APM SMP/MTs	68,23	68,15	68,06	67,99	53,91

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	11.980	13.304	14.670	12.025	17.006
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun	30.142	30.769	31.395	32.021	35.927
	APM SMA/MA/SMK	39,75	43,24	46,73	37,55	47,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 Tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 117,94 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 80,86 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 35,25. Untuk Tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 112,94 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 90,89 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 79,80. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	59.733	59.982	60.840	61.697	63.164
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	66.782	67.412	68.441	69.471	70.500
	APK SD/MI	117,04	115,24	115,22	115,71	112,94
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	21.871	22.477	23.083	23.688	24.294
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	32.013	32.943	33.873	34.803	35.734
	APK SMP/MTs	80,86	82,89	85,92	89,04	90,89
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	10.701	11.980	13.304	14.670	12.025
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	29.516	30.142	30.769	31.395	32.021
	APK SMA/MA/SMK	35,25	71,72	73,42	73,99	79,80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011 SD sebesar 98,95, SMP sebesar 97,75 dan SMA sebesar 66,60 sedangkan Tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei untuk SD sebesar 100, SMP 99,77 dan SMA sebesar 99,78. Sedangkan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) untuk Perguruan

Tinggi tidak terdata oleh Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	APT	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	98,95	100	100	100	100
2	SMP	97,75	96,79	98,67	99,14	99,77
3	SMA	66,60	92,95	99,63	99,74	99,78
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

B. Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu Tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu Tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi

dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 Tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 94,43% dari 32.500 jumlah kelahiran dan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun sebanyak 181 jumlah kematian. Rekapitulasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Rekapitulasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014	Jumlah Kelahiran Hidup Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014	AKB	AKHB
1	2	3	4	5	6
1	Batu Ampar	31	2.266	13,68	86,32
2	Terentang	17	742	22,92	77,08
3	Kubu	10	2.130	4,70	95,30
4	Teluk Pakedai	17	1.134	14,99	85,01
5	Sungai Kakap	32	6.773	4,72	95,28
6	Rasau Jaya	4	1.438	2,78	97,22
7	Sungai Raya	34	11.268	3,02	96,88
8	Sungai Ambawang	35	5.057	6,92	93,08
9	Kuala Mandor B	1	1.693	0,59	99,41
	JUMLAH	181	32.500	5,57	94,43

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata Tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu Tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata Tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu Tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya

Hasil Sensus Penduduk				
1	2	3	4	5
Tahun 1970	Tahun 1980	Tahun 1990	Tahun 2000	Tahun 2010
47,7	52,2	59,8	65,5	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk Kabupaten/kota dan Kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. Rendah = di bawah 10 %
- b. Sedang = 10-19 %
- c. Tinggi = 20-29 %
- d. Sangat Tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

C. Kemiskinan

1. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

1. **Kemiskinan Relatif**, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.
2. **Kemiskinan Absolut**, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US \$ 1 atau US \$ 2 per hari.
3. **Kemiskinan Struktural**, kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, dan kemiskinan kultural (karena faktor adat.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat bahwa Garis kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 sebesar 177,219 atau sebesar 6.78% dan Tahun 2013 sebesar 269.835 atau sebesar 6,04%. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 s/d Tahun 2013

Kabupaten/Kota	2009			2010			2011			2012			2013		
	GK	PO	PM	GK	PO	PM	GK	PO	PM	GK	PO	PM	GK	PO	PM
	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sambas	184,496	9.96	53.82	203,325	10.08	50.00	232,581	9.38	46.98	266,047	8.88	44.450	278,704	9,9	51,2
Bengkayang	168,633	7.82	17.89	185,843	7.82	16.80	210,755	7.25	15,785	239,006	6.74	14.943	240,704	8,01	18,4
Landak	170,61	15.48	55.83	188,022	14.06	46.50	217,071	13.13	43,691	250,608	12.41	41.331	252,336	14,18	49,5
Pontianak	162,518	5.46	13.10	180,322	6.41	15.00	206,338	5.97	14,094	236,107	5.64	13.334	240,081	6,3	15,6
Sanggau	150,982	4.62	19.86	167,522	5.02	20.50	191,732	4.67	19,262	219,441	4.4	18.254	222,877	4,71	20,4
Ketapang	203,276	13.08	59.56	225,545	13.67	58.50	259,1	12.75	54,966	297,647	11.91	52.017	310,504	12,85	58,8
Sintang	228,791	11.55	46.95	253,855	9.76	35.50	288,409	9.07	33,356	327,666	8.55	31.589	358,693	10,09	39
Kapuas Hulu	199,981	9.93	24.09	221,889	11.39	25.30	253,68	10.61	23,772	290,026	9.95	22.509	304,138	11,11	26,4
Sekadau	156,29	6.42	12.62	173,411	6.77	12.20	197,747	6.30	11,557	225,498	5.93	10.971	229,464	6,93	13,2
Melawi	227,859	12.62	23.54	252,821	13.77	24.70	296,06	12.93	23,302	346,694	12.1	22.036	371,723	13,7	26
Kayong Utara	143,177	12.43	12.50	158,862	11.69	11.20	183,174	10.91	10,523	211,207	10.16	9.931	207,989	10,87	11,1
Kubu Raya	177,219	6.78	37.09	196,633	7.14	35.90	227,635	6.67	33,731	263,525	6.27	31.871	269,835	6,04	32,1
Kota Pontianak	218,802	6.38	36.56	242,772	6.62	36.60	274,647	6.15	34,389	310,707	5.77	32.535	341,422	5,56	32,8
Kota Singkawang	215,275	6.20	11.99	237,245	6.12	11.40	271,004	5.69	10,711	309,567	5.32	10.119	320,211	6,5	13
Provinsi	189,184	9.05	425.39	198,886	9.30	400.10	219,636	8.48	376,12	239,162	7.96	355.700	270,305	8,74	407,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat
Data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

D. Kepemilikan Tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan)

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100. Kepemilikan Tanah Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Kepemilikan Tanah Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Luas Tanah (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Tanah	Persentase Penduduk Memiliki Tanah
1	2	3	4	5	6
1	Batu Ampar	247.715,80	35.886	-	-
2	Terentang	103.052,52	12.673	-	-
3	Kubu	129.961,00	42.424	-	-
4	Teluk Pakedai	44.219,78	21.316	-	-
5	Sungai Kakap	58.958,48	121.231	-	-
6	Rasau Jaya	19.289,17	29.344	-	-
7	Sungai Raya	132.052,58	226.638	-	-
8	Sungai Ambawang	104.773,14	75.964	-	-
9	Kuala Mandor B	32.514,54	31.193	-	-
	JUMLAH	872.537,01	596.669	-	-

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Jumlah penduduk yang memiliki tanah di Kabupaten Kubu Raya untuk saat ini belum tersedia oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya maupun Instansi teknis yang membidangi yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya.

E. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dari penduduk berdasarkan angkatan kerja menurut golongan umur, golongan umur yang paling tinggi bekerja dan yang mencari pekerjaan ada pada golongan umur 15 hingga 19 Tahun. Golongan umur 15 hingga 19 Tahun yang bekerja sebanyak 33.504 orang, dan yang mencari pekerjaan sebanyak 2.161 orang, dengan jumlah sebanyak 35.665 orang. Rasio

Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

No	Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	2	3	4	5
1	15-19	33.504	2.161	35.665
2	20-24	29.663	1.913	31.576
3	25-29	28.940	1.866	30.806
4	30-34	27.254	1.758	29.012
5	35-39	24.901	1.606	26.507
6	40-44	21.784	1.405	23.189
7	45-49	17.743	1.144	18.887
8	50-54	14.013	904	14.917
9	55-59	10.193	657	10.850
10	60-64	9.018	583	9.601
11	65+	-	-	-
	Jumlah	217.013	13.997	231.010

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

F. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Berdasarkan data dari Bagian Operasi Polda Kalimantan Barat angka kriminalitas Angka Kriminalitas berdasarkan jenis criminal sebanyak 165 kejadian dengan jenis kriminal tertinggi pada pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 75 kejadian, diikuti dengan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 44 kejadian, dan penganiayaan berat sebanyak 21 kejadian. Sedangkan jumlah kriminal yang tertangani sebanyak 41 kejadian. Angka Kriminal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22

Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

No	Jenis Kriminal	Kejadian	Tertangani
1	2	3	4
1	Pembunuhan	-	1 (Perkara Tahun 2013)
2	Penganiayaan Berat	21	15
3	Penculikan	1	1
4	Pencurian dengan Kekerasan	17	11
5	Pencurian dengan Pemberatan	75	17
6	Pencurian Ranmor	44	5
7	Pencurian Kawat Telepon	-	-
8	Pemeriksaan	4	1
9	Pembakaran	-	-
10	Senpi/Handak	-	-
11	Pemerasan	3	2
12	Penyelundupan	-	-
13	Kejahatan Terhadap Kepala Daerah	-	-
	Jumlah	165	53

Sumber: Biro Operasi Polda Kalbar Tahun 2015

2.1.3.3 Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Menurut data dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 jumlah grup kesenian sebanyak 25 grup kesenian dan 60 jumlah klub olahraga dan 11 Unit jumlah Gedung Olahraga. Tahun 2015 data per Bulan Mei tercatat sebanyak 118 grup kesenian, 83 jumlah klub olahraga dan 25 Unit jumlah Gedung Olahraga. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.23 berikut:

ru
n
f
f

Tabel 2.23

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	25	57	110	117	118
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	60	60	80	80	83
4	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	11	15	18	18	25

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1. Pendidikan Dasar

1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 Tahun dan 13-15 Tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Perkembangan APS Pendidikan Dasar SD/MI mengalami tren naik turun dari Tahun Tahun berikutnya begitu juga dengan SMP/MTs. APS SD/MI Tahun 2011 sebesar 89,44 dan menjadi 88,81 pada Tahun 2014, sedangkan untuk Tahun 2015 angka APS SD/MI sementara sampai data per Bulan Mei 2015 adalah 89,59. APS SMP/MTs Tahun 2011 sebesar 68,32 dan menjadi

68,06 pada Tahun 2014, sedangkan untuk Tahun 2015 angka APS SMP/MTs sementara data per Bulan Mei 2015 adalah 67,96. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	59.733	59.982	60.840	61.697	63.164
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	66.782	67.412	68.441	69.471	70.500
	APS SD/MI	89,44	88,98	88,89	88,81	89,59
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	21.871	22.477	23.083	23.688	24.294
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	32.013	32.943	33.873	34.803	35.734
	APS SMP/MTs	68,32	74,05	68,15	68,06	67,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah untuk Kabupaten Kubu Raya untuk SD/MI Tahun 2011 sebesar 16,93 dan 16,17 pada Tahun 2014, sedangkan rasio untuk SMP/MTs Tahun 2011 sebesar 23 dan 24 pada Tahun 2014. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	334	336	353	358	367
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	67.412	68.441	69.471	70.500	73.493
	Rasio	16,93	17,08	16,65	16,40	16,17

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	111	112	112	118	131
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	32.943	33.873	34.803	35.734	37.886
	Rasio	23	24	24	24	24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.1.3 Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Di Kabupaten Kubu Raya jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar dari Tahun 2011 terus meningkat dari Tahun ke Tahun begitu juga dengan Jumlah Guru dan Murid untuk Sekolah Menengah Pertama. Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2011 sebanyak 3.495 guru yang dibagi menurut guru tetap dan guru honorer dengan jumlah murid sebanyak 62.025 siswa dengan Rasio sebesar 17,75, dan pada Tahun 2015 sebanyak 3.813 guru yang dibagi menurut guru tetap dan guru honorer dengan jumlah murid sebanyak 70.081 siswa dengan Rasio sebesar 18,11. Rasio jumlah guru SD/MI berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 sebesar 16,26 dan rasio jumlah guru SMP/MTs sebesar 12,87.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	3.495	3.740	3.835	3.813	3.869
	- Guru Tetap	3.027	3.271	3.367	3.314	3.357
	- Guru Honorer	468	469	486	499	512
1.2	Jumlah Murid	62.025	63.688	68.282	68.284	70.081
	Rasio	17,75	17,03	17,72	17,91	18,11

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	585	603	1.017	1.034	1.048
	- Guru Tetap	472	488	893	901	912
	- Guru Honorer	113	115	124	133	136
2.2.	Jumlah Murid	18.858	20.719	22.956	25.568	28.283
	Rasio	32,24	41,19	22,57	24,73	27,62

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.2 Pendidikan Menengah

1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 Tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. APS untuk jenjang pendidikan menengah Tahun 2011 sebesar 28,09 menjadi 40,45 pada Tahun 2014 dan hasil data sementara per Bulan Mei untuk Tahun 2015 sebesar 45,82.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA/MAN					
1.1	Jumlah Murid Usia 16-19 Tahun	12.821	14.228	15.275	17.116	17.006
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-19 Tahun	29.516	30.142	30.769	31.395	32.021
	APS SMA/MAN	28,09	32,52	36,01	40,45	45,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia

pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah SMA/MAN dari Tahun ke Tahun mengalami trend menurun. Pada Tahun 2011 Rasio ketersediaan sekolah sebesar 441, menurun menjadi 401 di Tahun 2012, menjadi 336 pada Tahun 2013 , menurun kembali menjadi 337 di Tahun 2014 dan hasil data sementara per Bulan Mei untuk Tahun 2015 sebesar 317.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA/MAN					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	67	75	84	93	101
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-19 Tahun	29.516	30.142	30.769	31.395	32.021
	Rasio	441	401	366	337	317

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.2.3 Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Jumlah guru SMA/MAN Tahun 2011 sebanyak 391 guru berdasarkan jumlah guru tetap dan guru honorer dengan Jumlah Murid sebanyak 12.821 murid dengan Rasio sebesar 3,05, dan pada Tahun 2015 berdasrakan data sementara per Bulan Mei Tahun 2015 jumlah guru sebanyak 505 yang berdasarkan guru tetap dan guru honorer dengan Jumlah murid sebanyak 17.006 murid dengan rasio 2,97. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.29 berikut:

Handwritten blue notes and a signature on the right margin.

Tabel 2.29

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA/MAN					
1.1.	Jumlah Guru	391	500	457	496	505
	- Guru Tetap	319	424	381	418	424
	- Guru Honorer	72	76	76	78	81
1.2.	Jumlah Murid	12.821	14.228	15.275	17.116	17.006
	Rasio	3,05	3,51	2,99	2,90	2,97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2. Kesehatan

1.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Jumlah Posyandu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terus meningkat dari 348 Posyandu di Tahun 2011 menjadi 376 Posyandu di Tahun 2014, sedangkan jumlah Posyandu pada Tahun 2015 masih mengikuti jumlah Posyandu Tahun 2014. Jumlah Balita pada Tahun 2012 mengalami penurunan dari 75.812 Balita di Tahun 2011 menjadi 49.926 pada Tahun 2012, sedangkan pada Tahun 2014 menjadi 54.392 Balita. Untuk Tahun 2015 data sementara per periode Mei Tahun 2015 sebanyak 54.927 atau dengan rasio 6,92. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya dan Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.30

Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Posyandu	348	360	371	376	376
2.	Jumlah Balita	75.812	49.926	53.392	54.392	54.927
	Rasio	4,59	7,21	6,95	6,91	6,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.31

Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	2	3	4	5=4/3
1	Batu Ampar	46	3.491	13,18
2	Terentang	30	1.310	22,90
3	Kubu	17	3.865	4,40
4	Teluk Pakedai	23	2.124	10,83
5	Sungai Kakap	66	11.663	5,66
6	Rasau Jaya	21	2.575	8,16
7	Sungai Raya	99	19.456	5,09
8	Sungai Ambawang	47	7.332	6,41
9	Kuala Mandor B	27	2.485	10,87
	Jumlah	376	54.927	6,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah Puskesmas Tahun 2011 sebanyak 18 Unit, Tahun 2012 sampai dengan 2014 sebanyak 19 Unit dan Pada Tahun 2014 sebanyak 20 Unit. Jumlah Poliklinik pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 87 Unit dan di Tahun 2014 sebanyak 112 Unit. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Posyandu dan Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.32

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Puskesmas	18	19	19	20	20
2.	Jumlah Poliklinik	87	87	87	112	112
3.	Jumlah Pustu	65	65	67	71	71
4.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	596.669
5.	Rasio Puskesmas	0,0033	0,0034	0,0032	0,0034	0,0034
6.	Rasio Poliklinik	0,0158	0,0154	0,0147	0,0188	0,0188
7.	Rasio Pustu	0,0118	0,0115	0,0113	0,0117	0,0117

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.33

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8	9=8/3
1	Batu Ampar	35.886	3	0,0084	16	0,0446	5	0,0139
2	Terentang	12.673	2	0,0158	10	0,0789	8	0,0631
3	Kubu	42.424	2	0,0047	9	0,0212	11	0,0259
4	Teluk Pakedai	21.316	1	0,0047	14	0,0657	8	0,0375
5	Sungai Kakap	121.231	3	0,0025	17	0,0140	10	0,0082
6	Rasau Jaya	29.344	1	0,0034	6	0,0204	2	0,0068
7	Sungai Raya	226.638	4	0,0018	20	0,0088	14	0,0062
8	Sungai Ambawang	75.964	3	0,0039	14	0,0184	8	0,0105
9	Kuala Mandor B	31.193	1	0,0032	6	0,0192	5	0,0160
	Jumlah	596.669	20	0,00483	112	0,2913	71	0,1883

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 serta jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.34

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	-	2	2	2	2
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	-	1	1	1	1
6.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	-	3	3	3	3
7.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
	Rasio	-	0,000530	0,000507	0,000503	0,000493

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

ah
n
f
t

Tabel 2.35

Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	RSU (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Batu Ampar	35.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	12.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	42.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	21.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	121.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	29.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	226.638	-	-	-	-	2	0,0009	-	-	1	0,0004	3	0,0022
8	Sungai Ambawang	75.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	31.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	596.669	-	-	-	-	2	0,0009	-	-	1	0,0004	3	0,0022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Jumlah Dokter Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah Dokter. Untuk Tahun 2011 sebanyak 27 Dokter, dan Tahun 2014 menjadi 36 Dokter. Jumlah Dokter Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 serta Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.36

Jumlah Dokter Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Dokter	27	28	32	36	36
2	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
	Rasio	0,0049	0,0049	0,0054	0,0060	0,0060

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.37

Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	2	3	4	5=4/3
1	Batu Ampar	35.886	3	0,0084
2	Terentang	12.673	2	0,0158
3	Kubu	42.424	1	0,0024
4	Teluk Pakedai	21.316	3	0,0141
5	Sungai Kakap	121.231	7	0,0058
6	Rasau Jaya	29.344	2	0,0068
7	Sungai Raya	226.638	9	0,0040
8	Sungai Ambawang	75.964	7	0,0092
9	Kuala Mandor B	31.193	2	0,0064
	Jumlah	596.669	36	0,0728

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.5 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan dari Tahun 2011 sebanyak 366 Tenaga Medis menjadi 421 Tenaga Medis pada Tahun 2015. Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 serta Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.38

Jumlah Tenaga Medis
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Tenaga Medis	366	375	377	386	421
2	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
	Rasio	0,0666	0,07662	0,0638	0,0647	0,0692

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.39

Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	2	3	4	5=4/3
1	Batu Ampar	35.886	33	0,0920
2	Terentang	12.673	20	0,1578
3	Kubu	42.424	28	0,0660
4	Teluk Pakedai	21.316	15	0,0704
5	Sungai Kakap	121.231	90	0,0742
6	Rasau Jaya	29.344	30	0,1022
7	Sungai Raya	226.638	122	0,0538
8	Sungai Ambawang	75.964	61	0,0803
9	Kuala Mandor B	31.193	22	0,0705
	Jumlah	596.669	421	0,7673

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3. Lingkungan Hidup

3.1 Persentase Penanganan Sampah

Persentase jumlah volume Sampah dan produksi sampah yang terangkut Tahun 2011 sebesar 14,71 % dan Tahun 2014 mencapai 27,98 %. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.40

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011 (M ³)	2012 (M ³)	2013 (M ³)	2014 (M ³)	2015*) (M ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani	13.662	27.720	27.720	28.710	49.500
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah	92.880	96.120	99.360	102.600	105.840
	Persentase	14,71	28,84	27,90	27,98	46,77

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.41

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2015
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang Ditangani	Jumlah Volume Produksi Sampah	Persentase
1	2	3	4	5=4/3
1	Batu Ampar	-	-	-
2	Terentang	-	-	-
3	Kubu	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-
5	Sungai Kakap	1.800	19.886,40	9,05
6	Rasau Jaya	-	-	-
7	Sungai Raya	36.000	203.974,20	17,65
8	Sungai Ambawang	7.200	11.841,30	60,80
9	Kuala Mandor B	-	-	-
	Jumlah	45.000	235.701,90	19,09

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3.2 Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Pada umumnya Penduduk Kabupaten Kubu Raya hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air minum sehari-hari yang ditampung pada gentong/tempayan. Untuk Air leding/PAM di Kabupaten Kubu Raya dari 9 (Sembilan) Kecamatan hanya 3 (satu) Kecamatan yang mendapat sambungan PDAM yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Kakap dengan 13.593 jumlah sambungan pelanggan. Kecamatan Sungai Raya sebanyak 13.323 sambungan yang terdiri dari 11.991 sambungan dari Unit Sungai Raya, 824 sambungan dari Unit Kuala Dua dan 508 sambungan dari Unit Kapur, Kecamatan Kuala Mandor B sebanyak 70 sambungan dan Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 200 sambungan pelanggan.

Jumlah Pelanggan dan Jumlah Air yang terpakai Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.42 berikut:

Tabel 2.42
Jumlah Pelanggan dan Air Terpakai Tahun 2015
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Air Yang Terpakai (M³)
1	2	3	4
1	Batu Ampar	-	-
2	Terentang	-	-
3	Kubu	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-
5	Sungai Kakap	200	2.403
6	Rasau Jaya	-	-
7	Sungai Raya	13.323	150.511
	- Sungai Raya	11.991	131.209
	- Kuala Dua	824	11.347
	- Kapur	508	7.955
8	Sungai Ambawang	-	-
9	Kuala Mandor B	70	801
	Jumlah	13.593	153.715

Sumber: Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3.3 Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan Tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.43 berikut:

Tabel 2.43

Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Area Permukiman Tertata					
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan					
3	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata					

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Persentase luas permukiman yang tertata untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

4. Sarana dan Prasarana Umum

4.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu :

1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan
Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan

teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (*“engineering criteria”*) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

- 2. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi
Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat.
- 3. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan
Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Kondisi panjang jalan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 sepanjang 542.024 Km, dengan kondisi baik sepanjang 231,378 Km atau sebesar 42,69%, kondisi sedang rusak 0%, kondisi rusak sepanjang 266.668 Km atau sebesar 49,20% dan kondisi rusak berat sepanjang 43.978 Km atau 8,11%. Sedangkan pada Tahun 2014 kondisi panjang jalan sepanjang 529.357 Km dengan kondisi baik sepanjang 202.005 atau sebesar 38,16%, kondisi sedang rusak sepanjang 38.181 atau sebesar 38,16%, kondisi rusak sepanjang 55.416 Km atau 10,47% dan kondisi rusak berat sepanjang 233.755 Km atau sebesar 44,16%. Berdasarkan data yang ada kondisi jalan di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan pada kondisi baik, sedang rusak dan rusak dari Tahun ke Tahun, sedangkan kondisi rusak berat makin meningkat dari Tahun ke Tahun dari 8,11% di Tahun 2011 menjadi 44,16% pada Tahun 2014.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kondisi Baik	231.378	217.017	220.788	202.005	*)
2.	Kondisi Sedang Rusak	-	-	64.024	38.181	*)
3.	Kondisi Rusak	266.668	290.795	23.892	55.416	*)
4.	Kondisi Rusak Berat	43.978	34.212	220.653	233.755	*)
	Jumlah	542.024	542.024	529.357	529.357	*)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari panjang jalan berdasarkan kondisi menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya dapat kita lihat persentase jalan kondisi baik sebesar 38,16%, kondisi sedang rusak sebesar 7,21%, kondisi rusak sebesar 10,47% dan rusak berat sebesar 44,16%. Dari kondisi jalan rusak berat persentase paling tinggi ada pada Kecamatan Sungai Raya sebesar 15,17% diikuti Kecamatan Kubu sebesar 11,25%, sedangkan Kecamatan terentang memiliki kondisi jalan rusak berat terendah yaitu 1,43%.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.45 berikut:

Tabel 2.45

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan Secara Keseluruhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Batu Ampar	45.878	11.249	1.920	11.084	70.131
2	Terentang	5.154	8.367	2.688	7.564	23.773
3	Kubu	8.833	1.298	16.016	59.547	85.694
4	Teluk Pakedai	8.757	2.868	2.596	12.901	27.122
5	Sungai Kakap	44.780	1.258	11.156	14.800	71.994
6	Rasau Jaya	22.732	1.763	7.185	14.007	45.687
7	Sungai Raya	40.691	5.628	3.559	80.288	130.166
8	Sungai Ambawang	18.204	5.750	9.853	16.870	50.677
9	Kuala Mandor B	6.976	-	443	16.694	24.113
	Jumlah	202.005	38.181	55.416	233.755	529.357

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

4.2 Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Jaringan irigasi selain ditunjang oleh sumber dana dari anggaran APBD juga ditunjang dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 747.700.000,00, Tahun 2011 sebesar Rp. 3.810.600.000,00, dan Tahun 2015 sebesar Rp. 5.011.070.000,00. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.46

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jaringan Primer	-	-	-	-	-
2.	Jaringan Sekunder	-	-	-	-	-
3.	Jaringan Tersier	-	-	-	-	-
4.	Luas Lahan Budidaya	-	-	-	-	-
	Rasio	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.47

Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6/7
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya. Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien.

Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga *Relative Irrigation Supply (RIS)* menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau *Relative Water Supply (RWS)* merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman. PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.48

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Pasokan Irigasi	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasok Irigasi Per Area	-	-	-	-	-
2.	Pasok Irigasi Relatif	-	-	-	-	-
3.	Pasok Air Relatif	-	-	-	-	-
4.	Indek Luas Areal	-	-	-	-	-
5.	Rancangan Luas Areal	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.49

Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/dtk)	Total Pasok Air (lt/dtk)	PIA (lt/dtk/ha)	PIR (lt/dtk/ha)	PAR (lt/dtk/ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/4	10=7/5	11=8/5	12=4/3
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Rasio Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya.

Handwritten signature

4.3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya pada Data Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2013 Publikasi Tahun 2014, jumlah tempat ibadah Agama Islam Tahun 2013 sebanyak 1.143 tempat ibadah dengan 540 jumlah Mesjid dan 603 Surau dengan jumlah pemeluk sebanyak 413.122 orang dengan rasio sebesar 361,473. Gereja Khatolik sebanyak 68 Gereja dengan jumlah pemeluk sebanyak 27.662 orang dengan rasio sebesar 406,794. Gereja Protestan sebanyak 68 Gereja dengan jumlah pemeluk sebanyak 39.369 dengan rasio sebesar 578,956. Pura sebanyak 5 Pura dengan jumlah pemeluk sebanyak 4.121 dengan rasio sebesar 824,200. Vihara sebanyak 23 Vihara dengan jumlah pemeluk sebanyak 39.780 orang dengan rasio sebesar 1.729,565, sedangkan Kelenteng sebanyak 22 Kelenteng dengan jumlah emeluk sebanyak 5.266 orang dengan rasio sebesar 239,364. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dan Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2013 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.50

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya

NO	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2010			Tahun 2013		
		Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
1.	- Mesjid - Surau	538 506	400.411	383,535	540 603	413.122	361,437
2.	Gereja Khatolik	74	31.636	427,514	68	27.662	406,794
3.	Gereja Ptotestan	33	29.043	880,091	53	39.369	742,811
4.	Pura	5	4.203	840,600	5	4.121	824,200
5.	Vihara	23	33.192	1.433,130	23	39.780	1.729,565
6.	Kelenteng	22	2.485	112,955	22	5.266	239,364

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.51

Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Mesjid/Surau			Gereja Khatolik			Gereja Protestan			Pura			Vihara			Kelenteng		
		Mesjid (Unit)	Surau (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1	Batu Ampar	50	31	29.129	359,617	6	1.663	277,167	1	1.195	1.195,000	-	-	-	2	2.361	1180,5	1	206
2	Terentang	22	30	8.511	163,673	3	987	329,000	5	628	125,600	-	-	-	3	565	188,333	1	29
3	Kubu	54	12	30.102	456,091	13	2.081	160,077	3	2.953	984,333	-	701	-	4	1.464	366	-	133
4	Teluk Pakedai	47	24	17.371	244,662	2	243	121,500	-	583	-	-	101	-	-	1.251	-	-	-
5	Sungai Kakap	72	99	96.214	562,655	4	1.426	356,500	2	1.989	994,500	1	276	276	8	7.312	914	6	1.722
6	Rasau Jaya	33	54	24.125	277,299	3	379	126,333	3	377	125,667	1	59	59	1	183	183	-	-
7	Sungai Raya	137	116	137.139	542,051	8	13.887	1735,875	6	17.654	2.942,333	3	2.785	928,333	5	24.997	4999,4	-	2.423
8	Sungai Ambawang*)	68	145	46.836	219,887	27	6.462	239,333	20	13.875	693,750	-	126	-	-	1.492	-	-	753
9	Kuala Mandor B	57	92	23.695	159,027	2	534	267,000	13	115	8,846	-	73	-	-	155	-	-	-
	Jumlah	540	603	413.122	361,437	68	27.662	406,794	53	39.369	413.122	5	4.121	413.122	23	39.780	1729,565	8	5.266
																			658,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

*) Belum termasuk warga Perum IV yang pengakuannya masuk ke Kota Pontianak

4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- a. Fasilitas air bersih
- b. Pembuangan tinja
- c. Pembuangan air limbah (air bekas)
- d. Pembuangan sampah

Hasil analisis data Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.52
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Tinggal	111.649	113.375	117.357	105.864	105.864
	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.53
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Persentase
1	2	3	4	5=4/3
1	Batu Ampar	6.911	-	-
2	Terentang	2.143	-	-
3	Kubu	7.487	-	-
4	Teluk Pakedai	3.910	-	-
5	Sungai Kakap	21.788	-	-
6	Rasau Jaya	5.025	-	-
7	Sungai Raya	39.777	-	-
8	Sungai Ambawang	13.909	-	-
9	Kuala Mandor B	4.914	-	-
	Jumlah	105.864	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

4.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan.

Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.54 berikut:

Maaf

Tabel 2.54
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011			2014		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung	Jumlah	Luas	Daya Tampung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	-	-	-	-	-	-
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	-	-	-	-	-	-
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Tempat Pemakaman	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Penduduk (jiwa)	549.216	-	-	596.669	-	-
7	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

4.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan Jumlah TPS dirasakan masih kurang karena TPS yang ada hanya mencukupi jumlah penduduk sekitar TPS tidak berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan. Begitu juga halnya dengan rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut Kecamatan, selain Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan-Kecamatan lain tidak tersebar secara merata seperti Kecamatan Sungai Kakap hanya ada di Desa Sungai Rengas serta Kecamatan Sungai Ambawang hanya terdapat di Desa Sungai Ambawang Kuala. Sedangkan untuk beberapa Kecamatan tidak ada TPS yang terbangun di Kecamatan seperti Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Kuala Mandor B.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.55

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah TPS	7	15	15	15	25
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	34,5	70	70	72,5	125
3.	Jumlah Penduduk Yang Lokasi ada TPS (Jiwa)	222.070	227.974	231.455	236.338	261.891
4.	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penduduk (M ³ /Jiwa)	0,000155	0,000307	0,000302	0,000307	0,000477

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.56

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Ada Lokasi TPS (Jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (M ³)	
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	22.096	1	5	0,000226
6	Rasau Jaya	-	-	-	-
7	Sungai Raya	226.638	20	100	0,000441
8	Sungai Ambawang	13.157	4	20	0,000152
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	Jumlah	261.891	25	125	0,000477

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

4.7 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rumah layak huni di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2011 sebanyak 67.324 rumah dan 94. 016 rumah di Tahun 2015.

Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.57

Rasio Rumah Layak Huni
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
2.	Jumlah Rumah Layak Huni	67.324	73.085	81.102	94.016	94.016
	Rasio	0,1226	0,1290	0,1372	0,1576	0,1545

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

4.8 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.58
Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Permukiman Layak Huni	-	-	-	-	-
2.	Total Luas Permukiman	-	-	-	-	-
	Rasio	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Rasio permukiman layak huni untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

5. Penataan Ruang

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

5.2 Rasio Bangunan ber IMB Per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah bangunan yang ber IMB di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terjadi penurunan rasio bangunan yang memiliki IMB dari 0,252 pada Tahun 2011 turun menjadi 0,166 di Tahun 2015. Data bangunan yang memiliki IMB berdasarkan data dari berkas IMB yang masuk dan yang telah disetujui secara teknis.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.59

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	735	1.168	1.411	1.682	1.682
2.	Jumlah Bangunan	2.919	5.640	6.464	10.162	10.162
	Rasio Bangunan Ber-IMB	0,252	0,207	0,218	0,166	0,166

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.60

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
1	2	3	4	5=4/3
1	Batu Ampar	-	-	-
2	Terentang	-	-	-
3	Kubu	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-
5	Sungai Kakap	3.577	274	0,077
6	Rasau Jaya	155	-	-
7	Sungai Raya	4.544	1.010	0,222
8	Sungai Ambawang	1.885	398	0,211
9	Kuala Mandor B	-	-	-
	Jumlah	10.162	1.682	0,166

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Dari Tabel diatas daari 10.162 jumlah bangunan hanya 1.682 bangunan yang memiliki IMB.

6. Perhubungan

6.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang angkutan umum berdasarkan penumpang bis/angkot dari Tahun ke Tahun menunjukkan penurunan dikarenakan masyarakat

sudah banyak memiliki kendaraan sendiri baik sepeda motor maupun kendaraan bermotor lainnya, akan tetapi jumlah penumpang kapal pedalaman mengalami kenaikan jumlah penumpang begitu juga dengan jumlah penumpang pesawat udara mengalami kenaikan jumlah dari Tahun ke Tahun.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.61

Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Penumpang Bis/Angkot	384.254	349.979	339.271	198.765	25.324
2.	Jumlah Penumpang Kapal Pedalaman	46.225	51.360	50.995	53.356	*)
3.	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	2.132.737	2.288.816	2.242.610	2.568.706	*)
	Jumlah	2.563.216	2.690.155	2.632.876	2.820.827	25.324

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.62

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penumpang			Total Jumlah Penumpang
		Bis	Kapal Pedalaman	Pesawat Udara	
1	2	3	4	5	6
1	Batu Ampar	-	24.816	-	24.816
2	Terentang	-	2.988	-	2.988
3	Kubu	-	6.762	-	6.762
4	Teluk Pakedai	-	6.010	-	6.010
5	Sungai Kakap	28.266	-	-	28.266
6	Rasau Jaya	-	12.780	-	12.780
7	Sungai Raya	170.499	-	2.568.706	2.739.205
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	Jumlah	198.765	53.356	2.568.706	2.820.827

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

6.2 Rasio Ijin Trayek

Ijin Trayek untuk trayek perdesaan tidak ada penambahan ijin sehingga dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 berjumlah 62 Ijin. Untuk Ijin Trayek Kapal Pedalaman bertambah dari Tahun-Tahun sebelumnya walau tidak bertambah pesat. Ijin trayek Kapal pedalaman pada Tahun 2011 sebanyak 34 ijin dan di Tahun 2014 menjadi 52 ijin trayek kapal pedalaman.

Rasio Ijin Trayek Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.63

Rasio Ijin Trayek Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Izin Trayek Perdesaan	62	62	62	62	*)
2.	Izin Trayek Kapal Pedalaman	34	37	42	52	*)
3.	Jumlah Izin Trayek	96	99	104	114	*)
4.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
6.	Rasio Izin Trayek	0,00017	0,00017	0,00018	0,00019	*)

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.64

Rasio Ijin Trayek Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Izin Trayek		Total Jumlah Izin Trayek	Rasio Izin Trayek
			Perdesaan	Kapal Pedalaman		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	(8=7/3)
1	Batu Ampar	35.886	-	6	6	0,000167
2	Terentang	12.673	-	1	1	0,000078
3	Kubu	42.424	-	13	13	0,000306
4	Teluk Pakedai	21.316	-	5	5	0,000235
5	Sungai Kakap	121.231	-	3	3	0,000025
6	Rasau Jaya	29.344	-	20	20	0,000682
7	Sungai Raya	226.638	62	4	66	0,000291
8	Sungai Ambawang	75.964	-	62	62	0,000000
9	Kuala Mandor B	31.193	-	-	-	-
	Jumlah	596.669	62	52	114	0,000191

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

6.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Dari data dibawah jumlah mobil penumpang umum, mobil bus maupun mobil barang pada umumnya lebih sedikit dari jumlah KIR. Untuk mobil penumpang umum Tahun 2011 berjumlah 393 dan yang melakukan KIR berjumlah 288 dan Tahun 2014 berjumlah 115 dan yang melakukan KIR berjumlah 94. Begitu juga untuk Mobil Bus untuk Tahun 2011 berjumlah 81 dan yang melakukan KIR berjumlah 79 dan Tahun 2014 berjumlah 62 dan yang melakukan KIR berjumlah 48. Untuk mobil barang mengalami kenaikan jumlah dari Tahun 2011 berjumlah 1.425 yang melakukan KIR sejumlah 1.298 dan di Tahun 2014 berjumlah 2.739 yang melakukan KIR sejumlah 2.988. Sedangkan Prosentase Jumlah Uji Kir Angkutan menurut Kecamatan tertinggi di Kecamatan terentang sebesar 100% dan terendah di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 71,43%.

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.65

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Angkutan Umum	2011			2012			2013			2014			2015*)		
		Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Mobil Penumpang Umum	393	290	73,79	288	280	97,22	303	183	60,40	115	94	81,74	116	24	20,69
2.	Mobil Bus	81	79	97,53	84	82	97,62	90	69	76,67	62	48	77,42	65	13	20,00
3.	Mobil Barang	1.425	1.298	91,09	2.091	1.886	90,20	2.700	2.061	76,33	2.739	2.387	87,15	2.988	801	26,81
	Jumlah	1.899	1.667	87,78	2.463	2.248	91,27	3.093	2.313	74,78	2.916	2.529	86,73	3.169	838	26,44

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.66

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun pada Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Angkutan Umum	Mobil Penumpang Umum			Mobil Bus			Mobil Barang			Jumlah Angkutan	Jumlah KIR	%
		Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%			
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	18	19	20=19/18
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-	5	4	80	5	4	80
2	Terentang	-	-	-	-	-	-	4	4	100	4	4	100
3	Kubu	-	-	-	-	-	-	34	30	88,24	34	30	88,24
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-	29	25	86,21	29	25	86,21
5	Sungai Kakap	10	8	80	-	-	-	362	316	87,29	372	324	87,10
6	Rasau Jaya	-	-	-	1	1	100	130	113	86,92	131	114	87,02
7	Sungai Raya	95	78	82,11	54	42	77,78	1.996	1.739	87,12	2.145	1.859	86,67
8	Sungai Ambawang	7	6	85,71	7	5	71,43	175	153	87,43	189	164	86,77
9	Kuala Mandor B	3	2	66,87	-	-	-	4	3	75	7	5	71,43
	Jumlah	115	94	81,74	62	48	77,42	2.739	2.387	87,15	2.916	2.529	86,73

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut/udara di Kabupaten Kubu Raya tidak mengalami perubahan dari Tahun 2011 sampai dengan 2015, untuk jumlah terminal bis/angkot Tahun 2011 berjumlah 5 terminal dan pada Tahun 2012 sampai dengan 2015 berjumlah 6 terminal bis/angkot. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis/Angkot Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.67 berikut:

Tabel 2.67
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Terminal Bis/Angkot	5	6	6	6	6
	Jumlah	6	7	7	7	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Penanaman Modal

1.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Perkembangan investor di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terus bertambah baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah Investor Tahun 2011 sebanyak 220 investor yang terdiri dari 207 PMDN dan 13 PMA dan Tahun 2014 sebanyak 229 investor yang terdiri dari 212 PMDN dan 17 PMA. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 sampai dengan 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.68 berikut:

Tabel 2.68

Jumlah Investor PMDN/PMA
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	2	3	4	5=3+4
2011	Jumlah Investor	207	13	220
2012	Jumlah Investor	214	18	232
2013	Jumlah Investor	227	18	245
2014	Jumlah Investor	212	17	229
2015	Jumlah Investor	237	18	255

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya bahwa realisasi nilai investasi Tahun 2011 sebesar Rp. 1.375.250.921.417,00 dari 141 jumlah proyek dan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10.294.129.470.834,00 dari 219 jumlah proyek. Sedangkan Tahun 2015 berdasarkan persetujuan sebesar Rp. 3.486.851.231.878,00 dari 255 jumlah proyek yang akan dilaksanakan. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.69 berikut:

Tabel 2.69

Jumlah Investasi PMDN/PMA
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	2	3	4	5
2011	220	1.184.156.840.000,00	141	1.375.250.921.417,00
2012	232	1.910.958.104.857,50	145	1.997.835.880.437,00
2013	245	3.899.636.370.933,80	174	4.658.182.989.341,81
2014	229	3.467.670.977.783,80	219	10.294.129.470.834,00
2015	255	3.486.851.231.878,00	-	-

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

1.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya pada Perusahaan PMDN/PMA Tahun 2011 sebanyak 13.070 tenaga kerja, Tahun 2014 sebanyak 23.244 tenaga kerja, sedangkan Tahun 2015 masih belum tersedia jumlah tenaga kerja. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.70 berikut:

Tabel 2.70
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	13.070	12.287	12.856	23.244	-
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	220	232	245	229	255
3	Rasio daya serap Tenaga Kerja	59,41	52,96	52,47	101,50	

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.1 Persentase Koperasi Aktif

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 ada 247 koperasi aktif dari 330 koperasi yang ada atau sebesar 74,85%. Tahun 2014 ada 369 koperasi aktif dari 445 koperasi atau sebesar 82,92%. Sedangkan persentase koperasi aktif menurut Kecamatan tertinggi Tahun 2011 di Kecamatan Sungai Raya sebesar 36,84% dan terendah di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 2,02%. Tahun 2014 tertinggi di Kecamatan Sungai Raya sebesar 35,50% dan terendah di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 2,71%.

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.71 berikut:

Tabel 2.71

Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Koperasi Aktif	247	312	344	369	378
2	Jumlah Koperasi	330	381	421	445	454
3	Persentase Koperasi Aktif	74,85	81,89	81,71	82,92	83,26

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

12
f
f

Tabel 2.72

Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015*)		
		Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Batu Ampar	29	19	7,69	30	20	6,41	35	25	7,27	37	27	7,32	37	27	7,14
2	Terentang	11	8	3,24	15	12	3,85	17	14	4,07	18	15	4,07	18	15	3,97
3	Kubu	31	21	8,50	38	30	9,62	39	31	9,01	48	40	10,84	49	41	10,85
4	Teluk Pakedai	12	7	2,83	13	10	3,21	14	11	3,20	17	14	3,79	17	14	3,70
5	Sungai Kakap	46	33	13,36	53	40	12,82	53	41	11,92	53	42	11,38	53	42	11,11
6	Rasau Jaya	41	33	13,36	42	34	10,90	44	36	10,47	45	37	10,03	45	37	9,79
7	Sungai Raya	117	91	36,84	139	114	36,54	150	125	36,34	156	131	35,50	160	135	35,71
8	Sungai Ambawang	36	30	12,15	49	43	13,78	57	51	14,83	59	53	14,36	60	54	14,29
9	Kuala Mandor B	7	5	2,02	2	9	2,88	12	10	2,91	12	10	2,71	15	13	3,44
	Total	330	247	100	381	312	100	445	421	100	445	369	100	454	378	100

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Handwritten signature and date: 7/12

2.2 Jumlah UKM dan BPR/LKM

Jumlah UKM dan BPR/LKM Tahun 2011 sebanyak 145 terdiri dari 143 jumlah UKM sampai dan 2 jumlah BPR/LKM, Dan berdasarkan data sementara untuk Tahun 2015 Jumlah UKM dan BPR/LKM sebanyak 191 terdiri dari 183 jumlah UKM sampai dan 8 jumlah BPR/LKM. Jumlah UKM BPR/LKM Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73
Jumlah UKM BPR/LKM
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Seluruh UKM	143	148	168	174	183
2	Jumlah BPR/LKM	2	5	2	8	8
	Jumlah	145	153	170	182	191

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3. Kependudukan

3.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Kabupaten Kubu Raya adalah Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Mempawah (dulu Kabupaten Pontianak). Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.74 berikut:

Tabel 2.74

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun			
	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010
1	2	3	4	5
Sambas	-	-	0,35	0,9
Bengkayang	-	-	-	2,01
Landak	-	-	-	1,59
Pontianak	-	-	-	1,42
Sanggau	-	-	1,79	1,65
Ketapang	-	-	2,8	2,15
Sintang	-	-	2,08	1,62
Kapuas Hulu	-	-	1,41	2,00
Sekadau	-	-	-	1,22
Melawi	-	-	-	1,81
Kayong Utara	-	-	-	1,94
Kubu Raya	-	-	-	1,69
Kota Pontianak	-	-	1,82	1,81
Kota Singkawang	-	-	-	2,11
Kalimantan Barat	2,31	1,98	1,56	1,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

3.2 Pengelompokan Penduduk

3.2.1 Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.75 berikut:

Tabel 2.75

Proyeksi Penduduk Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kubu Raya

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	2015	311.473	297.129	608.602

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur. Proyeksi Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Umur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.76 berikut:

Tabel 2.76

Proyeksi Penduduk Tahun 2015 Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0-4	15.428	14.512	29.940
2	5-9	28.557	27.527	56.084
3	10-14	30.587	30.423	61.010
4	15-19	30.524	29.436	59.960
5	20-24	28.740	27.866	56.606
6	25-29	29.789	28.616	58.405
7	30-34	28.544	27.758	56.302
8	35-39	25.641	25.141	50.782
9	40-44	21.531	20.489	42.020
10	45-49	19.349	18.300	37.649
11	50-54	15.222	14.411	29.633
12	55-59	12.435	11.674	24.109
13	60-64	8.104	7.898	16.002
14	65-69	6.526	5.754	12.280
15	70-74	5.001	3.634	8.635
16	75+	5.597	3.691	9.288
	Jumlah	311.473	297.129	608.602

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari data diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan yaitu laki-laki sebanyak 311.473 jiwa dan perempuan sebanyak 297.129 jiwa. Kelompok umur terbesar ada pada rentang usia 10-14 Tahun yaitu laki-laki sebanyak 30.587 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 30.423 jiwa dan kelompok umur terkecil ada pada rentang umur 70-74 Tahun yaitu laki-laki sebanyak 5.001 jiwa dan perempuan sebanyak 3.635 jiwa.

3.2.2 Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk/Geografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya menurut Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebanyak 596.669 jiwa dengan luas wilayah seluas 872.537,01 Ha. Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.77

Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (Ha)	Kepadatan (%)
1	2	3	4	5
1	Batu Ampar	35.886	247.715,80	28,39
2	Terentang	12.673	103.052,52	11,81
3	Kubu	42.424	129.961,00	14,89
4	Teluk Pakedai	21.316	44.219,78	5,07
5	Sungai Kakap	121.231	58.958,48	6,76
6	Rasau Jaya	29.344	19.289,17	2,21
7	Sungai Raya	226.638	132.052,58	15,31
8	Sungai Ambawang	75.964	104.773,14	12,01
9	Kuala Mandor B	31.193	32.514,54	3,73
	Jumlah	596.669	872.537,01	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3.2.3 Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2014 menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya dijumlahkan perguruan tinggi dibagi dalam pendidikan untuk D.I/D.II, D.III, S1, S2 dan S3 sedangkan menurut tidak sekolah dibedakan menjadi tidak/belum sekolah dan yang tidak tamat SD Sederajat. Jumlah SD/MI sebanyak 182.547 Jiwa, SMP sebanyak 82.168 Jiwa, SMA sebanyak 84,548 Jiwa, Perguruan Tinggi sebanyak 17.532 Jiwa dan yang tidak mempunyai Ijazah SD sebanyak 229.874 Jiwa. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.78 berikut:

Tabel 2.78

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan							Tidak Sekolah			Jumlah
		SD/MI	SMP	SMA	D.I/D.II	D.III	S1	S2	S3	Tidak/Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Batu Ampar	11.534	4.739	2.608	152	85	134	7	2	8.538	8.087	35.886
2	Terentang	3.530	1.588	1.064	44	44	68	2	-	3.822	2.511	12.673
3	Kubu	14.174	5.780	3.393	177	108	194	20	7	10.330	7.741	42.424
4	Teluk Pakedai	6.005	2.158	1.444	53	58	97	5	1	6.625	4.870	21.316
5	Sungai Kakap	42.367	15.833	15.283	484	767	1.664	108	16	25.258	19.496	121.231
6	Rasau Jaya	8.208	5.019	4.980	241	211	490	13	9	6.409	3.764	29.344
7	Sungai Raya	62.888	32.640	43.448	1.579	2.942	5.548	419	16	46.559	30.599	226.638
8	Sungai Ambawang	23.666	11.044	10.080	319	345	862	58	3	15.861	13.726	75/964
9	Kuala Mandor B	10.175	3.367	1.793	61	24	90	4	1	9.332	6.346	31.193
	Jumlah	182.547	82.168	84.548	3.110	4.584	9.147	636	55	132.734	97.140	596.669

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

4. Ketenagakerjaan

4.1 Angkatan Kerja

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya diketahui penduduk menurut golongan umur tertinggi ada pada golongan umur 15 – 17 Tahun sebanyak 35.665 orang dengan 33.504 orang yang bekerja dan 2.161 yang mencari pekerjaan. Sedangkan golongan umur yg terendah ada pada golongan umur 60 - 64 Tahun sebanyak 9.601 dengan 9.018 orang bekerja dan 583 yang mencari pekerjaan. Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.79

Penduduk Angkatan Tahun 2014 Kerja Kabupaten Kubu Raya

No	Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	2	3	4	5
1.	15-19	33.504	2.161	35.665
2.	20-24	29.663	1.913	31.576
3.	25-29	28.940	1.866	30.806
4.	30-34	27.254	1.758	29.012
5.	35-39	24.901	1.606	26.507
6.	40-44	21.784	1.405	23.189
7.	45-49	17.743	1.144	18.887
8.	50-54	14.013	904	14.917
9.	55-59	10.193	657	10.850
10.	60-64	9.018	583	9.601
11.	65+	-	-	-
	Jumlah	217.013	13.997	231.010

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

W
n
f
t

4.2 Kesempatan Kerja

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha Tahun 2014 berdasarkan data wajib lapor perusahaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya keseluruhan jumlah tenaga kerja sebanyak 22.958 tenaga kerja dengan rincian 13.278 Pekerja Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 9.626 Pekerja Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), 54 Tenaga Kerja Asing (TKA). Penduduk Bekerja Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.80

Penduduk Bekerja Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Lapangan Usaha								Jumlah Tenaga Kerja			
		Pertanian, Perkebunan, Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	Jasa Kemasyarakatan	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	PKWT	PKWTT	TKA	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Batu Ampar	7	-	-	1	-	-	1	-	558	270	1	829
2	Terentang	2	1	-	-	-	-	-	-	1.061	1.781	2	2844
3	Kubu	3	1	-	-	-	-	-	-	413	1.932	2	2.347
4	Teluk Pakedai	2	2	-	-	-	-	-	-	1.880	1.607	18	3.505
5	Sungai Kakap	-	-	-	1	-	-	-	-	49	-	-	49
6	Rasau Jaya	3	-	-	-	-	-	-	-	24	317	-	341
7	Sungai Raya	15	32	3	66	9	40	23	5	8.131	3.209	19	11.359
8	Sungai Ambawang	5	6	1	6	-	-	-	-	1.162	510	12	1.684
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37	42	4	74	9	40	24	5	13.278	9.626	54	22.958

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya yang menduduki Jabatan Eselon II dari Tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 2 Orang, yang menduduki Jabatan Eselon III pada Tahun 2011 sebanyak 22 Orang dan Tahun 2015 sebanyak 26 Orang dan yang menduduki Eselon IV pada Tahun 2011 sebanyak 97 Orang dan 86 Orang pada Tahun 2015 sedangkan jumlah pekerja perempuan di Pemerintahan sebanyak 2,191 orang pada Tahun 2011 dan 2.697 Orang pada Tahun 2015. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 jumlah pekerja perempuan sebanyak 3.021 jiwa atau 72,52%, dan berdasarkan data sementara sampai dengan Bulan Mei 2015 jumlah pekerja perempuan sebanyak 6.247 jiwa atau 43,17%.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.81 berikut:

Tabel 2.81

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon II	2	2	2	2	2
2	Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon III	22	23	24	25	26
3	Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IV	97	66	79	72	86
4	Pekerja Perempuan Di Pemerintah	2.191	2.780	2.743	2.685	2.697
5	Jumlah Pekerja Perempuan	3.021	3.016	5.729	6.247	6.247
6	Persentase Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah	72,53	92,18	47,88	42,98	43,17

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
BP3AKB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

5.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Jumlah perempuan di Lembaga Swasta dari Tahun ke Tahun terjadi peningkatan begitu juga dengan jumlah pekerja perempuan. Pada Tahun 2012 terjadi penurunan jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Lembaga Swasta, dari 830 Orang menjadi 236 Orang di Tahun 2012 sehingga prosentase Tahun 2012 sebesar 7,82% lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 27,47%. Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 mengalami peningkatan jumlah yang cukup tinggi mencapai 3.550 Orang dengan prosentase sebesar 56,83% Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.82 berikut:

Tabel 2.82
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Tahun 2011s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Perempuan Yang Bekerja Di Lembaga Swasta	830	236	2.986	3.562	3.550
2	Jumlah Pekerja Perempuan	3.021	3.016	5.729	6.247	6.247
3	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga swasta	27,47	7,82	52,12	57,02	56,83

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya
Tahun 2015

5.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 dimana pada Tahun 2011 sebanyak 54 KDRT atau 0,05%, meningkat menjadi 78 KDRT di Tahun 2012 atau sebesar 0,06% dan menjadi 94 KDRT atau 0,08% pada Tahun 2013. Sedangkan untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak terdata Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Rasio KDRT Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.83 berikut:

Tabel 2.83

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah KDRT	54	78	94	-	-
2	Jumlah Rumah Tangga	117.510	120.025	121.660	-	-
	Rasio KDRT	0,05	0,06	0,08	-	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya
Tahun 2015

5.4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak didapati angka Pekerja anak usia 5-14 Tahun, akan tetapi Jumlah Pekerja Usia 15 Tahun keatas mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Tahun 2011 sebanyak 13,070 pekerja anak 15 Tahun keatas yang terdata dan meningkat menjadi 23.244 anak pada Tahun 2014. Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.84 berikut:

Tabel 2.84

Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	-	-	-	-	-
2	Jumlah Pekerja Usia 15 Tahun Keatas	13.070	12.287	12.856	23.244	*)
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	0%	0%	0%	0%	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya
Tahun 2015

6. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

6.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 sebesar 1,78 dari 189.553 jumlah anak dan 106.259 jumlah keluarga. Tahun 2014 sebesar 1,91 dari 217.903

jumlah anak dan 113.830 jumlah keluarga. Untuk Tahun 2015 sampai saat ini masih mengikuti jumlah pada Tahun 2014. Sedangkan jumlah anak per keluarga menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya rata-rata jumlah anak per keluarga tertinggi ada pada Kecamatan Sungai Kakap yaitu sebesar 2,4 dari 44.739 jumlah anak dan 16,581 jumlah keluarga, dan terendah adalah Kecamatan Terentang sebesar 1,1 dari 4.387 jumlah anak dan 3.879 jumlah keluarga.

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.85

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Anak	189.553	199.818	210.757	217.903	217.903
2	Jumlah Keluarga	106.259	108.955	109.200	113.830	113.830
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,78	1,83	1,93	1,91	1,91

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.86

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
1	2	3	4	5=3/4
1	Batu Ampar	14.180	10.740	1,3
2	Terentang	4.387	3.879	1,1
3	Kubu	15.064	10.669	1,4
4	Teluk Pakedai	8.041	6.619	1,2
5	Sungai Kakap	44.739	16.581	2,4
6	Rasau Jaya	10.048	6.848	1,4
7	Sungai Raya	79.862	34.650	2,3
8	Sungai Ambawang	30.584	15.117	2,1
9	Kuala Mandor B	10.998	6.679	1,6
	Jumlah	217.903	113.830	1,90

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya Tahun 2015

6.2 Rasio Akseptor KB

Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Kubu Raya mengalami trend turun naik dari Tahun ke Tahun. Tahun 2011 jumlah akseptor KB sebanyak 22.210 dari 85.582 jumlah pasangan usia subur atau ratio sebesar 0,25. Tahun 2012 jumlah akseptor KB berkurang menjadi 12.144 dari 92.430 usia pasangan subur atau ratio sebesar 0,13. Pada Tahun 2013 jumlah akseptor KB naik 12.144 menjadi 31,846 dari 92.625 pasangan usia subur atau ratio sebesar 0,34, akan tetapi pada Tahun 2014 turun menjadi 19.300 jumlah akseptor KB dari 96,199 atau ratio sebesar 0,20. Menurut Kecamatan, Kecamatan Sungai Raya memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar, 0,33 dari 9.334 jumlah akseptor KB dan 28.090 jumlah pasangan subur, sedangkan terendah di Kecamatan Teluk Pakedai dan Kuala Mandor B sebesar 0,07. Rasio Akseptor KB Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.87

Rasio Akseptor KB Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabuapten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Akseptor KB	22.210	12.144	31.846	19.300	19.300
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	85.582	92.430	92.199	96.199	96.199
	Rasio Akseptor KB	0,25	0,13	0,34	0,20	0,20

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.88

Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan
Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1	2	3	4	5=3/4
1	Batu Ampar	1.344	9.678	0,13
2	Terentang	443	4.734	0,09
3	Kubu	842	9.591	0,08
4	Teluk Pakedai	386	5.380	0,07
5	Sungai Kakap	3.312	14.043	0,23
6	Rasau Jaya	1.256	6.185	0,20
7	Sungai Raya	9.334	28.090	0,33
8	Sungai Ambawang	1.843	10.966	0,16
9	Kuala Mandor B	540	7.532	0,07
	Jumlah	19.300	96.199	0,20

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya Tahun 2015

7. Komunikasi Dan Informasi

7.1 Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Jaringan Komunikasi yang ada di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 6 jaringan pada Tahun 2011 dan 8 jaringan di Tahun 2015. Jaringan Komunikasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.89 berikut:

Tabel 2.89

Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2015
1	2	3	4
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	6	8
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	-	-
	Jumlah	6	8

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

7.2 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Wartel/Warnet yang ada di Kabupaten Kubu Raya masih tergolong sedikit hanya terdapat 50 warnet di Tahun 2011 dan menjadi 49 warnet di Tahun 2015. Sedangkan untuk Wartel tidak ada sama sekali. Menurut data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya di Tahun 2015, dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya hanya 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki warnet yaitu Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 9 Warnet, kecamatan Sungai Raya sebanyak 32 Warnet dan Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 8 Warnet. Rasio Warnet Per 1000 Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.90 berikut:

Tabel 2.90
Rasio Warnet Per 1000 Penduduk
Tahun 2011 s/dTahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	2011			2014		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Warnet	Rasio Warnet	Jumlah Penduduk	Jumlah Warnet	Rasio Warnet
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batu Ampar	33.660	-	-	35.886	-	-
2	Terentang	10.375	-	-	12.673	-	-
3	Kubu	36.929	-	-	42.424	-	-
4	Teluk Pakedai	19.064	-	-	21.316	-	-
5	Sungai Kakap	103.966	9	0,008657	121.231	9	0,007424
6	Rasau Jaya	24.084	-	-	29.344	-	-
7	Sungai Raya	191.929	32	0,016673	226.638	32	0,014119
8	Sungai Ambawang	67.207	9	0,013391	75.964	8	0,010531
9	Kuala Mandor B	24.121	-	-	31.193	-	-
	Jumlah	511.235	50	0,038721	596.669	49	0,032074

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

7.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Surat Kabar yang ada di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada perubahan.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 sebanyak 13 Surat Kabar dan Tahun 2015 sebanyak 13 Surat Kabar.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.91 berikut:

Tabel 2.91

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2015
1	2	3	4
1	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	5	5
2	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	8	8
	Jumlah	13	13

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

7.4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Kubu Raya tersaji pada Tabel 2.92 berikut:

Tabel 2.92

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2015
1	2	3	4
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	5	5
2	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	-	-
3	Jumlah Penyiaran TV Lokal	5	5
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	11	11
	Jumlah	21	21

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

8. Pertanahan

8.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Luas Lahan Bersertifikat

Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.93 berikut:

Tabel 2.93

Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Daratan	-	-	-	-	-
2.	Luas Tanah Bersertifikat HGB	-	-	-	-	-
3.	Luas Tanah Bersertifikat HGU	-	-	-	-	-
4.	Luas Tanah Bersertifikat HM	-	-	-	-	-
5.	Luas Tanah Bersertifikat HPL	-	-	-	-	-
6.	Total Luas Tanah Bersertifikat	-	-	-	-	-
7.	Prosentase HGB Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
8.	Prosentase HGU Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
9.	Prosentase HM Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
10.	Prosentase HGPL Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
11.	Prosentase Total Luas Lahan Bersertifikat	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kubu Raya untuk saat ini belum tersedia oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya maupun oleh Instansi teknis yang membidangi sertifikat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya.

9. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 bahwa jumlah LPM sebanyak jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya, yang artinya terdapat 1 LPM di setiap Desa. Tahun 2011 sebanyak 110 LPM, Tahun 2012 menjadi 117 LPM dan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 terdapat sebanyak 118 LPM. Jumlah LPM mengikuti jumlah Desa yang ada. Jumlah LPM Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.94 berikut:

Tabel 2.94

Jumlah LPM Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
		Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah LPM
1	2	3	3	3	3	3
1	Batu Ampar	14	15	15	15	15
2	Terentang	9	9	10	10	10
3	Kubu	20	20	20	20	20
4	Teluk Pakedai	14	14	14	14	14
5	Sungai Kakap	12	13	13	13	13
6	Rasau Jaya	6	6	9	9	9
7	Sungai Raya	17	20	20	20	20
8	Sungai Ambawang	13	15	15	15	15
9	Kuala Mandor B	5	5	5	5	5
	Jumlah	110	117	118	118	118

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kubu Raya Tahun 2015

10. Perpustakaan

10.1 Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.95 berikut:

Tabel 2.95

Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	18	40	53	64	71
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda	-	-	-	-	-
	Jumlah	18	40	53	64	71

Sumber: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari data Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya diatas bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya terus bertambah dari 18 jumlah perpustakaan menjadi 71 perpustakaan pada Tahun 2015.

10.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) Tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.96 berikut:

Tabel 2.96

Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	950	1.100	928	464	280
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Non Pemda	-	-	-	-	-
	Jumlah	950	1.100	928	464	280

Sumber: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari data Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya diatas bahwa jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya naik turun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013, akan tetapi jumlah pengunjung berkurang drastis pada Tahun 2014 yang hanya 464 pengunjung dibandingkan Tahun 2013 sebanyak 928 pengunjung. Data pengunjung perpustakaan harusnya beriringan dengan naiknya jumlah perpustakaan yang ada, akan tetapi di Kabupaten Kubu Raya meningkatnya jumlah perpustakaan tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Penurunan pengunjung tersebut dikarenakan adanya perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan pada setiap Kecamatan juga dikarenakan sejak Tahun 2013 Perpustakaan Daerah tidak menambah buku-buku baru.

11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

11.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan

perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.97 berikut:

Tabel 2.97

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	102	112	181	171	178
2.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,018572	0,019744	0,030616	0,028659	0,029247

Sumber: Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

11.2 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rasio Linmas Tahun 2011 sebesar 0,229964 dan Tahun 2014 0,211675, sedangkan Tahun 2015 rasio sebesar 0,207525. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.98 berikut:

Tabel 2.98

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Linmas	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
2.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
3.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	0,229964	0,22299	0,213634	0,211675	0,207525

Sumber: Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

11.3 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) Tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Keberadaan Poskamling tiap Desa di Kabupaten Kubu Raya memiliki 1 (satu) poskamling di tiap Desa. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.99 berikut:

cu
a
f
f

Tabel 2.99

Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015		
		Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Batu Ampar	14	14	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100
2	Terentang	9	9	100	9	9	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100
3	Kubu	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100
4	Teluk Pakedai	14	14	100	14	14	100	14	14	100	14	14	100	14	14	100
5	Sungai Kakap	12	12	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100
6	Rasau Jaya	6	6	100	6	6	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100
7	Sungai Raya	17	17	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100
8	Sungai Ambawang	13	13	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100
9	Kuala Mandor B	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100
	Jumlah	110	110	100	117	117	100	118	118	100	118	118	100	118	118	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

12. Pemuda dan Olahraga

12.1 Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan Tahun pengukuran.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Jumlah Organisasi yang terdata oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya yaitu jumlah organisasi pemuda hanya terdapat di Kecamatan Sungai Raya. Untuk Tahun 2011 tercatat sebanyak 23 jumlah organisasi pemuda dan Tahun 2015 tercatat sebanyak 24 jumlah organisasi pemuda. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.100 berikut:

Tabel 2.100
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	23	23	23	24	24
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	Jumlah	23	23	23	24	24

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

12.2 Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan Tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Jumlah organisasi pemuda keseluruhan Tahun 2011 sebanyak 28 organisasi pemuda, terbanyak di Kecamatan Sungai Raya dengan 8 organisasi pemuda, terendah Kecamatan Terentang dan Kubu masing-masing 1 organisasi pemuda. Sedangkan Tahun 2015 sebanyak 34 organisasi pemuda, terbanyak di Kecamatan Sungai Raya dengan 9 organisasi pemuda, terendah Kecamatan Terentang, Kubu, Sungai Kakap dan Kuala Mandor B masing-masing 2 organisasi pemuda.

Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.101 berikut:

Tabel 2.101
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batu Ampar	2	2	3	3	3
2	Terentang	1	2	2	2	2
3	Kubu	1	2	2	2	2
4	Teluk Pakedai	2	2	2	2	3
5	Sungai Kakap	2	2	2	3	2
6	Rasau Jaya	5	5	5	5	6
7	Sungai Raya	8	8	8	9	9
8	Sungai Ambawang	5	5	5	5	5
9	Kuala Mandor B	2	2	2	2	2
	Jumlah	28	30	31	33	34

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

12.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) Tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut data dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga kegiatan kepemudaan hanya terpusat di Kecamatan Sungai Raya, Tahun 2011 sebanyak 6 kegiatan dan Tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 ada 2 kegiatan kepemudaan. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.102 berikut:

Tabel 2.102
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	6	8	6	2	4
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	8	6	2	4

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

12.4 Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan

perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam periode 1 (satu) Tahun.

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jumlah kegiatan olahraga Tahun 2011 sebanyak 50 kegiatan olahraga dan sebanyak 73 pada Tahun 2015. Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.103 berikut:

Tabel 2.103
Jumlah Kegiatan Olahraga
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batu Ampar	5	5	6	8	8
2	Terentang	5	5	6	6	6
3	Kubu	5	5	6	7	7
4	Teluk Pakedai	5	5	6	7	8
5	Sungai Kakap	5	5	6	8	9
6	Rasau Jaya	5	5	6	7	8
7	Sungai Raya	10	10	11	11	12
8	Sungai Ambawang	5	5	7	7	8
9	Kuala Mandor B	5	5	7	7	7
	Jumlah	50	50	61	68	73

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2.1.5 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Rasio konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2010 sebesar 40.729.130, Tahun 2013 sebesar 56.633.240 dan Tahun 2014 belum dilakukan perhitungan secara rinci. Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.104 berikut:

Tabel 2.104
Angka Konsumsi RT Per Kapita
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Total Pengeluaran RT (dalam Triliun)	4,69	5,31	5,99	6,89	-
2.	Jumlah RT	115.151	117.510	120.025	121.660	-
	Rasio	40.729.130	45.187.644	49.906.270	56.633.240	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kubu Raya– PDRB Kab. Kubu Raya Menurut Penggunaan Tahun 2011-2014

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode Tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.105 berikut:

Tabel 2.105

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat

NO	Bulan	Indeks yang diterima petani (It)	Indeks yang dibayar petani (Ib)	NTP
1	2	3	4	5
1.	Januari	105,27	108,94	96,62
2.	Februari	105,29	109,45	96,21
3.	Maret	105,83	109,78	96,40
4.	April	106,64	109,93	97,01
5.	Mei	107,38	110,18	97,46
6.	Juni	107,91	111,19	97,05
7.	Juli	108,12	111,91	96,61
8.	Agustus	108,73	112,36	96,77
9.	September	108,72	112,47	96,67
10.	Oktober	109,50	112,45	96,81
11.	Nopember	108,86	114,17	95,91
12.	Desember	111,72	116,36	96,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - Statistik NTP
Prov. Kalbar 2014

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat terendah pada Tahun 2014 terjadi pada Nopember 2014 yaitu sebesar 95,91 poin karena penurunan harga bahan makanan hasil tanaman bahan makanan, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi tercatat di bulan Mei 2014 sebesar 97,46. Tetapi secara keseluruhan dari bulan Januari - Desember 2014 indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat rata-rata di bawah 100 yang artinya petani mengalami penurunan daya beli karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dari

kenaikan harga input produksi dan barang konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, fluktuasi harga komoditas konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal juga mempengaruhi tinggi rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP).

Indeks harga yang diterima petani di Kalimantan Barat pada 2014 mengalami trend kenaikan, It terendah terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu sebesar 105,27 poin dan It tertinggi pada bulan Desember 2014 yaitu sebesar 111,72 poin. Kenaikan It pada bulan Desember 2014 dibandingkan It bulan sebelumnya, yaitu dari 109,50 pada bulan Nopember 2014 menjadi 111,72 pada Desember 2014 dipengaruhi oleh kenaikan indeks Tanaman Padi dan Palawija sebesar 1,87 persen, indeks Hortikultura turun sebesar 1,17 persen, indeks Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) naik sebesar 3,18 persen, dan indeks Peternakan naik sebesar 1,97 persen, dan indeks Perikanan naik sebesar 2,15 persen. Perkembangan It selama bulan Januari - Desember 2014 berfluktuatif setiap bulannya. It terendah tercatat di bulan Januari 2014 yaitu sebesar 105,27 sedangkan It tertinggi tercatat pada bulan Desember 2014 yaitu sebesar 111,72. It Desember 2014 ($2012=100$) tercatat 111,72 berarti tingkat harga produk pertanian mengalami kenaikan harga secara rata-rata 1,11 kali dibandingkan dengan tingkat harga produk yang sama pada Tahun dasar 2012.

Sedangkan Indeks harga yang dibayar petani pada bulan Desember 2014 Ib Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 2,48 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya, yaitu dari 114,36 pada November 2014 menjadi 117,20 pada Desember 2014. Komponen pendukungnya yaitu indeks konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 2,72 persen dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) pertanian mengalami kenaikan sebesar 1,93 persen.

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Persentase konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Tahun 2010 sebesar 22,81%, Tahun 2013 sebesar 44,85%, dan untuk Tahun 2014 belum dilakukan perhitungan lebih rinci mengenai persentase konsumsi rumah tangga non pangan. Rasio Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.106

Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan (dalam Triliun)	1,07	1,30	2,68	3,09	
2.	Total Pengeluaran	4,69	5,31	5,99	6,89	
	Persentase	22,81	24,48	44,74	44,85	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kubu Raya- PDRB Kab. Kubu Raya Menurut Penggunaan Tahun 2011-2014

4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas & Air bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
7. Pengangkutan & Komunikasi
8. Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
9. Jasa-jasa

Produktivitas per sektor Kabupaten Kubu Raya di kelompokkan berdasarkan Horga Konstan dan Harga Berlaku. Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Konstan dan Produktivitas Per Sektor

Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Berlaku. disajikan pada Tabel 2.107
berikut:

R
R
R

Tabel 2.107

Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Konstan

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PDRB										
1.1	Pertanian	977	19,8	1.039	19,9	1.089	19,4	1.152	19,2	1.152	19,2
1.2	Pertambangan & Penggalian	20	0,4	22	0,4	24	0,4	26	0,4	26	0,4
1.3	Industri Pengolahan	2.265	46	2.366	45,1	2.458	43,8	2.576	43	2.576	43
1.4	Listrik, Gas & Air bersih	25	0,5	28	0,5	32	0,6	34	0,5	34	0,5
1.5	Konstruksi	54	1,1	65	1,2	74	1,3	82	1,4	82	1,4
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	816	16,5	853	16,2	909	16,2	952	15,9	952	15,9
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	438	8,9	514	9,8	620	11,1	728	12,2	728	12,2
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	107	2,2	117	2,2	130	2,3	143	2,4	143	2,4
1.9	Jasa-jasa	229	4,6	249	4,7	272	4,9	295	5	295	5
	PDRB ADHK	4.936	100	5.258	100	5.610	100	5.991	100	5.991	100
2	Jumlah Angkatan Kerja										
2.1	Angkatan Kerja	-		253.598		227.891		222.970		222.970	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 dan Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.108

Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Berlaku

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PDRB										
1.1	Pertanian	1.661	18,9	1.862	18,7	2.016	18	2.189	17,2	2.189	17,2
1.2	Pertambangan & Penggalian	45	0,5	52	0,5	63	0,6	71	0,6	71	0,6
1.3	Industri Pengolahan	4.160	47,3	4.549	45,6	4.958	44,3	5.566	43,7	5.566	43,7
1.4	Listrik, Gas & Air bersih	39	0,4	57	0,6	66	0,6	75	0,6	75	0,6
1.5	Konstruksi	137	1,6	285	2,9	360	3,2	457	3,6	457	3,6
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.539	17,5	1.697	17	1.922	17,2	2.105	16,5	2.105	16,5
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	686	7,8	849	8,5	1.040	9,3	1.338	10,5	1.338	10,5
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	187	2,1	234	2,3	281	2,5	332	2,6	332	2,6
1.9	Jasa-jasa	343	3,9	393	3,9	498	4,4	610	4,8	610	4,8
	PDRB ADHB	8.800	100	9.978	100	11.204	100	12.745	100	12.745	100
2	Jumlah Angkatan Kerja										
2.1	Angkatan Kerja			253.598		227.891		222.970		222.970	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 dan Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

2.1.5.2 Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

1. Aksesibilitas Daerah

1.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, Panjang jalan Tahun 2011 adalah 268,08 Km² dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.899 dengan ratio sebesar 7,08 dan Tahun 2014 panjang jalan 394,45 Km² dengan jumlah kendaraan sebanyak 2.916 dengan rasio 3,88. Untuk Tahun 2015 panjang jalan masih mengikuti panjang jalan Tahun 2014. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.109 berikut:

Tabel 2.109
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panjang Jalan	268,08	394,45	548,16	752,07	752,07
2.	Jumlah Kendaraan	1.899	2.463	3.093	2.916	3.169
	Rasio	7,08	6,24	5,64	3,88	4,21

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

1.2 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah baik jumlah orang maupun jumlah barang. Jumlah Orang di Tahun 2011 sebanyak 2.488.220 orang menjadi 2.777.482 orang pada

Tahun 2014 begitu juga dengan jumlah barang, di Tahun 2011 sebanyak 31.654,042 Ton menjadi 45.790.446 Ton pada Tahun 2014.

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.110 berikut:

Tabel 2.110

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Orang	Orang	2.488.220	2.647.263	2.589.210	2.774.482	25.325
2.	Jumlah Barang	Ton	31.654.042	43.077,693	45.790.446	45.790.466	*)

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

PL
n
f
f

1.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) Tahun. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.111 berikut:

Tabel 2.111

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dermaga	7.229	13.229	8.468	17.681	7.329	18.727	10.011	34.236	-	-
2.	Bandara	2.132.737	31.640.813	2.288.816	43.060.012	2.242.610	41.645.691	2.568.706	45.756.210	-	-
3.	Terminal	348.254	-	-	-	339.271	-	198.765	-	25.324	-
	Jumlah	2.488.220	31.654.042	2.647.263	43.077.693	2.589.210	41.664.418	2.777.482	45.790.446	25.324	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2. Penataan Wilayah

2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Bahwa sampai saat ini RTRW Kabupaten Kubu Raya Sehubungan dengan sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki rencana umum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun rencana rinci Rencana Rinci Kawasan Strategis (RDTR). Rasio Ketaatan Terhadap RTRW sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 belum dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. Kesesuaian terhadap RTRW selama ini menggunakan peraturan yang lebih tinggi sebagai landasan dalam menentukan kebijakan terkait penataan ruang.

Tabel 2.112

Rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

NO	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1.	Luas Wilayah	872.585,06
2.	Wilayah Produktif	-
3.	Wilayah Industri	-
4.	Wilayah Kebanjiran	-
5.	Wilayah Kekeringan	-
6.	Wilayah Perkotaan	-
7.	Luas Wilayah Budidaya	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya data Tahun 2013 publikasi Tahun 2014 dalam Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014 bahwa jenis BUMN/BUMD ada 3 (tiga) yaitu Perusahaan Listrik Negara Ranting Rasau Jaya, Perum Pegadaian Cabang Sungai Raya dan Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Kubu Raya sedangkan jenis Bank ada 3 (tiga) yaitu BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya, BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya dan BPR Dana Tirta Raya. Sedangkan jumlah pegawai pada PLN Ranting Rasau Jaya sebanyak 84 pegawai, Perum Pegadaian Cabang Sungai Raya sebanyak 13 pegawai, BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya sebanyak 32 pegawai, BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya sebanyak 25 pegawai, BPR Dana

Tirta Raya sebanyak 10 pegawai dan PDAM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 62 pegawai. Banyaknya pegawai BUMN/BUMD dan Bank menurut jenis kelamin di Kabupaten Kubu Raya dan banyaknya pegawai BUMN dan Bank menurut tingkat pendidikan di Kabupaten disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.113

Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kubu Raya

NO	Kantor/Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PLN Ranting Rasau Jaya *)	80	4	84
2	Perum Pegadaian Cab. Sungai Raya *)	6	7	13
3	BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya	21	11	32
4	BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya	12	13	25
5	BPR Dana Tirta Raya	4	6	10
6	PDAM Kabupaten Kubu Raya *)	56	6	62
	2013	179	47	226
	2012	182	44	226
	2011	175	44	219
	2010	119	31	150

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

*) Data Tahun 2012

Tabel 2.114

Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kubu Raya

NO	Kantor/Instansi	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI/DII	DIII/ DIV/S1	S2/S3	
1	PLN Ranting Rasau Jaya *)	-	1	78	-	5	-	84
2	Perum Pegadaian Cab. Sungai Raya *)	-	-	1	2	9	1	13
3	BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya	1	-	18	-	13	-	32
4	BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya	-	-	13	-	10	2	25
5	BPr Dana Tirta Raya	-	-	7	-	2	1	10
6	PDAM Kabupaten Kubu Raya *)	1	1	37	-	22	1	62
	2013	2	2	154	2	61	5	226
	2012	2	5	156	2	57	4	226
	2011	1	4	153	2	51	8	219
	2010	1	4	89	2	49	4	150

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

*) Data Tahun 2012

4. Ketersediaan Air Bersih

4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih(*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum(*drinking water*) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air minum utama dibedakan atas:

1. Air Kemasan Bermerek
2. Air Isi Ulang
3. Leding Meteran
4. Sumur Terlindungi
5. Sumur Tidak Terlindungi
6. Air Sungai
7. Air Hujan

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014, yaitu data Tahun 2013 yang dipublikasi pada Tahun 2014, persentase jumlah rumah tangga menurut jenis sumber air minum utama untuk air kemasan bermerek menunjukkan trend menurun dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 yaitu 3,49% pada Tahun 2010 menurun menjadi 1,08% pada Tahun 2013. Air isi ulang Tahun 2010 sebesar 4,75% naik menjadi 8,30% pada Tahun 2013. Berdasarkan sumber air minum dari leding meteran sebesar 0,64%, Air Sungai sebesar 0,33% pada Tahun 2010, dan sumber dari air hujan sebesar 91,43% pada Tahun 2010 menurun menjadi 90,62%.

Persentase jumlah Rumah Tangga menurut jenis sumber air minum utama Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2,115 berikut:

Tabel 2.115

Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Air Kemasan Bermerek	3,49	1,42	1,55	1,08
2.	Air Isi Ulang	4,75	5,71	6,72	8,30
3.	Leding Meteran	-	0,64	-	-
4.	Sumur Terlindungi	-	-	-	-
5.	Sumur Tak Terlindungi	-	-	-	-
6.	Air Sungai	0,33	1,55	0,12	-
7.	Air Hujan	91,43	90,68	91,61	90,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014
*) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013

5. Fasilitas Listrik dan Telepon

5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Dari data yang ada berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sungai Raya Wilayah Kalimantan Barat, data keseluruhan yang didapat dari kebutuhan beban tenaga listrik tidak bisa dihitung hanya berdasarkan kebutuhan beban tenaga listrik untuk Kabupaten Kubu Raya saja, akan tetapi juga mencakup kebutuhan beban tenaga listrik untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.116 berikut:

Tabel 2.116

Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kebutuhan	GWH	167,63	182,86	193,05	201,04	213,09
	- Rumah Tangga	GWH	94,06	102,61	108,33	112,81	119,57
	- Komersial	GWH	40,05	44,13	46,59	48,51	51,42
	- Publik	GWH	18,83	20,65	22,59	23,78	16,10
	- Industri	GWH	12,47	13,60	14,36	14,95	15,85
2.	Susut & Losses (T&D)	%	*	*	*	13	12
3.	Susut Pemakaian Sendiri						
	- Area Pontianak Isolated	%	3,34	0,88	0,38	0,27	0,18
	- Sektor Kapuas	%	2,07	1,82	1,64	1,33	1,34
4.	Total Susut & Losses	%	*	*	*	0,08	0,08
5.	Faktor Beban						
	- Area Pontianak Isolated	%	25,19	19,67	18,76	12,10	15,13
	- Sektor Kapuas	%	60,53	58,94	60,45	57,71	61,06
6.	Produksi						
	- Area Pontianak Isolated	GWH	5,41	6,41	7,43	9,90	6,39
	- Sektor Kapuas	GWH	1.154,23	1.229,31	1.406,18	1.494,33	631,18
	- 0.63 Sektor Kapuas	GWH	727,16	774,46	885,90	941,43	
7.	Beban Puncak						
	- Area Pontianak Isolated	MW	1,65	1,74	2,02	3,87	3,99
	- Sektor Kapuas	MW	182,50	184,18	191,00	252,11	256,70
	- 0.63 Sektor Kapuas	MW	114,98	116,03	120,33	158,83	
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)						
	- Area Pontianak Isolated	MW	3,09	5,08	4,44	9,62	9,62
	- Sektor Kapuas	MW	265,40	259,40	289,25	295,60	295,60
	- 0.63 Sektor Kapuas	MW	167,20	163,42	182,23	186,23	186,23
9.	Cummulated Committed Projects	MW	*	*	*	*	*
10.	TOTAL KAPASITAS SISTEM						
	- Area Pontianak Isolated	MW	2,48	4,42	2,61	5,72	5,73
	- Sektor Kapuas	MW	221,97	254,45	244,30	252,49	265,40
	- 0.63 Sektor Kapuas	MW	139,84	160,30	153,91	159,07	
11.	DAYA YANG DIBUTUHKAN*						
	- Area Pontianak Isolated	MW	*	*	*	*	*
	- Sektor Kapuas	MW	*	*	*	*	*

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2015

5.2 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik disajikan pada Tabel 2.117 berikut:

Tabel 2.117
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RT Dengan Daya 450 watt	114.030	119.188	122.198	124.532	124.961
2.	RT Dengan Daya 900 watt	50.084	65.758	73.712	80.631	83.877
3.	RT Dengan Daya 1.300 watt	27.499	34.101	36.494	38.036	38.230
4.	RT Dengan Daya 2.200 watt	10.577	13.107	15.090	16.081	16.259
5.	RT Dengan Daya > 2.200 watt	3.665	4.674	5.829	6.474	789
6.	Total Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Listrik	205.885	236.828	253.323	265.754	264.116
7.	Jumlah Rumah Tangga	242.821	251.146	254.222	362.084	250.862
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	84,78	94,30	99,65	73,40	105,28

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2015

Data diatas adalah data keseluruhan data yang ada di Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat karena Area Sungai Raya mencakupi untuk kapasitas Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya ditambah dengan Kota Singkawang. Untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya disuplay dari Rayon Pontianak Kota, Rayon, Sei Jawi, Rayon Siantan, Rayon Rasau Jaya dan Rayon Sungai Kakap. Adapun jumlah pelanggan secara keseluruhan adalah jumlah pelanggan yang berada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dikarenakan sebagian pelanggan Kabupaten Kubu Raya berasal dari Rayon Pontianak Kota, Rayon, Sei Jawi, dan Rayon Siantan yang merupakan Rayon yang berada di Kota Pontianak.

5.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.118 berikut:

Tabel 2.118
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penduduk Yang Memiliki HP	-	-	-	-	-
2.	Penduduk Yang Memiliki Telepon PSTN	-	-	-	-	-
3.	Total Jumlah Penduduk Yang Memiliki HP/Telepon (1+2)	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	596.669
5.	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (3/4)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon PSTN di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini tidak terdata pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari PT. Telekomunikasi Indonesia, begitu juga dengan jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon sehingga angka persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon tidak bisa dipersentasakan.

6. Ketersediaan Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan

menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusaha usaha restoran dan rumah makan adalah penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.119 berikut:

Tabel 2.119
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011		2015*)	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6
1.	Usaha Restoran Golongan Tertinggi	-	-	-	-
2.	Usaha Restoran Golongan Menengah	-	-	-	-
3.	Usaha Restoran Golongan Terendah	-	-	-	-
4.	Usaha Rumah Makan Kelas A	-	-	-	-
5.	Usaha Rumah Makan Kelas B	-	-	-	-
6.	Usaha Rumah Makan Kelas C	-	-	-	-
7.	Usaha Rumah Makan Kelas D	-	-	-	-
8.	Usaha Rumah Makan Kelas	-	-	-	-
9.	Jenis Usaha Restoran	-	-	-	-
10.	Jenis Usaha Rumah Makan	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

Jumlah Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kabupaten Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini tidak tersedia data dari SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga maupun dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

7. Ketersediaan Penginapan

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi

persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

b. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.120 berikut:

Tabel 2.120

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Kubu Raya

No	Jenis Penginapan/Hotel	2011			2014		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel Bintang 4	-	-	-	-	-	-
3.	Hotel Bintang 3	-	-	-	-	-	-
4.	Hotel Bintang 2	2	114	154	3	170	213
5.	Hotel Bintang 1	1	38	38	1	38	38
6.	Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan Penginapan Lainnya)	5	44	48	5	44	48
	Jumlah	8	196	240	9	252	299

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya pada Data Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2013 Publikasi Tahun 2014, jumlah Hotel yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada pada Tahun 2011 sebanyak 8 Hotel dengan 2 Hotel Bintang dengan 114 kamar dan 154 tempat tidur, 1 Hotel Bintang 1 dengan 38 kamar dan 38 tempat tidur dan 5 Penginapan dengan

44 kamar dan 48 tempat tidur. Sedangkan pada Tahun 2014 Hotel di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 9 Hotel dengan 3 Hotel Bintang dengan 170 kamar dan 213 tempat tidur, 1 Hotel Bintang 1 dengan 38 kamar dan 38 tempat tidur dan 5 Penginapan dengan 44 kamar dan 48 tempat tidur.

2.1.5.3 Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

1.1 Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada Tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) Tahun.

Angka kriminalitas di Kabupaten Kubu Raya mengalami trend menurun dari Tahun ke Tahun. Tahun 2011 jumlah angka kriminal sebanyak 580 jenis kriminal dan jenis tertinggi pada kasus pencurian sebanyak 382 kejadian, diikuti dengan kasus penganiayaan sebanyak 116 kejadian dan kasus penipuan sebanyak 67 kejadian. Begitu juga pada Tahun 2014 jumlah angka kriminalitas sebanyak 361 jenis kriminal dan jenis tertinggi pada kasus pencurian sebanyak 223 kejadian, diikuti dengan kasus penganiayaan sebanyak 79 kejadian dan kasus penipuan sebanyak 36 kejadian. Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.121 berikut:

Tabel 2.121

Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Kasus Narkoba	-	-	-	3	1
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	1	2	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	14	13	11	20	11
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	116	113	114	79	30
5.	Jumlah Kasus Pencurian	382	400	376	223	69
6.	Jumlah Kasus Penipuan	67	33	35	36	9

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total	580	560	538	361	120
9.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	608.602
	Angka Kriminalitas	0,00106	0,00099	0,00091	0,00061	0,00020

Sumber: Biro Operasi Polda Kalbar Tahun 2015

1.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) Tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Jumlah demonstrasi menurut data dari Biro Operasi Polda Kabar bahwa jumlah demonstrasi dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 pada bidang politik sebanyak 3 kejadian demonstrasi yaitu pada Tahun 2013 sebanyak 2 kejadian demonstrasi dan Tahun 2014 sebanyak 1 kejadian. pada bidang ekonomi terjadi 1 kejadian yaitu pada Tahun 2012, sedangkan pada kasus pemogokan kerja sebanyak 5 kejadian yaitu 2 kejadian Pada Tahun 2011, 1 kejadian pada Tahun 2012 dan sampai dengan Mei 2015 telah terjadi 2 kejadian kasus pemogokan kerja. Jumlah Demonstrasi Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.122 berikut:

Tabel 2.122

Jumlah Demonstrasi Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Politik	-	-	2	1	-
2	Ekonomi	-	1	-	-	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	2	1	-	-	2
	Jumlah	2	2	2	1	2

Sumber: Biro Operasi Polda Kalbar Tahun 2015

2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing

investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Lama Proses Perijinan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.123 berikut:

Tabel 2.123

Lama Proses Perijinan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maksimal Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	SIUP	3 Hari	9 Syarat	Tanpa Biaya
2.	TDP	3 Hari	8 Syarat	Tanpa Biaya
3.	IUI	3 Hari	12 Syarat	Tanpa Biaya
4.	TDI	5 Hari	7 Syarat	Tanpa Biaya
5.	IMB			
	- SKRK	17 Hari	6 Syarat	Tanpa Biaya
	- IMB Sementara	8 Hari	10 Syarat	Ada Biaya
	- IMB Tetap	7 Hari	7 Syarat	Ada Biaya
	- IMBPemutihan	17 Hari	7 Syarat	Ada Biaya
6.	HO	12 Hari	14 Syarat	Ada Biaya

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari data diatas diketahui lama proses mengurus SIUP di Kabupaten Kubu Raya adalah 3 hari, 9 persyaratan/dokumen dengan proses tidak dipungut biaya sesuai Permendagri Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011. Lama proses TDP selama 3 hari, 8 tpersyaratan/dokumen proses tidak dipungut biaya. Lamanya proses IUI selama 3 hari, 12 persyaratan/dokumen dan proses tidak dipungut biaya sesuai dengan Permerind Nomor 122/M-IND/PER/12/2014. Sedangkan untuk proses TDI selama 5 hari, 7 persyaratan/dokumen dan proses tidak dipungut biaya sesuai dengan Permerind Nomor 122/M-IND/PER/12/2014. Untuk IMB dibedakan dalam urusan SKRK, IMB Sementara, IMB Tetap dan IMB Pemutihan. Proses SKRK selama 17 hari, 6 persyaratan/dokumen dan proses tidak dipungut biaya. Proses IMB Sementara selama 8 hari, 10 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010. Proses IMB Tetap 7 hari, 7

persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010. Proses IMB Pemutihan selama 17 hari, 10 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010. Dan untuk proses HO selama 12 hari,14 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010.

3. Penggunaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. *Pajak Daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.124

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011 (Juta)	2012 (Juta)	2013 (Juta)	2014 (Juta)	2015*) (Juta)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Pajak	41.811	33.695	48.513	64.729	80.488
2.	Jumlah Insentif Pajak	-	40	182	205	155
3.	Jumlah Retribusi	5.570	6.835	11.575	25.180	7.081
4.	Jumlah Insentif Retribusi	959	1.096	1.968	2.489	-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

3.1 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.125

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	-	-	3	-	1
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	-	-	2	-	2
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	-	-	-	-	2

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tahun 2013 Peraturan Daerah terkait perijinan sebanyak 3 (tiga) Perda dan 2 (dua) Perda terkait lalu lintas barang dan jasa yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Tahun 2015 Peraturan Daerah terkait perijinan sebanyak 1 (satu) Perda, 2 (dua) Perda terkait lalu lintas Barang dan Jasa dan 2 (dua) Perda terkait ketenagakerjaan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

4. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa ~~swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan~~ demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia ~~atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu~~ memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah ~~peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih~~ sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa

secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju dengan pengertian diatas

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rekapitulasi Tipologi Desa yang bersumber dari Data Profil Desa Prodeskel Tahun 2013 dan Tahun 2014 terdapat 99 Desa dengan status Swadaya dan dan 19 Desa dengan Status Swakarya. Untuk Tahun 2015 masih mengacu pada Tahun 2014 karena sampai saat ini belum adanya pemekaran Desa di Kabupaten Kubu Raya. Jika mengacu pada klasifikasi diatas dapat dikatakan bahwa Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Akan tetapi harus tetap dikaji kembali berkenaan dengan status desa tersebut agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan. Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.126 berikut:

Tabel 2.126
Satatus Desa Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Desa Swadaya	-	-	99	99	99
2.	Jumlah Desa Swakarya	-	-	19	19	19
3.	Jumlah Desa Swasembada	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Desa	110	117	118	118	118

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya

2.1.5.4 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Kelulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat

pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio kelulusan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 tidak terdata dengan baik. Untuk Tahun 2014 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya jumlah kelulusan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3) sebanyak 5.983 orang dengan Rasio lulusan S1, 419 orang lulusan S2 dan 16 orang lulusan S3 dengan Rasio sebesar 0,0100. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.127 berikut:

Tabel 2.127
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Lulusan S1	-	-	-	5.548	*)
2.	Jumlah Lulusan S2	-	-	-	419	*)
3.	Jumlah Lulusan S3	-	-	-	16	*)
4.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	-	-	-	5.983	*)
5.	Jumlah Penduduk	549.216	566.394	591.197	596.669	*)
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	-	-	-	0,0100	*)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 Tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 Tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.128 berikut:

Tabel 2.128

Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	143.076	145.553	148.997	144.149	147.034
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	19.503	24.173	25.022	29.611	30.203
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2)	162.579	169.726	174.019	173.760	177.237
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	386.637	396.668	417.178	422.909	431.468
	Rasio Ketergantungan	0,42	0,43	0,42	0,41	0,41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia tidak produktif Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Tahun 2011 sebanyak 162,579 jiwa penduduk usai tidak produktif dengan rasio ketergantungan sebesar 0,42%. Tahun 2012 naik sebesar 7.147 jiwa menjadi 169.726 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 0,43% dan Tahun 2013 naik 4.293 jiwa menjadi 174.019 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 0,42%, sedangkan Tahun 2014 turun 259 jiwa menjadi 173.760 jiwa dengan rasio ketergantungan 0,41% dan pada Tahun 2015 naik 3.477 jiwa menjadi 177.237 jiwa.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu serta Tahun-Tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program Tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 terangkum sebanyak 29 sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Evalausi pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan pada Tabel berikut :

Handwritten signature in blue ink.

Tabel 2.129

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 dan Tahun 2014

2.2.1 Dinas Pendidikan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Tejangkau	Persentase penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf	%	91,81	97,86	108,97	93,45	97,88	104,74
		Persentase APK PAUD/TK	%	87,00	70,72	81,29	88,00	71,86	80,98
		Persentase APK SD/MI/Paket A	%	114,00	112,94	99,07	112,00	113,82	99,07
		Persentase APK SMP/MTs/Paket B	%	93,00	90,89	97,73	95,00	92,27	97,13
		Persentase APK SMA/SMK/MA/Paket C	%	65,00	79,80	122,70	80,00	84,65	105,81
		Persentase APM SD/MI/Paket A	%	99,75	98,45	98,70	99,80	98,74	98,94
		Persentase APM SMP/MTs/Paket B	%	80,00	75,71	94,64	85,00	81,37	95,73
		Persentase APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	62,96	65,54	104,10	69,25	75,11	108,46
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Sertifikasi	%	53,24	28,36	53,27	64,42	28,36	44,02
		Persentase Tenaga Pendidik yang telah S1	%	65,88	66,37	100,74	72,47	68,50	94,52
		Rata-rata Hasil Ujian SD/MI	%	6,77	6,23	92,02	7,00	6,12	87,43
		Rata-rata Hasil Ujian SMP/MTs	%	6,50	7,17	110,31	7,00	7,01	100,14
		Rata-rata Hasil Ujian SMA/MA	%	6,50	6,85	105,38	6,75	6,94	102,81
		Rata-rata Hasil Ujian SMK	%	6,20	6,62	106,77	6,50	6,72	103,38

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2013			2014		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Standar Akreditasi	%	29,28	29,28	109,99	32,21	32,21
		Persentase Sekolah yang Telah Mempunyai Komite Sekolah	%	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00
		Persentase Anggaran APBD untuk Pendidikan	%	19,50	40,89	209,69	20,00	39,40
		Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan	%	73,00	94,77	129,82	75,00	93,55
4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup waktu Lahir	%	66,60	66,37	99,65	66,70	66,83
		Prosentase Sarana dan Prasarana Kesehatan	%	75,00	70,00	93,33	80,00	65,00
		Tingkat Kecukupan Tenaga Kesehatan	%	70,00	45,00	64,29	75,00	52,00
		Angka Kematian Ibu Melahirkan/Bersalin per 100.000 Kelahiran Hidup	Ibu	125	45	36,00	102	117/ 100.000
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak dan Masyarakat Miskin	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi	24	4	16,67	23	4,7/ 1000
		Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Balita	35	1	2,86	32	0,4/ 1000
		Angka Gizi Buruk	%	2,5	2,5	100,00	2,5	3,5
		Jumlah Peserta Jamkesmas Bagi Keluarga Miskin	Peserta	100.000	209.498	209,50	100.000	226.380

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2014 sebesar Rp. 434.885.242.614,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 409.705.003.077,00 atau sebesar 94,21% dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 327.547.532.750,00 atau sebesar 97,84% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 82.157.470.327,00 atau sebesar 82,07%.
- Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 sebesar Rp. 489.002.955.943,00 atau naik sebesar 12,44% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun 2015 Dinas Pendidikan digabung dengan Kebudayaan sehingga berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 489.002.955.943,00 atau naik sebesar 12,44% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.2 Dinas Kesehatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pengadaan Obat Generik	%	85,00	94,77	111,49	90,00	93,55	103,94
		Persentase Penulisan Resep Obat Generik	%	85,00	31,58	37,15	90,00	94,23	104,70
		Persentase Obat Askes	%	50,00	-	0,00	60,00	93,55	155,92
		Prosentase Pengadaan Alat Kesehatan	%	85,00	-	0,00	90,00	-	0,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Informal	%	85,00	71,49	84,11	90,00	75,30	83,67
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut Dan Usia Lanjut	%	60,00	46,16	76,93	70,00	48,00	68,57
		Pelayanan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan Umum	%	30,00	35,34	117,80	30,00	36,50	121,67
		Cakupan Rawat Jalan	%	70,00	87,90	125,57	80,00	87,90	109,88
		Cakupan Rawat Inap	%	4,00	-	0,00	5,00	-	0,00
		Tercapainya Puskesmas Yang Bermutu	Puskesmas	1,00	1	100,00	1,00	1,00	100,00
		Prosentase Daerah Bencana Dan Pengungsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit	%	100,00	-	0,00	100,00	-	0,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	95,00	100,00	105,26	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat	%	95,00	100,00	105,26	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Yang Harus Di Berikan Sarana Kesehatan (RS) Di Kabupaten/Kota	%	95,00	100,00	105,26	100,00	100,00	100,00
		Pelayanan Laboratorium Klinik Masyarakat	%	50,00	30,00	60,00	55,00	100,00	181,82
		Tingkat Kecukupan Tenaga Kesehatan	%	75,00	20,00	26,67	90,00	-	0,00
		Persentase Kelulusan Peserta Diklat Kesehatan	%	35,00	15,00	42,86	40,00	-	0,00
		Tersusunnya Data Perencanaan Kesehatan	%	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Di UPT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Kecukupan APBD Untuk Pengadaan Obat	%	85,00	85,00	100,00	90,00	97,28	108,09
		Tingkat Keamanan Masyarakat Untuk Mengonsumsi Obat Dan	Buah	60,00	15	25,00	70,00	30,00	42,86
		Jumlah Apotek Dan Toko Obat	Kali	50,00	41,00	82,00	60,00	46,00	76,67

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Penyuluhan Tentang Obat	%	10,00	1,00	10,00	12,00	7,00	58,33
		Persentase Rumah Tangga Sehat	%	65,00	78,06	120,09	70,00	78,06	111,51
		Persentase Posyandu Purnama	%	75,00	6,18	8,24	80,00	6,18	7,73
		Prosentase Sekolah Yang Mempunyai UKS	%	70,00	22,64	32,34	80,00	22,64	28,30
		Prosentasi Poskestren	%	12,00	10,45	87,08	15,00	10,45	69,67
		Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Remaja Masjid	Kali	4,00	-	0,00	5,00	-	0,00
		Kegiatan Pembinaan Saka Bakti Husada	Kali	4,00	4,00	100,00	5,00	4,00	80,00
		Jumlah Kader Posyandu Terlatih	Orang	70,00	100,00	142,86	70,00	100,00	142,86
		Jumlah Kader Poskesdes Terlatih	Orang	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00
		Jumlah Kecamatan Yang Akan Di Berikan Media Informasi Kesehatan	Kec	3,00	9,00	300,00	3,00	9,00	300,00
		Upaya Penyuluhan P3 NAPZA Oleh Petugas Kesehatan	%	30,00	30,00	100,00	50,00	30,00	60,00
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	80,00	96,58	120,73	80,00	95,58	119,48
		Prosentase Masyarakat Yang Mendapat Informasi Obat, Napza, HIV AIDS, Makanan Dan Minuman (Tentang Kesehatan)	%	25,00	10,00	40,00	30,00	10,00	33,33

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tingkat Kelengkapan Data Dalam SPM Kesehatan	%	97,00	80,00	82,47	99,00	100,00	101,01
		Kelancaran Pengumpulan Data Untuk Pemutahiran	%	93,00	80,00	86,02	95,00	100,00	105,26
		Tingkat Kelengkapan Data Untuk Menghitung Kinerja	%	97,00	75,00	77,32	98,00	100,00	102,04
		Cakupan Keluarga Yang Menggunakan Air Bersih	%	69,00	69,03	100,04	72,00	40,54	56,31
		Cakupan Air Bersih Yang Memenuhi Kualitas Bakteriologis	%	80,00	64,26	80,33	85,00	37,50	44,12
		Cakupan Air Minum Yang Memenuhi Kualitas Bakteriologis	%	80,00	100,00	125,00	85,00	100,00	117,65
		Cakupan Keluarga Menggunakan Jamban Sehat	%	67,00	61,74	92,15	70,00	74,50	106,43
		Cakupan Keluarga Yang Memenuhi Persyaratan Rumah Sehat	%	70,00	60,66	86,66	75,00	73,57	98,09
		Cakupan Sekolah Yang Sehat	%	80,00	95,81	119,76	85,00	72,97	85,85
		Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	%	79,70	84,66	106,22	80,40	65,60	81,59
		Cakupan Pondok Pesantren Sehat	%	67,00	66,67	99,51	70,00	57,14	81,63
		Cakupan Institusi Yang Di Bina	%	85,00	64,29	75,64	90,00	64,29	71,43

RP 712

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Restoran Dan Rumah Makan Yang Layak Hygiene	%	75,00	83,82	111,76	82,00	78,60	95,85
		Cakupan Jasa Boga Yang Hygiene	%	72,00	83,82	116,42	75,00	72,80	97,07
		Cakupan Centra Jajanan Layak Hygiene	%	69,00	70,59	102,30	73,00	63,16	86,52
		Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Layak Hygiene	%	77,00	84,66	109,95	81,00	60,96	75,26
		Cakupan Rumah Atau Bangunan Bebas Jentik Nyamuk	%	80,00	49,57	61,96	85,00	50,74	59,69
		Persentase Pengawasan Dan Pengendalian Vektor Penyakit Ditempat Pembuangan Sampah (TPS/TPA)	%	95,00	100,00	105,26	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Syarat Hygiene Sanitasi	%	85,00	77,34	90,99	85,00	77,34	90,99
		Cakupan AMDAL Yang Memenuhi Kajian Kesehatan Masyarakat	%	89,00	75,78	85,15	92,00	75,78	82,37
		Persentase Industri Yang Memenuhi Persyaratan Kualitas Lingkungan	%	89,00	75,78	85,15	90,00	75,78	84,20
		Persentase Kecamatan Dengan Kawasan Sehat	%	55,00	55,00	100,00	65,00	33,33	51,28

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana	%	100,00	97,84	0,3	100,00	-	0,00
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyidikan Epidemiologi <24 Jam	%	95,00	100,00	105,26	100,00	100,00	100,00
		Calon Jama'ah Haji Di Periksa Kesehatan Pada Tingkat Pertama Dan Kedua	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Di Tangani <24 Jam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	88,89	88,89
		AFP Rate Per Penduduk < 15 Tahun	100.000	2,00	2,29	114,50	>2	100,00	5.000
		Tetanus Neonatorium (TN) Rate Per Kelahiran Hidup	1.000	<1	0,67	67,00	<1	0,08	8,00
		Campak Rate Per Penduduk	1.000	< 1	< 1	100,00	< 1	100,00	100,00
		Penemuan Kasus TBC BTA+ (CDR)	%	75,00	39,21	52,28	> 80	33,89	42,36
		Persentase Kesembuhan Penderita TBC BTA+	%	85,00	35,32	41,55	> 90	94,01	104,46
		Persen Malaria Yang Di Obati	%	100,00	97,14	97,14	100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penderita Kusta Yang Selesai Berobat	%	90,00	20,00	22,22	90,00	86,67	96,30
		Persentase Penemuan Dan Pengobatan Pneumonia Balita Sesuai Standar	%	80,00	100,00	125,00	85,00	100,00	117,65
		Persentase Darah Donor Diskrining Terhadap HIV/AIDS	%	100,00	-	0,00	100,00	-	0,00
		Persentase Klien Yang Mendapatkan Pelayanan HIV / AIDS Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Infeksi Menular Seksual (IMS) Yang Di Temu Kan Dan Di Obati Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penderita DBD Yang Ditemukan Dan Di Tangani Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Insident Rate DBD Per 1.000 Penduduk	100.000	17,00	0,24	1,41	<15	1,12	7,47
		Angka Kematian DBD (CFR)	%	1,00	-	0,00	<1	1,16	116,00
		Persentase Penderita Diare Balita Yang Ditemukan Dan Di Tangani Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Kematian Diare (CFR) Per 10.000 Penduduk	10.000	1,00	-	0,00	<1	-	0,00
		Cakupan Pengobatan Massal Dan Tata Laksana Kasus Filariasis Sesuai Standar	%	100,00	72,00	72,00	100,00	65,71	65,71

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecacangan Rate Per 1.000 Pada Anak Sekolah Dasar	1.000	12,00	0,02	0,17	10,00	20,41	204,10
		Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Penular / Vektor	%	95,00	49,17	51,76	95,00	57,89	60,94
		Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	43,00	43,00	100,00	61,86	61,86
		Cakupan Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	%	99,00	95,00	95,96	100,00	95,00	95,00
		Cakupan Pelayanan Imunisasi TT Wanita Usia Subur	%	90,00	80,00	88,89	95,00	32,91	34,64
		Cakupan Pelayanan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Pencegahan Dan Penanggulangan PTM	%	45,00	45,00	100,00	50,00	80,00	160,00
		Cakupan Pelayanan Pengobatan Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Warga Transmigrasi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	100,00	20,00	20,00	100,00	70,00	70,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dalam Situasi Khusus	%	95,00	10,00	10,53	100,00	60,00	60,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Hyperbarik	%	95,00	10,00	10,53	100,00	-	0,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Buah	1,00	1,00	100,00	1,00	-	0,00
		Pembangunan Baru Puskesmas Non Rawat Inap	Buah	1,00	1,00	100,00	1,00	-	0,00
		Jumlah Puskesmas Non Perawatan Menjadi Rawat Inap	Buah	2,00	2,00	100,00	2,00	-	0,00
		Jumlah Pustu Yang Di Bangun	Buah	5,00	2,00	40,00	5,00	2,00	40,00
		Jumlah Poskesdes Yang Di Bangun	Buah	15,00	4,00	26,67	15,00	7,00	46,67
		Jumlah Kecamatan Yang Telah Mempunyai Puskesmas Dengan Standar	Buah	16,00	19,00	118,75	18,00	19,00	105,56
		Prosentase Puskesmas Yang Sesuai Dengan Standar	%	75,00	60,00	80,00	80,00	60,00	75,00
		Prosentase Makanan Hasil Industri Yang Diperiksa	%	70,00	100,00	142,86	80,00	50,00	62,50
		Tingkat Pengendalian Bahan Makanan Terlarang	%	95,00	100,00	105,26	97,00	50,00	51,55
		Prosentase TPM Yang Diperiksa	%	80,00	-	0,00	90,00	-	0,00
		Prosentase TTU Yang Diperiksa	%	75,00	-	0,00	85,00	-	0,00
		Prosentase Sampel Yang Diambil Saat KLB & Wabah	%	100,00	-	0,00	100,00	-	0,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu Anak Dan Masyarakat	Prosentase Penduduk Miskin Yang Mendapat JAMKESMAS	%	80,00	-	0,00	80,00	-	0,00
		Menurunnya Jenis Penyakit Yang Diderita Masyarakat	%	89,00	-	0,00	90,00	-	0,00
		Kegiatan Pengobatan Massal Kepada Masyarakat	Kali	612,00	-	0,00	816,00	-	0,00
		Prosentase Kecamatan Yang Telah Terjangkau Pengobatan Massal	%	90,00	-	0,00	-	-	-
		Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Balita Di Timbang (D/S)	%	90,00	36,50	40,56	100,00	37,93	37,93
		Prosentase Desa Dengan Garam Yodium Baik	%	100,00	98,57	98,57	95,00	103,76	109,22
		Persentase Balita Yang Naik Berat Badannya (N/D)	%	85,00	85,60	100,71	100,00	85,23	85,23
		Persentase Balita Bawah Garis Merah	%	10,00	1,12	11,20	10,00	1,12	11,20
		Cakupan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A 2 Kali PerTahun	%	100,00	71,48	71,48	100,00	79,49	79,49
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Bayi Gizi Kurang Dari Keluarga Miskin	%	100,00	47,76	47,76	100,00	100,00	100,00

Handwritten signature/initials

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Sesuai Dengan Standar Tata Laksana Gizi Buruk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Bayi Yang Mendapat ASI-Eklusif	%	70,00	46,85	66,93	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Fe	%	90,00	81,94	91,04	80,00	68,88	86,10
		Prosentase Balita Gizi Buruk	%	2,50	2,50	100,00	90,00	85,67	95,19
		Prosentase Desa Dengan Beryodium Baik	%	78,00	-	0,00	2,50	2,50	100,00
		Kecamatan Bebas Rawan Gizi	%	90,00	88,89	98,77	80,00	78,00	97,50
		Cakupan Wanita Usia Subur Yang Mendapat Kapsul Yodium	%	90,00	-	0,00	90,00	-	0,00
		Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi	23,50	3,68	15,66	23,00	-	0,00
		Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Balita	35,00	0,42	1,20	32,00	-	0,00
		Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100,000 Kelahiran Hidup	Ibu	125,00	44,51	35,61	102,00	100,00	98,04
		Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	66,60	-	0,00	66,70	-	0,00
		Cakupan Kunjungan Bumil K4	%	94,00	90,07	95,82	95,00	86,77	91,34
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90,00	83,12	92,36	90,00	78,85	87,61

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bumil Resiko Tinggi Yang Di Tangani	%	79,00	82,31	104,19	80,00	82,02	102,53
		Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Kepada Bblr Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu Oleh Tenaga Kesehatan/Bidan Sesuai Standar	%	97,00	8,31	8,57	100,00	8,31	8,31
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	95,00	80,16	84,38	95,00	84,20	88,63
		Bayi Baru Lahir Dengan Berat Badan Lahir Rendah Yang Di Tangani	%	100,00	8,31	8,31	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita Dan Pra Sekolah Oleh Tenaga Kesehatan 2x PerTahun	%	95,00	47,07	49,55	95,00	26,24	27,62
		Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Di Satu Wilayah Kerja Sesuai Standar	%	100,00	43,88	43,88	100,00	62,86	62,86
		Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Di Tangani	%	70,00	66,79	95,41	80,00	57,92	72,40
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	80,00	76,87	96,09	90,00	82,25	91,39
		Cakupan Neonatus Dan Komplikasi Ditangani	%	95,00	27,20	28,63	95,00	22,69	23,88

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	95,00	39,84	41,94	95,00	50,62	53,28
		Cakupan Peserta KB Aktif	%	85,00	52,81	62,13	90,00	38,04	42,27
		Persentase Penyusunan Profil Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Pemasangan Jaringan Intra Dan Internet Dinas Kesehatan Dan UPT	%	90,00	-	0,00	100,00	-	0,00
		Dokumen Arah Pembangunan Kesehatan Kabupaten	Dokumen	1,00	-	0,00	1,00	-	0,00
		Gambaran Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Kubu Raya	%	100,00	-	0,00	100,00	-	0,00
		Meningkatnya Pengetahuan Dan Kemampuan Tenaga Kesehatan Di Bidang Informasi Dan Teknologi Kesehatan	%	95,00	80,00	84,21	100,00	80,00	80,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2014 sebesar Rp. 69.902.903.630,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.512.150.574,00 atau sebesar 92,29%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 30.401.301.365 atau sebesar 99,89% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 34.110.849.209,00 atau sebesar 86,43%.

- Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2015 sebesar Rp. 68.532.571.542,00 atau menurun sebesar 1,96% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.3 Dinas Bina Marga dan Pengairan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Wilayah, Transportasi Darat, Dan Sungai	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	36,563	170,377	465,98	197,900	209,04	105,63
		Pembangunan Jembatan	M	273,60	638,40	233,33	817,40	817,40	100,00
		Pemeliharaan Jalan	Km	30,00	33,95	113,17	50,08	53,72	107,27
		Pemeliharaan Jembatan	M	360,00	362,00	100,56	640,00	677,00	105,78
		Pembangunan Turap	M	640,00	642,00	100,31	940,00	956,00	101,70
		Panjang Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	M	18.700	18.700	100,00	47.400	47.400	100,00
2	Meningkatnya Produktivitas Dan Kualitas Produk Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan, Dan Perikanan, Keanekaragaman Hayati, Kehutanan Dan Pertambangan Serta ESDM	Bangunan Pelengkap Dan Pintu Air Struktur Beton Bertulang	Unit	41,00	41,00	100,00	65,00	65,00	100,00
		Panjang Normalisasi Saluran Sungai Terhadap Panjang Sungai	Km	245,00	309,900	126,49	579,900	579,900	100,00
		Jumlah Rehab Bangunan Pintu Air Terhadap Pintu Air Yang Ada	Unit	6,00	30,00	500,00	29,00	31,00	100,90
		Panjang Saluran Tanah/Galian Saluran Dengan Alat Berat Exavator	Km	13,78	13,78	100,00	21,10	21,95	104,03

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kualitas Saluran Dan Pintu Air - Jumlah Pintu Klep Yang Direhab - Saluran Pasangan - Saluran Pembuang	Unit M Km	14,00 - 62,375	14,00 - 62,375	100,00 - 100,00	16,00 460,00 94,525	16,00 460,00 94,525	100,00 100,00 100,00
		Terlaksananya Monev Dan Laporan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir	Lokasi	-	-	-	9 Kec	9 Kec	100,00
		Panjang Pembangunan Pengendali Banjir Terhadap Daerah Pengendali	Km	1.200	1.200	100,00	620,00	1.820	293,55
		Panjang Pantai Yang Terjaga Abrasi	Km	16,70	16,70	100,00	24,58	24,78	100,81
		Panjang Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Yang Telah Direhabilitasi	Km	73,00	73,00	100,00	133,00	133,0	100,00
		Panjang Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Yang Telah Direhabilitasi	M	222,50	222,00	99,78	365,50	365,50	99,78
		Pembuatan Badan Jalan Depan Kantor Bupati	Km	-	-	-	15,00	15,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 sebesar Rp. 106.438.419.888,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.941.583.222,00 atau sebesar 96,71% dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.668.076.436,00 atau sebesar 98,95% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 100.273.506.786,00 atau sebesar 96,66%.

- Pagu Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 sebesar Rp. 183.206.524.134,00 atau naik sebesar 72,12% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.4 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Kinerja Dan Profesionalisme Aparatur SKPD, Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Penyelenggaraan Administrasi Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Perencanaan Dan Pelaporan Program Serta Kegiatan, Dan Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan	Presentase Satker Yang Telah Memiliki Gedung Sendiri Terpeliharanya Kebutuhan Sarana Perkantoran	% Unit	47,50	47,50	100,00	57,50	55,00	95,65
				5,00	4,00	80,00	5,00	5,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Penyediaan Kebutuhan Air Untuk Masyarakat, Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Pemeliharaan Kebersihan, Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat, Perbaikan Perumahan Tidak Layak Huni, Serta Pemeliharaan Areal Pemakaman	Peningkatan Kualitas Air Dan Air Baku	Lokasi	7,00	7,00	100,00	5,00	4,00	80,00
		Peningkatan Kualitas Air Bersih	Desa	7,00	7,00	100,00	4,00	4,00	100,00
		Bertambahnya PAH Yang Telah Ditingkatkan/ Dibangun	Lokasi	27,00	27,00	100,00	37,00	37,00	100,00
		Meningkatnya Kualitas Kebersihan	%	100,00	99,39	99,39	100,00	92,01	92,01
		Meningkatnya Keindahan Kota	%	100,00	99,08	99,08	100,00	78,51	78,51
		Jumlah Perencanaan Kawasan	Dokumen	6,00	6,00	100,00	4,00	4,00	100,00
		Persentase Tercapainya Kegiatan Pengendalian Dan Laporan Pemanfaatan Ruang	%	100,00	90,73	90,73	100,00	77,59	77,59
		Jumlah MCK Yang Terbangun	Unit	6,00	6,00	100,00	9,00	9,00	100,00
		Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	%	100,00	73,60	73,60	100,00	88,81	88,81
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Penataan Areal Pemakaman	Lokasi	9,00	9,00	100,00	15,00	15,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Jalan Lingkungan, Jembatan Lingkungan, Serta Infrastruktur Drainase Berikut Pemeliharaannya	Terpeliharanya Jalan Lingkungan	Ruas	5,92	5,92	100,00	10,11	9,84	97,33
		Terpeliharanya Jembatan Lingkungan	Unit	25,00	25,00	100,00	16,00	15,00	93,75
		Peningkatan/Pembangunan Jembatan	Unit	129,00	129,00	100,00	197,00	197,00	100,00
		Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan	Km	154,56	153,71	99,45	206,03	203,91	98,97
		Bertambahnya Saluran Drainase Yang Terbangun	Saluran	46,00	45,00	97,83	81,00	81,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2014 sebesar Rp. 193.225.157.960,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.941.583.222,00 atau sebesar 96,71%. Dengan Rician Belanja Tidak sebesar Rp. 2.178.988.168,00 atau sebesar 94,49% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 167.611.408.083,00 atau sebesar 87,75%.
- Pagu Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 sebesar Rp. 169.556.332.650,00 atau berkurang sebesar 12,25% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Hasil Penelitian Yang Berguna Bagi Pengembangan Dan Pembangunan Daerah	Studi Kelayakan	Kajian	-	-	-	1,00	1,00	100,00
2	Terwujudnya Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dan Hasil Pembangunan	Buku Kabupaten Dalam Angka Tahun 2014 (1 KDA dan 9 KCDA) Koordinasi Forum Data Daerah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Dokumen RKPD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, DAK dan TP Pengendalian dan Evaluasi RKPD Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja pembangunan Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi Dokumen KUA dan PPAS	Buku % Sistem Sistem Dokumen Dokumen Sistem % Dokumen	1,00 - - - 3,00 1,00 - - 1,00	1,00 - - - 3,00 1,00 - - 1,00	100,00 - - - 100,00 100,00 - - 100,00	1,00 100 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 100 1,00	1,00 76,43 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 75,50 1,00	100,00 76,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,50 100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	Ket	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Bagi Pembangunan Dan Pembangunan Daerah	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Kajian	-	-	-	1,00	1,00	100,00
4	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional Pemerintah Kab. Kubu Raya dengan pendekatan SIG	Dokumen Kajian	- -	- -	- -	1,00 1,00	1,00 1,00	100,00 100,00
5	Terwujudnya Pengembangan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Menuju Pemberdayaan Masyarakat Dengan Mengedepankan Kepentingan Masyarakat	Data Base Realisasi Investasi PDRB Kab. Kubu Raya Fasilitasi Perencanaan Partisipatif untuk menunjang kegiatan PNPB Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Dokumen Buku % % %	- 1,00 - - -	- 1,00 - - -	- 100,00 - - -	1,00 1,00 100,00 100,00 100,00	1,00 1,00 41,54 66,61 71,19	100,00 100,00 41,54 66,61 71,19

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Terbangunnya Sistem Perencanaan Infrastruktur Berbasis Spasial Yang Terintegrasi, Berkelanjutan, Dan Berwawasan Lingkungan	Sistem Data Tematik Spasial Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Terpadu	Kajian	-	-	-	1,00	1,00	100,00
		Perencanaan Infrastruktur Kab. Kubu Raya	Dokumen	-	-	-	1,00	1,00	100,00
		Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Fisik Dan Prasarana	%	-	-	-	100	84,71	84,71
		Fasilitasi PAMSIMAS	Desa	-	-	-	5,00	5,00	100,00
		Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Dokumen	-	-	-	1,00	1,00	100,00
		KLHS Kabupaten Kubu Raya	Dokumen	-	-	-	1,00	1,00	100,00
		Koordinasi Dan Fasilitasi BKPRD	%	-	-	-	100	80,09	80,09
		Koordinasi Dan Fasilitasi Penetapan Peraturan Daerah RTRW	Perda	1,00	-	0,00	1,00	-	0,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Bappeda Tahun 2014 sebesar Rp. 6.679.605.187,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.683.916.497,00 atau sebesar 85,87%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.252.492.059,00 atau sebesar 98,07% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.458.424.438,00 atau sebesar 78,42%.
- Pagu Anggaran Bappeda Tahun 2015 sebesar Rp. 6.747.973.891,00 atau naik sebesar 1,02% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.6 Dinas Perhubungan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah, Transportasi Daerat, Sungai, Penyeberangan dan Laut Secara Memadai Dengan Dukungan Pos Yang Mantap	3	4						
		Tersedianya Plang Papan Nama Jalan	Buah	25,00	25,00	100,00	-	-	-
		Tersedianya Fasilitas Perizinan di Bidang Perhubungan	Buah	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		Tersedianya Pembangunan Gedung Terminal	Paket	36,00	36,00	100,00	-	-	-
		Tersedianya Pembangunan Dermaga	Paket	1,00	1,00	100,00	38,00	38,00	100,00
		Tersedianya Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Unit	1,00	1,00	100,00	37,00	37,00	100,00
		Tersedianya Pagar Pengaman Jalan	Unit	100%	100%	100,00	2,00	2,00	100,00
		Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Angkutan Hari Raya	Paket	2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Tersedianya Pengadaan Lampu Peringatan	Paket	1,00	1,00	100,00	-	-	-
		Tersedianya Pengadaan Rambu-Rambu Sungai	Unit	1 Paket	1 Paket	100,00	8,00	8,00	100,00
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran	Paket	1,00	1,00	100,00	-	-	-
		Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket	1,00	1,00	100,00	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya Cetak Stiker Tanda Pendaftaran Kapal Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket	1,00	1,00	100,00	-	-	-
		- Stiker Buku	Buah	-	-	-	2.500,00	2.500,00	100,00
		- Stiker Plat	Buah	-	-	-	1.875,00	1.875,00	100,00
		Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor	Paket	-	-	-	1,00	1,00	100,00
		Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Diatas Air	Paket	-	-	-	1,00	1,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2014 sebesar Rp. 8.796.576.660,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.632.521.051,00 atau sebesar 98,14%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.005.448.184,00 atau sebesar 97,72% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.627.072.86700 atau sebesar 98,36%.
- Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2015 sebesar Rp. 8.685.169.285,00 atau berkurang sebesar 1,27% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.7 Badan Lingkungan Hidup

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Kualitas Air Di Outlet Dan Inlet	Sampel Outlet IPAL	100%	100%	100%	10,00	10,00	100,00
			Sampel Air Sungai				10,00	10,00	100,00
2	Mewujudkan Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan, Laju Kerusakan Lingkungan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam	Tersedianya Data Kegiatan Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	Sampel Air Sungai	100%	75%	75%	2,00	2,00	100,00
			Sampel Air Limbah				2,00	2,00	100,00
		Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Di Kabupaten Kubu Raya	Dokumen Usaha/Kegiatan	100%	100%	100%	12,00	12,00	100,00
3	Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL	Orang	100%	99,51%	99,51%	120,00	120,00	100,00
		Mengurangi Tingkat Pencemaran Air, Mengurangi Tingkat Kerusakan Lahan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Perencanaan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
		Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kubu Raya	Orang	-	-	-	75,00	75,00	100,00
		Tersedianya Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Kubu Raya	Dokumen	-	-	-	1,00	1,00	100,00
		Meningkatnya Kesadaran Remaja Dalam Pelestarian SDA Dan Lingkungan Hidup	Orang	100%	63,33%	63,33	30,00	25,00	66,67
		Terdapat Sekolah-Sekolah Berbudaya Lingkungan Yang Teduh Dan Bersih	Sekolah	100%	100%	100	3,00	3,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 sebesar Rp. 7.179.980.816,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.740.843.484,00 atau sebesar 93,88%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.714.980.066,00 atau sebesar 99,06% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.025.863.418,00 atau sebesar 92,24%.
- Pagu Anggaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 sebesar Rp. 6.916.100.372,00 atau berkurang sebesar 3,68% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Administrasi Kependudukan Secara Profesional dan Berkualitas Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Data Pendaftaran Penduduk Berbasis SIAK	%				100,00	100,00	100,00
		Persentase Penyelesaian Data Pencatatan Sipil Berbasis SIAK	%				100,00	100,00	100,00
		Persentase Realisasi Akses Data Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK Oline	%				100,00	100,00	100,00
		Persentase Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP	KTP				365.000	314.403	86,14
2	Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Secara Berkelanjutan Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menuju Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KK	KK				230.000	196.851	85,59
		Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta	AKTA				300.000	391.258	130,42
		Jumlah Realisasi Nomor Induk Kependudukan	NIK				670.000	596.669	89,06
		Jumlah Ketersediaan Data Penduduk Yang Bersumber dari F1.01 dan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Penduduk				670.000	596.669	89,06

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya Kependulian Masyarakat Secara Berkelanjutan Melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting Lainnya Menuju Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Yang Melakukan Pindah Datang	Penduduk				6.000	9.705,00	161,75
		Jumlah Perkawinan Yang Tercatat	Penduduk				300,00	977,00	325,67
		Jumlah Perceraian Yang Tercatat	Penduduk				10,00	6,00	60,00
		Jumlah Penduduk Tinggal Terbatas Menjadi Penduduk Tinggal Tetap	Penduduk				10,00	-	0,00
		Jumlah Kelahiran Yang Tercatat	Kelahiran				10.000	97.355	973,55
		Jumlah Kematian Yang Tercatat	Kematian				100,00	613,00	613,00
		Jumlah Lahir Mati Tercatat	Orang				20,00	-	0,00
		Jumlah Pengakuan Anak Yang Tercatat	Anak				10,00	-	0,00
		Jumlah Pengesahan Anak Yang Tercatat	Anak				200,00	292,00	146,00
		Jumlah Pengesahan Anak Yang tercatat	Anak				10,00	-	0,00
		Jumlah Pengangkatan Anak Yang Tercatat	Anak				10,00	-	0,00
		Jumlah Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan	Orang				10,00	4,00	40,00
		Persentase Ketersediaan Jaringan Komputerisasi Berbasis SIAK	%				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Tersedianya Akses Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Hasil-hasilnya Menurut Ketentuan Yang Berlaku Sebagai Pemenuhan Pelayanan Publik	Persentase Akurasi Data Penduduk	%				100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

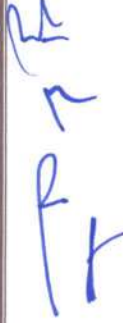
- Pagu Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 sebesar Rp. 4.552.813.518,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.480.227.251,00 atau sebesar 98,41%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.383.976.454,00 atau sebesar 99,31% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.096.250.797,00 atau sebesar 97,40%.
- Pagu Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 sebesar Rp. 5.246.686.547,00 atau naik sebesar 15,24% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

[Handwritten signature]

2.2.9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	60,00	40,00	66,67	70,00	41,49	59,27
		Persentase Angka Melek Huruf Perempuan Usia > 15 Tahun	%	60,00	52,97	88,28	70,00	63,16	90,23
		Persentase Angkatan Kerja Perempuan	%	60,00	56,07	93,45	70,00	61,44	87,77
2	Terwujudnya Perlindungan Anak Dari Perlakuan Salah, Kekerasan, Eksploitasi, Perdagangan Dan Diskriminasi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	%	20,00	16,00	80,00	10,00	8,36	83,60
3		Cakupan Sasaran PUS Peserta KB Aktif/Prevalensi KB Aktif	%	65,00	63,40	97,54	65,00	62,12	95,57
	Terkendalinya Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk	Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi/Jumlah Akseptor KB	%	5,00	18,80	376,00	5,00	17,87	357,40
		Rasio Peserta KB Baru	%	65,00	57,22	88,03	80,00	90,70	113,38
4	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB Di Setiap Desa/Kelurahan	%	2,00	1,50	75,00	2,00	1,50	75,00
		Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	40,00	35,84	89,60	30,00	22,29	74,30

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014



- Pagu Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 sebesar Rp. 6.715.479.423,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.661.137.107,00 atau sebesar 99,19%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.532.255.855,00 atau sebesar 99,51% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.128.881.252,00 atau sebesar 99,09%.
- Pagu Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015 sebesar Rp. 7.987.490.488,00 atau naik sebesar 18,94% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2.2.10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	- Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - Prosentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial - Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi - Prosentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Bantuan (Raskin)	Orang KK Buah KK	-	-	-	80,00	80,00	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Pasar	- Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja - Penyuluhan dan Pelatihan Ketenagakerjaan - Prosentase Pengawasan Ketenagakerjaan	% % LKM	-	-	-	25,00	10,09	40,36
3	Meningkatnya Percepatan Pembangunan di Wilayah Transmigrasi	- Identifikasi dan Penyediaan Sarana Prasarana - Pembinaan Kepada Transmigran	% KK	-	-	-	30,00	25,40	84,67
				-	-	-	50,00	50,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 sebesar Rp. 4.910.142.870,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.661.725.150,00 atau sebesar 94,94%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.357.241.660,00 atau sebesar 99,75% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.304.483.490,00 atau sebesar 94,13%.
- Pagu Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 sebesar Rp. 6.481.029.280,00 atau naik sebesar 31,99% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.11 Dinas Koperasi dan UMKM

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kelembagaan Koperasi Dan UMKM Yang Tangguh, Profesional Dan Mandiri Yang Ditopang Secara Kuat Dan Konsisten Oleh Kegiatan Usaha Anggota Sehingga Mampu Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Anggota Dan Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Orang				20,00		
		Sosialisasi Perda Badan Layanan Umum Kredit Mikro bagi UMKM	Paket				1,00		
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan SDM Dalam Upaya Menumbuh Kembangkan Jiwa Kewirausahaan Dan Kemandirian Bagi Usaha Kecil Dan Menengah	Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM	Orang				100,00		
		Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Tahun				50,00		
		Bimtek Strategi Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Orang				90,00		
		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Orang				1,00		



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
				5	6	8	9
1	2	3	4		7		10
3	Terwujudnya Dukungan Melalui Pengembangan Usaha Dan Permodalan Serta Promosi Produk Usaha Koperasi Dan UMKM	Melakukan Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan LKM	Koperasi			40,00	
		Pelatihan Pengelolaan Bagi UMKM	Orang				
		Fasilitasi Pengembangan Kerajinan Daerah	Tahun			100,00	
		Penilaian Kesehatan Koperasi	Koperasi			1,00	
		Kajian Untuk Pengembangan Kawasan Industri Bagi UMKM	Paket			30,00	
		Pelatihan SDM Koperasi Dalam Penyusunan Laporan RAT	Orang			1,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagi Permodalan	Koperasi			70,00	
		Terciptanya kerjasama anatar pengusaha dan UMKM	Orang			25,00	
		Mengadakan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam	Kegiatan			100,00	
		Penataan Halaman Pasar/Kios	Kegiatan			1,00	
						1,00	

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

TP 712

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Melaksanakan Bimtek Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi dan UMKM	Koperasi				50,00		
		Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga Dengan Koperasi Dan UMKM	Koperasi				50,00		
		Peningkatan Pemberdayaan Pemberdayaan dan Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi	Koperasi				60,00		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi	Orang				100,00		
4	Terwujudnya Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Upaya Menjadikan Koperasi Dan UMKM Menjadi Lembaga Ekonomi Produktif Yang Mandiri Profesional	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi	Kegiatan				1,00		

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014 sebesar Rp. 4.535.996.527,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.226.281.657,00 atau sebesar 93,17%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.975.660.501,00 atau sebesar 99,62% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.250.621.156,00 atau sebesar 88,16%.
- Pagu Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015 sebesar Rp. 5.866.688.618,00 atau naik sebesar 29,34% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal Daerah	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal	%	100,00	133,00	133,00	100,00	120,99	120,99
		Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp. (Milyar)	2.093,13	4.658,18	222,55	3.484,56	10.294,13	295,42
2	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perijinan dan Non Perijinan Sesuai Dengan SOP	Perizinan Penanaman Modal Yang di Setujui	Izin	-	75,00	-	-	126,00	-
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terbit	Izin	2.690,00	2.669,00	99,22	3.332,00	2.690,00	80,73
		Persentase Kualifikasi SDM/Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal	Orang	22,00	20,00	90,91	23,00	20,00	86,96
		Rata-Rata Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Lama	-	22,30	-	-	20,89	-
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dikenakan Biaya	Izin	77,00	9,00	11,69	80,00	9,00	11,25
		Sistem Penanaman Modal Berbasis Teknologi	Simyandu	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
			SPIPISE	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2014 sebesar Rp. 5.170.936.769,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.826.264.421,00 atau sebesar 93,33%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.001.999.087,00 atau sebesar 94,06% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.824.265.334,00 atau sebesar 92,83%.
- Pagu Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2015 sebesar Rp. 5.703.792.733,00 atau naik sebesar 10,30% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

Handwritten signature and initials in blue ink.

2.2.13 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melestarikan Aset Budaya dan Mengembangkan Potensi Pariwisata Unggulan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	100,00	100,00	100,00	10,00	3,00	30,00
		Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Tempat	100,00	100,00	100,00	11,00	5,00	45,45
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	58,82	58,82	100,00	23,00	10,00	43,48
		Prosentase Sanggar Seni yang Aktif	%	80,19	80,19	100,00	125,00	94,00	75,20
		Prosentase Situs Budaya yang Terpelihara	%	58,82	58,82	100,00	23,00	10,00	43,48
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik)	Orang	94,57	94,57	100,00	95.000	57.596	60,63
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Asing)	Orang	45,34	45,34	100,00	6.000,00	2.312,00	38,53
		Prosentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Tingkat Hunian Hotel	%	19,05	19,05	100,00	100,00	100,00	100,00
		Rasio Destinasi Wisata Unggulan	Tempat	31,25	31,25	100,00	80,00	30,00	37,50
2	Mengembangkan Potensi Generasi Muda dan Prestasi Olahraga	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Per 1.000 Penduduk	Unit	100,00	100,00	100,00	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Lapangan Olahraga Per 1.000 Penduduk	Buah	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemuda	Kegiatan	100,00	100,00	100,00	4,00	4,00	100,00
		Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten Yang Diselenggarakan	Event	90,90	90,90	90,90	13,00	11,00	84,62
		Jumlah Event Olahraga Tingkat Regional Yang Diikuti	Event	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Event Olahraga Tingkat Nasional Yang Diikuti	Event	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00
		Pembinaan Olahraga Kepada Pengda Keolahragaan di Kabupaten	Pengda	100,00	100,00	100,00	33,00	33,00	100,00
		Jumlah Kelompok Kewirausahaan Pemuda	Kelompok	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Siswa Berprestasi Dibidang Olahraga	Siswa	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	100,00
		Prosentase Guru Olahraga Latar Belakang Olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Olahraga Rekreasi Yang Dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Olahraga Prestasi Yang Berprestasi	%	51,61	51,61	51,61	31,00	18,00	58,06

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 sebesar Rp. 5.353.801.038,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.008.967.052,00 atau sebesar 95,05%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.596.164.518,00 atau sebesar 99,19% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.492.802.534,00 atau sebesar 93,27%.
- Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 sebesar Rp. 4.595.311.847,00 atau menurun sebesar 14,17% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berubah menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga.

2.2.14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9
					7		10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 sebesar Rp. 1.346.592.501,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.224.901.179,00 atau sebesar 90,96%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 594.868.179,00 atau sebesar 99,95% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 630.033.000,00 atau sebesar 83,84%.
- Pagu Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 sebesar Rp. 1.294.416.948,00 atau menurun sebesar 3,87% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.2.15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terselenggaranya Upaya Pencegahan Dini Dan Mitigasi Guna Menghindari Terjadinya Bencana Serta Mengurangi Resiko Bencana	Jumlah Potensi Daerah Rawan Bencana Didaerah Sekabupaten Kubu Raya Dapat Terdeteksi/Terpetakan	Potensi	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00
		Prosentase Kec/Desa Dengan Hasil Hot Spot (Titik Api) Terbanyak Dan Perlu Penanganan	%	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
2	Terselenggaranya Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Logistik Penanganan Kedaruratan Bencana Serta Peningkatan Mobilitas Sumber Daya Dalam Rangka Penyelamatan Dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana	Jumlah Barang-Barang Pasokan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Yang Terdistribusi	Pasokan	-	-	-	334,00	200,00	59,88

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terselenggaranya Upaya Pemulihan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum, Kesehatan, Fungsi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Akibat Bencana	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Ketinggian Air Diatas Setengah Meter Dan Perlu Mendapat Prioritas Penanganan	Kec	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.346.592.501,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.272.232.047,00 atau sebesar 94,86%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 791.149.358,00 atau sebesar 99,03% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 481.082.689,00 atau sebesar 88,73%.
- Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 5.972.017.817,00 atau naik sebesar 345,31% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.16 Sekretariat Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	Jumlah Dokumen LKPJ	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Persentase Jumlah Dokumen LPPD Kepada Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Terselenggaranya Rakor Unsur Muspida	Kegiatan	100%	40,86%	40,86	3,00	-	0,00
		Jumlah Raker Unsur Pimpinan Kecamatan	Kegiatan	100%	73,86%	73,86	2,00	2,00	100,00
		Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kegiatan	100%	99,99%	99,99	1,00	-	0,00
		Jumlah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Kegiatan				1,00	-	0,00
		Jumlah Penegasan Batas Daerah	Dokumen				5,00	5,00	100,00
		Jumlah Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Kecamatan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Monitoring Administrasi Kecamatan	Dokumen				10,00	10,00	100,00
		Terlaksananya Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kecamatan				2,00	3,00	150,00
		Terlaksananya Fasilitas Otonomi Daerah dan Koordinasi Kecamatan	Dokumen				40,00	23,00	57,50
		Terlaksananya Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil	%				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen EKPOD Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kajian Teknis Pemekaran Kecamatan	Dokumen				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitas Data Pembentukan Kelurahan	Dokumen				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Fasilitas Penunjang PATEN	Kecamatan				4,00	4,00	100,00
		Laporan Dokumen Kegiatan WD4, Profil Kecamatan dan Laporan Harian Camat	%				100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Mental Spiritual	Jumlah Tim Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Data Yang Jelas dan Lengkap Mengenai Jumlah Pontren, Rumah Ibadah, Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Gambaran dan Pengetahuan Dalam Tata Cara Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Dalam Pemberian Dana Bansos/Hibah Kepada Pihak Terkait	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Jamaah Haji	Orang				250,00	250,00	100,00
		Jumlah Peningkatan Ukhuwa Islamiyah Antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Masyarakat	Kecamatan				9,00	9,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Masyarakat Kecamatan Untuk Ikut Serta Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan	Kecamatan				3,00	3,00	100,00
		Jumlah Lembaga Keagamaan	Lembaga				5,00	5,00	100,00
		Jumlah Peserta dalam Mengikuti Perlombaan MTQ Tingkat Provinsi	Peserta				30,00	30,00	100,00
		Jumlah Pendidikan Non Formal	Kecamatan				3,00	3,00	100,00
		Jumlah Organisasi Kelembagaan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Profesionalisme SDM	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
3	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan Untuk Kepentingan Publik	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Berupa Data Foto, Audio dan Video	Peliputan	100%	76,65%	76,65	212,00	173,00	81,60
		Jumlah Publikasi Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Publikasi	100%	74,04%	74,04	117,00	117,00	100,00
		Jumlah Dialog Interaktif Melalui Televisi dan Radio	Kali	100%	62,26%	62,26	5,00	4,00	80,00
		Jumlah Penyebaran Informasi Di Media Cetak dan Elektronik	Kali	100%	74,05%	74,05	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Buletin Pemkab Kubu Raya	Buku	100%	44,69%	44,69	600,00	600,00	100,00
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan	Kali	100%	60,64%	60,64	2,00	2,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	SKPD	-	-	-	38,00	38,00	100,00
		Jumlah Pengadaan Sarana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan	Paket	-	-	-	1,00	1,00	100,00
4	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengawasan Yang Berdaya Guna Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Lakip Kabupaten Kubu Raya	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah AKIP SKPD di Lingkungan Kegiatan Kehumasan	SKPD				2,00	2,00	100,00
		Jumlah IKU Kabupaten dan IKU SKPD	SKPD				39,00	39,00	100,00
		Jumlah Formasi Jabatan PNS di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Penetapan Kinerja SKPD dan PK Kabupaten Kubu Raya	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah SKPD Dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Bimtek dan Tersusunnya Analisis Beban Kerja	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Permasalahan Bidang Organisasi dan Kelembagaan	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPM	SKPD	100%	12,50%	12,50	15,00	15,00	100,00
		Jumlah Pengetahuan SKPD Dalam Penyusunan SPM	SKPD	-	-	-	15,00	15,00	100,00
		Jumlah IKM Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perikanan, Keanekaragaman Hayati, Kehutanan dan Perkembangan Serta ESDM	Jumlah SOP SKPD di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Penyusunan SOP di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Perubahan SOPD di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pakta Integritas Seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Bimtek dan Tersusunnya Analisis Jabatan	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Reformasi Birokrasi	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Data Base KWT	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Evaluasi DEMAPAN, P2KP dan Daerah Rawan Pangan	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Konsumsi Pangan Bergizi Masyarakat	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Program Keamanan Pangan Segar	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Usaha Pengelolaan Hasil Pangan Lokal	% Kelompok				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Database Desa Mandiri Pangan	Desa						
		Jumlah Kegiatan Kampanye dan Promosi 3B-AH/B2SA	%	100,00	95,28	95,28	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Data NBM	%	100,00	98,57	98,57	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Buku Laporan Hasil Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	%	100,00	93,86	93,86	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Program Keamanan Pangan Segar	%	100,00	96,01	96,01	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Data Base Desa Mandiri Pangan	Desa	100%	90,78%	90,78	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Database GAPOKTAN (Kelompok Tani/Kelompok Afinitas)	Desa	100%	88,34%	88,34	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Data dan Informasi SKPG Secara Rutin dan Tepat Waktu	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Modal dalam Rangka Stabilitas Harga Gabah/Beras	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Penyaluran RASKIN	%	100,00	86,56	86,56			
		Jumlah Evaluasi PLDPM di Kabupaten Kubu Raya	%	100,00	86,56	86,56			
		Jumlah Stok Cadangan Pangan Ditingkat Desa dan Tercapainya Kualitas Gabah dari Kadar Air 26% menjadi 14%	%				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Wilayah Perbatasan Dalam Suatu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi yang Terintegrasi dan Strategis	Jumlah Laporan TEPPA	Laporan	100%	53,66%	53,66	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah	BUMD	100%	89,64%	89,64	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Kegiatan di Bidang Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan	100%	99,82%	99,82	9,00	9,00	100,00
		Jumlah Kinerja Usaha Daerah	BUMD				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Kegiatan di Bidang Pembangunan Daerah	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Model/Pola Kemitraan dalam Rangka Kerjasama Ekonomi	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif atau Industri Kreatif	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Informasi dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Laporan	Kali				4,00	4,00	100,00
		Jumlah Informasi dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Laporan Pelaksanaan Pameran/Expo	Kali	100%	61,78%	61,78	4,00	4,00	100,00
		Jumlah Pola KPS	SKPD	-	-	-	38,00	38,00	100,00
		Jumlah Kondisi Pemukiman yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Perolehan Laba Usaha Daerah	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Kondisi Pemukiman yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Administrasi serta Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
7	Meningkatnya Kinerja Aparatus, Pengawasan yang Berdayaguna untuk Mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Tanah-Tanah Aset Pemda	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Tanah Fasilitas Pemda dan Kepentingan Umum	Kecamatan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Data Harga Dasar Tanah	Kecamatan				4,00	4,00	100,00
		Terfasilitasinya Konflik-Konflik Pertanian	Kecamatan				9,00	9,00	
8	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Aparatur untuk Mendorong Terciptanya Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Perusahaan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Pegawai dalam Berpakaian Dinas	%				100,00	100,00	100,00
		Terlaksananya Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	90,00	90,00
		Jumlah Kegiatan Penataan Dokumen/Arsip PNS Setda	Dokumen				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/DPRD/Kepala Daerah	Orang	2,00	2,00	100,00	2,00	1,00	50,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	%	100,00	99,55	99,55	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pengetahuan SDM dengan Membaca Koran dan Majalah	Koran	100%	98,27%	98,27	5,00	4,00	80,00
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Staf Ahli Bupati	Majalah				3,00	2,00	66,67
			Orang	100%	78,63%	78,63	5,00	5,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan Taman	%	100,00	65,94	65,94	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	78,84	78,84	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Sistem Informasi Perencanaan SKPD	%				100,00	90,00	90,00
		Jumlah Sarana Komunikasi Data melalui Radio SSB/2 Mtr Band	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Tenaga Persandian dan Telekomunikasi yang Handal	Orang				3,00	2,00	80,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	Unit				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Unit				1,00	1,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Aparatur untuk Mendorong Terciptanya Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Buku LAKIP Setda	Laporan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Peningkatan SDM sebagai Pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD	Orang	100%	72,83%	72,83	5,00	5,00	100,00
		Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket	100%	35,51%	35,51	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100,00	70,05	70,05	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100,00	21,03	21,03	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kebersihan Kantor	%	100,00	65,94	65,94	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100,00	55,81	55,81	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat Kepala Daerah	%	100,00	92,93	92,93	100,00	100,00	100,00

[Handwritten signature]

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100,00	52,46	52,46	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	%	100,00	83,32	83,32	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Daerah	Paket	100%	42,33%	42,33	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	100%	79,84%	79,84	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Paket	100%	90,19%	90,19	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Meja dan Kursi Kerja untuk Pemerintah Daerah	Paket	100%	99,95%	99,95%	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	%	100,00	54,74	54,74	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	%	100,00	99,64	99,64	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	%	100,00	97,95	97,95	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	%	100,00	99,94	99,94	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 25.900.018.613,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.348.871.935,00 atau sebesar 86,29%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.432.394.924,00 atau sebesar 98,22% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.916.477.011,00 atau sebesar 88,73%.
- Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 56.729.852.620,00 atau naik sebesar 119,03% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Banyaknya perbedaan pada Satuan Indikator Kinerja Utama antara Tahun 2013 dengan Tahun 2014.

2.2.17 Sekretariat DPRD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Keterampilan dan Profesionalisme Anggota DPRD	Jumlah Pelaksanaan Serapan Aspirasi yang Berkembang di Daerah Pemilihan	Kali	135,00	135,00	100,00	135,00	90,00	66,67
		Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (PSDM)	Orang	208,00	192,00	92,31	163,00	146,00	89,57
		Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Orang	540,00	476,00	88,15	135,00	81,00	60,00
		Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Orang	900,00	856,00	95,11	540,00	490,00	90,74
2	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum yang disetujui oleh DPRD	Jumlah Raperda yang disusun dan dibahas	Perda	23,00	18,00	78,26	23,00	8,00	34,78
		Jumlah Naskah Akademik yang disusun	Dokumen	5,00	5,00	100,00	6,00	6,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2014 sebesar Rp. 24.386.079.138,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.852.120.237,00 atau sebesar 89,61%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.298.228.479,00 atau sebesar 97,09% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.553.891.758,00 atau sebesar 88,73%.
- Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebesar Rp. 20.561.994.843,00 atau menurun sebesar 15,68% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.



2.2.18 Inspektorat Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengawasan Yang Berdaya Guna Untuk Mendukung Kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7,00	2,00	9,05	6,00	3,00	50,00
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	SKPD	16,00	16,00	100,00	25,00	25,00	100,00
		Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	LHP	7,00	-	64,77	6,00	6,00	100,00
		Inventarisasi Temuan Pengawasan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	TLHP	128,00	-	-	25,00	32,00	128,00
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kegiatan	2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa	LHP Desa	24,00	24,00	100,00	28,00	28,00	100,00
		Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		LP2P Kabupaten Kubu Raya	Berkas	901,00	-	77,28	927,00	977,00	105,39
		Pemeriksaan TP dan TGR	Kasus	1,00	-	0,00	1,00	2,00	200,00
		Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Sosialisasi LHKPN	Paket	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sosialisasi SPIP	Paket	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Review LAKIP SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1,00	100,00	38,00	33,00	86,84
		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Orang	6,00		83,35	3,00	3,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 5.121.730.164,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.771.574.789,00 atau sebesar 93,16%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.445.729.000,00 atau sebesar 97,89% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.325.845.789,00 atau sebesar 88,66%.
- Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 6.216.583.780,00 atau naik sebesar 21,38% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

[Handwritten signature]

2.2.19 Badan Kepegawaian Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Sistem Pelayanan Prima Dan Bertanggung Jawab Sejalan Dengan Prinsip Good Governance Bagi Seluruh Aparatur Untuk Mendorong Terciptanya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Meningkatkan Kapasitas Pembangunan Daerah	Persentase Data PNS Yang Terhimpun Dalam Database SAPK Dan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian	PNS	8.000,00	7.820,00	97,75	4.982,00	5.320,00	106,78
		Jumlah Penyelesaian Administrasi Kepegawaian (KARIS/KARSU, KARPEG) Dan Penyelenggara Sumpah PNS	PNS	410,00	806,00	196,59	122,00	189,00	154,92
2	Meningkatkan Profesionalisme Dan Kompetensi Aparatur Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah Serta Kemampuan Pegawai Yang Berdayaguna Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah , Dan Ujian Sertifikasi	PNS	60,00	112,00	186,67	51,00	74,00	145,10
		Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan Perjenjangan	PNS	168,00	196,00	116,67	8,00	2,00	25,00
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Formal Dan Bimtek PNS	PNS	481,00	568,00	118,09	150,00	164,00	109,33
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Formal Dan Bimtek PNS	PNS	350,00	391,00	111,71	120,00	97,00	80,83
		Jumlah Data Pegawai Pensiun Yang Diproses Tepat Waktu	PNS	500,00	611,00	122,20	110,00	188,00	170,91
		Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Dan Fungsional	PNS	1.600,00	2.404,00	150,25	1.000,00	1.032,00	103,20

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Kenaikan Pangkat	PNS	8.000,00	7.820,00	97,75	4.982,00	5.320,00	106,78
3	Menjamin Penyelenggaraan Program Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Partisipasi Publik Dan Penegakan Hukum	Jumlah Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Kepegawaian	PNS	72,00	72,00	100,00	18,00	21,00	116,67
		Jumlah PNS Yang Menerima Penghargaan/Reward	PNS	4.961,00	4.724,00	95,22	408,00	307,00	75,25

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 4.646.801.438,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.457.444.219,00 atau sebesar 95,92%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.228.291.359,00 atau sebesar 96,13% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.229.152.860,00 atau sebesar 95,73%.
- Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 5.277.938.781,00 atau naik sebesar 13,58% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

[Handwritten signature]

2.2.20 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Penerimaan Sumber Pendapatan Daerah							
		- Penerimaan PAD	%	100,00	117,74	117,74	100,00	115,00	115,00
		- Penerimaan BPHTB	%	100,00	129,43	129,43	100,00	119,00	119,00
		- Penerimaan PBB	%	100,00	102,49	102,49	100,00	113,00	113,00
		- Penerimaan Retribusi Daerah	%	100,00	110,49	110,49	100,00	115,00	115,00
		- Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
		- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	%	100,00	14,44	14,44	100,00	56,00	56,00
		Dana Perimbangan	%	100,00	86,63	86,63	100,00	107	107,00
		- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
		- DAK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah							
		- Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	%	100,00	83,65	83,65	100,00	47,00	47,00
		- Bantuan Keuangan dari Provinsi/ atau Pemerintah Daerah Lainnya	%	100,00	49,36	49,36	100,00	101,00	101,00
		- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	%	100,00	83,25	83,25	100,00	80,00	80,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Tentang APBD	Perda	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Penjabaran APBD	Peraturan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Perda	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Pedoman Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Juknis	20,00	20,00	100,00	20,00	25,00	125,00
		Serapan Anggaran Gaji 40 SKPD	%	100	98,65	98,65	100	99,63	99,63
		Serapan Belanja Daerah Terhadap	%	100	93,97	93,97	100	91,61	91,61
		Serapan Belanja Tidak Langsung	%	100	76,36	76,36	100	91,34	91,34
		Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Akuntansi	Prosentase SKPD Yang Menyampaikan SPJ Tepat Waktu	%	100,00	98,75	98,75	100,00	99,00	99,00
		Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Perkembangan Inventaris Barang	%	100	17,90	17,90	100	97,72	97,72
		Penghapusan Barang Milik Pemda	%	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
4	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Aset	Kepemilikan Atas Barang Daerah	Unit	-	-	-	20,00	19,00	95,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 63.985.993.950,40 dengan realisasi sebesar Rp. 53.202.670.888,87 atau sebesar 83,15%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 46.252.020.805,00 atau sebesar 91,45% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.625.190.182,00 atau sebesar 94,16%.
- Pagu Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 11.305.915.700,00 atau menurun sebesar 82,33% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan tertib Perda (PKL dan Fasilitas Umum)	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kali				8,00	4,00	50,00
2	Anggota Tenaga Satpol PP Yang Bertugas dan Yang Ada di Kecamatan	Polisi Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kali				3,00	1,00	33,33

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 sebesar Rp. 5.653.221.499,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.401.047.801,00 atau sebesar 95,79%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.264.210.651,00,00 atau sebesar 97,87% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.136.837.150,00 atau sebesar 95,18%.
- Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 sebesar Rp. 7.503.167.308,00 atau naik sebesar 33,08% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun 2015 Satpol PP bergabung dengan Linmas menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas. Linmas Tahun 2014 masih menjadi Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

2.2.22 Kecamatan Sungai Raya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
		Jumlah Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Di Desa	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
2	Peningkatan Situasi Kemananan dan Peluang Usaha Yang Semakin Kondusif di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Ketentraman dan Keteriban di Desa	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sesuai Rencana dan Kebutuhan Melalui Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Pembinaan ke Desa Dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Perizinan	Rekom	150,00	291,00	194,00	150,00	373,00	248,67

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Raya Tahun 2014 sebesar Rp. 2.939.578.670,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.764.122.495,00 atau sebesar 94,03%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.434.509.442,00 atau sebesar 96,31% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.329.613.053,00 atau sebesar 91,69%.

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Raya Tahun 2015 sebesar Rp. 2.525.088.039,00 atau menurun sebesar 14,10% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.2.3 Kecamatan Kuala Mandor B

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan	Jumlah Pembinaan Pemerintahan Desa	Desa	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
		Jumlah Pembinaan Kesejahteraan	Desa	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Lebih	Pelayanan Kependudukan (E-KTP)	KTP	2.500,00	2.500,00	100,00	2.900,00	2.745,00	94,66
		Pelayanan Perizinan	Izin	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2014 sebesar Rp. 1.776.651.926,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.640.725.129,00 atau sebesar 92,35%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.073.210.025,00 atau sebesar 96,14% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 567.515.104,00 atau sebesar 85,94%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Raya Tahun 2015 sebesar Rp. 1.888.193.092,00 atau naik sebesar 6,28% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.24 Kecamatan Sungai Ambawang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan Melalui Pelayanan Yang Cepat, Tepat, Dan Data Yang Akurat	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Di Kecamatan	Izin	-	-	-	75,00		
2	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kependudukan	Tersedianya Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan	KTP	-	-	-	7.000,00		
3	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Terbinanya Pemerintah Desa	Desa	-	-	-	15,00		
4	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Sesuai Rencana Dan Kebutuhan Melalui Koordinasi Dan Sinkronisasi	Terbinanya Sosial Kemasyarakatan	Desa	-	-	-	15,00		
5	Meningkatnya Situasi Keamanan Dan Peluang Usaha Semakin Kondusif	Terwujudnya Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Desa	-	-	-	15,00		
		Terwujudnya Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	-	-	1,00		
5	Meningkatnya Situasi Keamanan Dan Peluang Usaha Semakin Kondusif	Terwujudnya Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban	Desa	-	-	-	15,00		

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2014 sebesar Rp. 1.989.882.636,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.926.078.623,00 atau sebesar 96,79%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.149.894.118,00 atau sebesar 99,04% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 776.184.505,00 atau sebesar 93,63%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2015 sebesar Rp. 2.035.362.166,00 atau naik sebesar 2,29% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.25 Kecamatan Terentang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Terentang Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Terentang Tahun 2014 sebesar Rp. 1.687.926.851,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.599.341.481,00 atau sebesar 94,75%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.015.645.773,00 atau sebesar 99,90% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 583.695.708,00 atau sebesar 86,96%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Terentang Tahun 2015 sebesar Rp. 1.886.035.66500 atau naik sebesar 11,74% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kecamatan Terentang belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.2.26 Kecamatan Batu Ampar

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Batu Ampar Tahun 2014 sebesar Rp. 2.197.174.287,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.104.534.532,00 atau sebesar 95,78%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.231.699.263,00 atau sebesar 99,99% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 872.835.269,00 atau sebesar 90,41%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Batu Ampar Tahun 2015 sebesar Rp. 2.241.455.303,00 atau naik sebesar 2,02% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kecamatan Batu Ampar belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.2.27 Kecamatan Kubu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Kubu Tahun 2014 sebesar Rp. 2.149.640.777,04 dengan realisasi sebesar Rp. 1.930.697.412,00 atau sebesar 89,81%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.224.001.459,00 atau sebesar 99,39% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 706.695.953,00 atau sebesar 76,97%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Kubu Tahun 2015 sebesar Rp. 1.892.379.712,00 atau menurun sebesar 11,97% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kecamatan Kubu belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.2.28 Kecamatan Rasau Jaya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kecamatan	Terlaksananya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00
6	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Pembinaan Ke Desa	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2014 sebesar Rp. 2.223.478.498,80 dengan realisasi sebesar Rp. 2.108.575.949,00 atau sebesar 94,83%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.371.690.411,00 atau sebesar 98,20% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 736.885.538,00 atau sebesar 89,14 %.
- Pagu Anggaran Kecamatan Rasau Jaya ahun 2015 sebesar Rp. 2.372.215.381,00 atau naik sebesar 6,69% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.29 Kecamatan Teluk Pakedai

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		Jumlah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
2	Meningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan Organisasi Desa di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Teluk Pakedai	KTP	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3	Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Kecamatan	Jumlah Pembinaan Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Perizinan di Kecamatan Teluk Pakedai	Izin	10,00	10,00	100,00	11,00	11,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2014 sebesar Rp. 1.967.757.634,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.855.974.702,00 atau sebesar 94,32%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.178.979.459,00 atau sebesar 97,71% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 676.995.243,00 atau sebesar 88,95 %.

- Pagu Anggaran Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2015 sebesar Rp. 2.127.348.462,00 atau naik sebesar 8,11% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.30 Kecamatan Sungai Kakap

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Melalui Pelayanan Yang Cepat dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Pemerintahan Desa	Desa	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Kependudukan	KK	1.600,00	1.550,00	96,88	1.700	1.675	98,53
		Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Desa	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sesuai Rencana dan Kebutuhan Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Pelayanan Perizinan	Izin	50,00	59,00	118,00	60,00	72,00	120,00
		Jumlah Pembinaan Ekonomi Pembangunan	Desa	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00
3	Meningkatkan Situasi Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Desa	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2014 sebesar Rp. 2.812.270.923,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.653.805.255,00 atau sebesar 94,37%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.432.003.159,00 atau sebesar 99,14% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.221.802.096,00 atau sebesar 89,32 %.

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2015 sebesar Rp. 2.622.904.506,00 atau menurun sebesar 6,73% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.31 Dinas Pendapatan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
- Tahun 2015 Dinas Pendapatan menjadi SKPD tersendiri yang sebelumnya bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.2.32 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pedesaan Yang Aktif dan Produktif	PKK	115,00	117,00	101,74	117,00	117,00	100,00
			LPM	115,00	117,00	101,74	-	-	-
			Posyantek	3,00	2,00	66,67	3,00	2,00	66,67
2	Peningkatan Ketertiban Administrasi Kelurahan	Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi	Desa	110,00	102,00	92,73	117,00	110,00	94,02
3	Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan Tapal Batas Desa	Patok	31,00	9,00	29,03	31,00	29,00	93,55
4	Penyaluran Dana Desa	Jumlah Desa Yang Mencairkan Dana Desa	Tahap 1	110,00	105,00	95,45	117,00	115,00	98,29
			Tahap 2	110,00	101,00	91,82	117,00	108,00	92,31

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 sebesar Rp. 3.981.091.887,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.900.820.200,00 atau sebesar 97,98%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.620.510.565,00 atau sebesar 99,25% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.280.309.635,00 atau sebesar 97,10 %.
- Pagu Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 sebesar Rp. 4.472.582.340,00 atau naik sebesar 12,35% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.33 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penelusuran Situs-Situs Bersejarah di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Khasanah Arsip Kerajaan	Berkas	50,00	10,00	20,00	50,00	10,00	20,00
		Jumlah Arsip Statis Yang Dirawat dan Di Restorasi	Berkas	50,00	4,00	8,00	50,00	4,00	8,00
		Jumlah Arsip Pilkada Tahun 2008	Berkas	50,00	42,00	84,00	50,00	42,00	84,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Daerah	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
2	Pengkajian dan Pengembangan Arsip	Jumlah Juklak dan Juknis Kerasipan	Jenis	3,00	1,00	33,33	3,00	1,00	33,33
		Jumlah Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Naskah Sumber Arsip	Berkas	40,00	71,00	177,50	40,00	60,00	150,00
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/Penyuluhan Kerasipan	Orang	50 Sekdes	50 Sekdes	100,00	50 SKPD	50 SKPD	100,00
3	Pemantapan Intensitas Kampanye/ Sosialisasi Melalui Media Massa	Terselenggaranya Kampanye/ Sosialisasi Media Massa	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
4	Perbaikan Pelayanan/ Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	Terealisasinya Minat dan Budaya Baca	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	-	-	-
		Terealisasinya Pencanangan Kubu Raya Membaca	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	-	-	-
5	Penambahan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Pengadaan Buku Koleksi Umum Untuk Perpustakaan Daerah	Buku	500,00	956,00	191,20	700,00	1.332,00	190,29

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepustakaaan	Terealisasinya Operasional Mobil Keliling dan Mobil Pintar	Unit	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.496.529.578,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.415.993.417,00 atau sebesar 94,62%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 707.047.346,00 atau sebesar 93,67% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 708.946.071,00 atau sebesar 95,59 %.
- Pagu Anggaran Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 2.022.565.331,00 atau naik sebesar 35,15% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.34 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terbentuknya Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bagi Masyarakat Luas	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat informasi	Kelompok	3,00	4,00	133,33	4,00	5,00	125,00
		Tersedianya Operasional Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustaka)	Bulan/Kec	-	-	-	12/4	12/4	100,00
		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kec	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi, Informasi Wilayah KKR	SKPD	-	-	-	30,00	30,00	100,00
		Terlaksananya Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Rangka Kontribusi Menara Telekomunikasi	Kec	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00
2	Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Rangka Kontribusi Menara Telekomunikasi	Menara	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	100,00
		Terlaksananya Bimtek Penggunaan Email server@kuburayakab.go.id di Pemkab Kubu Raya	SKPD	-	-	-	29,00	29,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (e-procurement)	Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Server	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00
		Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE Kuburayakab.go.id	Peralatan Penunjang LPSE	10,00	5,00	100,00	4,00	4,00	100,00
		Tersedianya Penguatan Operasional Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kubu Raya	Paket Lelang	203,00	203,00	100,00	500,00	340,00	68,00
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi Program Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya	Tersedianya Pengembangan Sistem Aplikasi Surat Elektronik di Pemkab Kubu Raya	Aplikasi	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government	Buku	-	-	-	1,00	-	0,00
		Tersedianya Penguatan Web.kuburaya.go.id dan Web.diskominfo	Berita	300,00	300,00	100,00	600,00	626,00	104,33
		Tersedianya Pengembangan Media Center	Liputan/Berita	-	-	-	350,00	565,00	161,43

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 sebesar Rp. 9.705.380.022,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.598.444.192,00 atau sebesar 88,59%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.496.453.720,00 atau sebesar 98,22% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.101.990.472,00 atau sebesar 86,80 %.

- Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebesar Rp. 4.507.582.364,00 atau menurun sebesar 53,56% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.35 Dinas Pertanian dan Peternakan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan	Meningkatnya Produksi Padi	Ton	225.000	217.912	96,85	245.936	207.545	84,39
		Meningkatnya Produktivitas Padi	Ku/Ha	37,50	34,26	91,36	35,75	34,26	95,83
		Meningkatnya Produksi Jagung	Ton	21.000,00	11.918	56,75	-	-	-
		Meningkatnya Produktivitas Jagung	Ku/Ha	33,50	29,10	86,87	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Kedelai	Ton	300,00	63,00	21,00	-	-	-
		Meningkatnya Produktivitas Kedelai	Ku/Ha	13,70	11,94	87,15	-	-	-
		Produksi Kacang Hijau	Ton	72,00	-	0,00	-	-	-
		Produktivitas Kacang Hijau	Ku/Ha	7,80	-	0,00	-	-	-
		Produksi Ubi Kayu	Ton	23.208,00	-	0,00	-	-	-
		Produksi Ubi Jalar	Ton	4.858,00	-	0,00	-	-	-
		Produktivitas Ubi Jalar	Ku/Ha	85,25,00	-	0,00	-	-	-
		Produksi Kacang Tanah	Ton	227,00	-	0,00	-	-	-
		Produktivitas Kacang Tanah	Ku/Ha	11,70	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Sayuran	Ton	25.900	545.403	2.105,80	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Pisang	Ku	1.051.000	448.684	42,69	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Langsat	Ku	2.628,00	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Nanas	Ku	54.600,00	464.137,00	850,07	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Pepaya	Ku	965,00	23.834,00	2.469,84	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi Durian	Ku	32.878,00	17.460,00	53,11	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Rambutan	Ku	18.957,00	5.483,00	28,92	-	-	-
		Bertambahnya Luas Areal Komoditas Nanas	Ha	2.055,00	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Pepaya	Ku	965,00	23.834,00	2.469,84	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Durian	Ku	32.878,00	17.460,00	53,11	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Rambutan	Ku	18.957,00	5.483,00	28,92	-	-	-
		Bertambahnya Luas Areal Komoditas Nanas	Ha	2.055,00	-	0,00	-	-	-
		Bertambahnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak	Ha	20,00	-	0,00	-	-	-
		Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Ekor	16.847,00	14.309,00	84,94	19.223,00	14.720,00	76,57
		Peningkatan Populasi Ternak Babi	Ekor	32.165,00	35.825,00	111,38	36.792,00	36.813,00	100,06
		Meningkatnya Populasi Ayam Buras	Ekor	2.951.638	887.037,00	30,05	2.457.901	2.559.852	104,15
		Meningkatnya Populasi Ayam Ras	Ekor	1.570.704	1.023.383	65,15	5.185.166	7.281.423	140,43
		Meningkatnya Populasi Kambing	Ekor	37.304,00	25.502,00	68,36	46.759,00	28.545,00	61,05
		Meningkatnya Populasi Itik	Ekor	56.576,00	48.703,00	86,08	68.961,00	56.982,00	82,63
		Peningkatan Produksi Ternak Sapi	Ton	70,54,00	257,00	364,33	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Produksi Ternak Babi	Ton	49,44	333,00	673,54	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Ayam Buras	Ton	2.901,43	164,00	5,65	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Ayam Ras	Ton	2.898,13	237,00	8,18	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Kambing	Ton	30,64	47,43	154,80	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Itik	Ton	2,07	6,03	291,30	-	-	-
2	Meningkatkan Produktivitas Pangan Melalui Pemanfaatan Teknologi	Meningkatnya Penggunaan Alat dan mesin Pertanian	Unit	895,00	167,00	18,66	700,00	731,00	104,43
		Jumlah Kelompok yang Terbina	Kelompok	75,00	-	0,00	748,00	331,00	44,25
		Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani	Orang	10,00	-	0,00	1.400,00	600,00	42,86
3	Mengoptimalkan Kegiatan Kemitraan untuk Memantapkan Prasarana dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pameran/Promosi Produk Pertanian	Kali	-	-	-	8,00	4,00	50,00
		Kawasan Agribisnis Terpadu	Ha	-	-	-	500,00	-	0,00
4	Pengembangan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Keragaman Sumberdaya Lahan dan Air Melalui Pengelolaan Lahan dan Air Secara Berkelanjutan	Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan	Ha	-	-	-	68.791,00	59.945	87,14
		Meningkatnya Perluasan Areal Tanam	Ha	1.500,00	-	0,00	-	-	-
		Bertambahnya Luas Kawasan Rice Estate	Ha	200,00	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Pembangunan Jaringan Irigasi	Ha	1.375,00	-	0,00	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi	Ha	2.850,00	-	0,00	3.000,00	113,00	3,77
		Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru	Ha	3.500,00	-	0,00	-	-	-
		Legalisasi Kelembagaan P3A	Paket	2,00	-	0,00	-	-	-
		Optimalisasi Lahan Pertanian	Ha	-	-	-	1.000,00	-	0,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2014 sebesar Rp. 23.205.652.160,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.456.143.263,00 atau sebesar 92,62%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.236.325.474,00 atau sebesar 96,01% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 18.219.817.789,00 atau sebesar 91,86 %.
- Pagu Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2015 sebesar Rp. 20.320.733.430,00 atau menurun sebesar 12,43% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.36 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Profesionalisme Kelembagaan dan SDM Masyarakat	Jumlah Penyuluh Swadaya:							
		- KTNA	Kelompok	-	-	-	26,00	28,00	107,69
		- Pendamping Penas	Kelompok	-	-	-	9,00	9,00	100,00
		- P4S	Kelompok	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
		- PKSM	Kelompok	-	-	-	10,00	10,00	100,00
		- KTNA	Kelompok	-	-	-	30,00	40,00	133,33
		- Poktan	Kelompok	-	-	-	1.224,00	1.224,00	100,00
2	Meningkatnya Profesionalisme Kelembagaan dan SDM Penyuluh	- Gapoktan	Kelompok	-	-	-	125,00	125,00	100,00
		Jumlah Penyuluh Swadaya:							
		- PPL Peserta Bimtek	Orang	-	-	-	98,00	100,00	102,04
		- Penyuluh Berprestasi	Orang	-	-	-	9,00	9,00	100,00
		- PPL Yang Di Supervisi	Orang	-	-	-	95,00	95,00	100,00
		- PPL Peningkatan Kerja	Orang	-	-	-	95,00	95,00	100,00
		- PPL Penyusun Program	Orang	-	-	-	95,00	95,00	100,00
		- Petani PLTB	Petani	-	-	-	60,00	60,00	100,00
		- Operasional BP3K	Ops	-	-	-	9,00	9,00	100,00
		- Petani Lateks	Petani	-	-	-	30,00	32,00	106,67
		- Kajian BP3K	Kajian	-	-	-	9,00	9,00	100,00
		- Petani Gaharu	Petani	-	-	-	30,00	32,00	106,67
		- Petani Mangrove	Petani	-	-	-	30,00	32,00	106,67
3	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kelompok Tani/Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana:							
		- Kawasan Agribisnis	Kec	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- PPL	Orang	-	-	-	2,00	2,00	100,00
		- Petak KJA	Petak	-	-	-	8,00	8,00	100,0
		- PPL	Orang	-	-	-	15,00	15,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BP4K Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 sebesar Rp. 11.023.903.298,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.742.843.169,00 atau sebesar 97,45%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.101.719.980,00 atau sebesar 98,66% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.641.123.189,00 atau sebesar 95,17 %.
- Pagu Anggaran Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 sebesar Rp. 20.320.733.430,00 atau naik sebesar 14,31% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

[Handwritten signature]

2.2.37 Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan Kapasitas Perkembangan Kelembagaan IUPHHK	%	100,00	78,81	78,81	-	-	-
		Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT	%	100,00	54,02	54,02	100,00	65,55	65,55
		Pembinaan Teknis, Monitoring dan Rekonsiliasi PNB	%	100,00	56,35	56,35	100,00	82,01	82,01
		Pembangunan/Pengayakan Potensi HHHK dan Produk Unggulan	%	100,00	69,62	69,62	-	-	-
		Pembangunan HTR	%	100,00	78,85	78,85	100,00	83,48	83,48
2	Meningkatnya Kualitas Produksi Pertanian/Perkebunan	Pembangunan Kebun Entrys	%	100,00	99,16	99,16	100,00	85,58	85,58
		Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya	%	100,00	93,48	93,48	100,00	96,62	96,62
3	Meningkatnya Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	%	100,00	93,77	93,77	100,00	98,33	98,33
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	Pembinaan dan Identifikasi Kerusakan Hutan	%	100,00	63,21	63,21	100,00	98,33	98,33
		Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	%	100,00	79,67	79,67	100,00	79,32	79,32
		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	%	100,00	82,37	82,37	100,00	58,28	58,28

Handwritten signature and initials: "R 212"

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi	%	100,00	99,97	99,97	-	-	-
		Penyusunan Data Base Peta Geologi dan Sumberdaya Mineral	%	100,00	96,98	96,98	100,00	95,71	95,71

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2014 sebesar Rp. 17.312.616.203,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.181.660.434,00 atau sebesar 93,47%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.695.536.177,00 atau sebesar 96,20% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.486.124.257,00 atau sebesar 91,12 %.
- Pagu Anggaran Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2015 sebesar Rp. 15.844.679.387,00 atau menurun sebesar 8,48% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.38 Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Tercapainya Peningkatan Pruduksi Budidaya	Ton	1.684,00	2.366,80	140,55	1.852,00	2.802,72	151,33
2	Optimalisasi Produksi Sumberdaya Perikanan Tangkap Secara Terkendali	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.567,00	19.761,60	135,66	14.713,00	23.730,30	161,29
3	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Serta Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran	Unit	38,00	162,00	426,32	42,00	90,00	214,29
4	Menurunkan Tingkat Pelanggaran Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Serta Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir Meningkatkan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	Unit Kelompok	66,00 9,00	22,00 12,00	33,33 133,33	72,00 10,00	34,00 14,00	47,22 140,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 sebesar Rp. 15.670.848.535,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.782.183.126,00 atau sebesar 94,33%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.348.290.490,00 atau sebesar 98,45% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.397.892.636,00 atau sebesar 93,58 %.

- Pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp. 12.041.722.413,00 atau menurun sebesar 23,16% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.39 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Industri Kecil dan Menengah	Unit		27,00		30,00	30,00	100,00
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya	Unit Usaha				30,00	20,00	66,67
2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan Kemampuan Teknologi Industri	Unit		18,00		30,00	25,00	83,33
3	Penataan Struktur Industri	Tertatanya Struktur Industri	%		20,00		15,00	15,00	100,00
4	Pengembangan Sentra-Sentra Industri	Laju Pertumbuhan Industri	%		12,00		20,00	15,00	75,00
5	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah BPSK Kabupaten Kubu Raya Jumlah Kegiatan Fasilitas, Pelatihan dan Edukasi Serta Penyebaran Informasi	Unit Kegiatan	-	-	-	1,00	-	0,00
		Barang yang Diawasi	Jenis	-	20,00	-	25,00	25,00	100,00
		Akumulasi Jumlah PPNS-PK dan PPBJ	Orang	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00
		Nilai Ekspor		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Komoditi Unggulan Daerah		-	-	-	-	-	-
6	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Dokumen Ekspor dan Impor yang Dilayani	Dokumen	-	-	-	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Daerah	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Keg	-	18,00	-	20	20	100
8	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terselenggaranya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kali	-	-	-	-	-	-
9	Pengembangan Kelembagaan PKL	Terbentuknya Sebuah Atau Beberapa Lembaga Bagi PKL dan Pedagang	Lembaga	-	-	-	-	-	-
10	Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pedagang	Database Potensi Pedagang Yang Dinamis	Database	-	-	-	-	-	-
11	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	UTTP	-	605,00	-	650,00	673,00	103,54
		Jumlah Kompetensi Pengujian Dari SDM Metrologi	Kompe- tensi	-	9,00	-	9,00	-	0,00
		Data Base Kemetrologian	Kec	-	-	-	9,00	9,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 sebesar Rp. 5.218.642.187,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.696.427.473,00 atau sebesar 89,99%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.722.600.527,00 atau sebesar 94,26% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.973.826.946,00 atau sebesar 87,69 %.

- Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015 sebesar Rp. 8.336.976.530,00 atau naik sebesar 59,75% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

Jumlah keseluruhan Pagu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebesar Rp. 1.109.513.591.138,24 dengan realisasi sebesar Rp. 1.024.090.695.452,87 atau sebesar 92,30%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 493.222.571.957,00 atau sebesar 97,32%, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 536.542.663.594,00 atau sebesar 89,02%. Sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp. 1.197.204.323.695,00 atau naik sebesar 7,90% dari Pagu SKPD Tahun 2014.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga pendidik masih yang kurang di daerah pesisir atau terpencil baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK berdampak pada penangkapan pada bidang studi yang diajarkan;
- 2) Anggaran yang belum mencukupi berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan lomba siswa dan pendidik demi peningkatan kualitas pendidik baik ditingkat Kabupaten, provinsim maupun internasional;
- 3) Masih banyaknya gedung sekolah yang rusak terutama SD, kurang USB/RKB untuk SMP dan SMA/SMK;
- 4) Belum dilakukan analisis/ kajian dari aspek terkait beban kerja, aspek SDM, keuangan, serta prioritas visi dan misi;
- 5) Terdapat aparatur yang belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan terkait penempatannya.

2.3.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih Kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- 2) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta minimnya prasarana pendukung.
- 4) Masih adanya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan derajat kesehatan seperti kematian dan yang berhubungan dengan persalinan, masih terjadinya lonjakan penyakit seperti Demam berdarah pada Tahun 2014.

2.3.3 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penanganan terhadap potensi Sumber Daya Alam yang ada;
- 2) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- 3) Lemahnya/rendahnya kapasitas dan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan SPM salah satu belum masuk rencana Kerja Kerja yang telah ditetapkan, yaitu terkait dengan parameter penelitian kerusakan tanah akibat kegiatan pertanian, perkebunan dan hortikultura;
- 5) Gedung dan SDM Laboratorium Daerah belum ada, sementara sarana dan prasarana berupa kendaraan dan peralatan laboratorium dari anggaran DAK dan APBD Kabupaten Kubu Raya telah tersedia dan disimpan diruangan kantor Badan Lingkungan Hidup yang belum maksimal difungsikan.

2.3.4 Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi adalah :

A. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- 2) Koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
- 3) Kondisi jalan lingkungan kualitasnya masih rendah berupa jalan tanah/kerikil dalam kondisi rusak, kondisi jembatan/gertak yang ada masih memprihatinkan, sebagian besar belum memiliki jembatan yang layak untuk dilewati.
- 4) Pelayanan jaringan air bersih masih sangat terbatas dengan tingkat pelayanan dan kualitas yang masih sangat terbatas.
- 5) Volume sampah semakin besar.
- 6) Keterbatasan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah. TPA yang ada saat ini di Rasau Jaya dengan luas lahan 3,4 Ha sudah sangat tidak memadai.
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka melaksanakan tugas, seperti Keterbatasan jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah. Kondisi saat ini hingga Tahun 2014 jumlah dump truck sebanyak 6 unit, truck arm roll sebanyak 3 unit, semua armada tersbut dalam kondisi baik, namun untuk mengangkut seluruh volume sampah di Kabupaten Kubu Raya masih perlu penambahan armada.
- 8) Penerangan jalan umum masih sangat terbatas.

B. Dinas Bina Marga dan Pengairan

1) Pengembangan Kabupaten Kubu Raya

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan.

Pengembangan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan selama ini dirasakan belum optimal. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Kondisi awal saat pemekaran wilayah Kabupaten, jaringan jalan dan jembatan yang tersedia dalam kondisi rusak dan belum memiliki perkerasan;
- b. Panjang jalan yang belum sesuai dengan sebaran penduduk dan sistem aktivitas yang padat;
- c. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi sehingga mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat
- d. Sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah rawan banjir dan diperlukan konstruksi jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) agar kualitas jalan lebih tahan lama, namun konstruksi jalan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible pavement)/aspal.

2) Banjir

Banjir merupakan salah satu permasalahan akibat jaringan drainase dan saluran yang belum memadai di bidang kebinamargaan dan pengairan. Permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan :

- a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting yang diakibatkan oleh penyempitan saluran drainase dan sedimentasi pada saluran sungai;
- b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (Sungai);

- c. Belum terintergrasinya sistem jaringan drainase dari satu kawasan lainnya;
 - d. Naiknya koefisien aliran, akibat berkurangnya daerah resapan.
- 3) Keawetan Konstruksi Jalan
- Pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sebagian besar masih menggunakan metode manual sehingga hasilnya kurang sempurna baik terhadap kualitas dan umur konstruksi dibanding bila dilaksanakan dengan metode mekanis, sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat ketahanan konstruksi.
- 4) Daerah Perbatasan Antar Wilayah
- Daerah perbatasan antar wilayah, khususnya yang transportasinya dilayani dengan jalan lokal masih merupakan wilayah yang kurang mendapat porsi penanganan yang memadai dikarenakan sebagian besar daerah ini merupakan daerah yang belum berkembang. Dalam upaya mengembangkan pola pergerakan yang efisien dan bagian dari proses pemerataan pembangunan, daerah ini harus mendapat perhatian khusus.
- 5) Sungai
- Selama ini paradigma sungai sebagai bagian paling belakang dan kurang diperhatikan estetikanya. Paradigma ini harus diubah dan harus memperhatikan factor estetika dan sanitasi lingkungan sehingga dapat mendukung sektor pariwisata.
- 6) Masalah Sempadan Sungai
- Bangunan-bangunan liar di sempadan sungai merupakan penyebab kekumuhan dan gangguan aliran sungai. Pengumpulan (konglomerasi) permukiman kumuh banyak dimulai dari dua daerah ini. Membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganan kota karena sungai merupakan potret dari sebuah peradaban masyarakat kota.

7) Penggundulan Daerah Aliran Sungai

Kawasan terbuka di Daerah Aliran Sungai (DAS) harus sesegera mungkin untuk dihijaukan. Daerah Aliran Sungai yang gundul akan menimbulkan erosi dan pengikisan daerah tepian sungai sehingga terjadinya sedimentasi akibat erosi dan gerusan aliran sungai serta terjadinya pendangkalan badan sungai tersebut. Disamping itu, Daerah Aliran Sungai yang gundul juga akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat dan proses konsentrasi air di sungai lebih singkat dengan debit aliran yang lebih besar.

2.3.5 Urusan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tata bangunan dan lingkungan yang harmonis, serasi dan berkelanjutan;
- 2) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- 3) Masih sangat terbatasnya perangkat regulasi operasional dan sumber daya manusia dalam perizinan bangunan dan ~~pengendalian pemanfaatan ruang~~;
- 4) Masih rendahnya kendali aparat dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- 5) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya tanpa memiliki IMB;
- 6) Belum terjamahnya taman – taman kota, dan pemakaman yang ada, secara memadai, layak dan terjadwal.

2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan serta tantangan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan kebijakan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- 2) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);

- 3) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- 4) Kompetensi SDM perencana belum optimal;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 7) Belum lengkapnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
- 8) Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- 9) Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena SKPD belum menyampaikan laporan tepat waktu;
- 10) Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan;
- 11) Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

2.3.7 Urusan Perumahan

Permasalahan Urusan Perumahan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik, dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sangat minim, diantaranya ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan umum;
- 2) Masih banyaknya jumlah rumah tradisional masyarakat dalam kondisi yang tidak layak huni dan memerlukan pembenahan/penataan.

2.3.8 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor:

- 1) Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga terkait dengan pembinaan generasi muda;
- 2) Kurangnya minat peserta dalam mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten dikarenakan tidak dilaksanakannya seleksi setiap Tahun.

B. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan seleksi serta pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka) Tingkat Kabupaten;
- 2) Alokasi dana untuk kegiatan seleksi dan pemusatan latihan paskibra belum optimal;
- 3) Pihak sekolah sebagai sumber rekrutmen calon anggota paskibraka hendaknya melaksanakan seleksi tingkat sekolah sebelum dikirim ketingkat Kabupaten.

C. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi POPDA:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang terpusat dalam suatu kawasan sehingga beberapa cabang olahraga dilaksanakan di kota Pontianak.

D. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan TC serta Pengiriman Kontingen Kejurda:

- 1) Minimnya anggaran untuk memberi penghargaan kepada atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah;
- 2) Penghargaan belum bisa diberikan kepada atlet yang berprestasi.;
- 3) Masih lemahnya organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kubu Raya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu pengembangan olahraga.

E. Kegiatan Pemilihan Bhakti Pemuda Antar Provinsi/Jambore Pemuda Indonesia:

- 1) Minimnya peserta untuk mengikuti seleksi;
- 2) Tim seleksi belum memiliki buku panduan sebagai standar.

F. Kegiatan Hari Olahraga Nasional:

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga sehingga tempat kegiatan dilaksanakan di aula kantor Bupati dan masih dalam tahap perbaikan.

G. Kegiatan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Tinju (Ring Tinju):

- 1) Sarana dan prasarana olahraga cabang olahraga tinju yaitu berupa matras dan ring tinju, dikarenakan lamanya proses pengadaan dan Tekhnis Laporan serta dekatnya waktu penutupan kas akhir Tahun Daerah;
- 2) Tidak Bisa diserap karena pihak ketiga mengalami masalah teknis.

2.3.9 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya Peta Investasi;
- 2) Belum terjaringnya jumlah investasi secara riil;
- 3) Belum tersedianya buku neraca investasi daerah;
- 4) Penyelesaian izin melalui spipise yang masih terlambat.

2.3.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggaran :

~~Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;~~

- a) Belanja Jasa Administrasi Keuangan
- b) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
- c) ~~Penyediaan Alat Tulis Kantor~~
- d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

- e) Penyediaan makan dan minum rapat
- f) Pengadaan peralatan gedung kantor
- g) Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
- h) Pengadaan mebeleur
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Kondisi SDM

SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, karena pada Sekretariat dan Bidang masih ada yang belum mempunyai staf, sehingga masih banyak memerlukan tenaga honorer, disamping itu pengetahuan teknis PNS masih terbatas.

2.3.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1) Tenaga

Untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tenaga operator yang bertugas melayani pembuatan KTP, KK, dan Akta Pencatatan Sipil. Jumlah tenaga sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 13 orang Pejabat Struktural. Jumlah tenaga operator yang ada saat ini masih belum ideal untuk mencukupi kebutuhan pelayanan yang maksimal terhadap sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, juga terjadi kekurangan tenaga pengadministrasian umum, pulahta kepegawaian, dan arsiparis untuk membantu kelancaran administrasi surat-menyurat maupun kepegawaian.

2) Dana

Untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terkendala keterbatasan dana. Dana yang dimiliki anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ke sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.

3) Sarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki keterbatasan belum memiliki gedung kantor. Keberadaan gedung kantor saat ini merupakan gedung sewa berupa ruko. Sarana lain yang sangat diperlukan adalah kendaraan operasional untuk kegiatan pelayanan keliling yang dapat menjangkau kecamatan dan desa.

4) Network

Jaringan SIAK online yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini adalah jaringan yang dipinjamkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk jaringan online ke sembilan Kecamatan di Kab. Kubu Raya menggunakan jaringan milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya.

2.3.12 Urusan Ketenagakerjaan

~~Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:~~

- 1) Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar dan belum adanya data ril Ketenagakerjaan yang valid.

2.3.13 Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan data base Ketahanan Pangan untuk penyusunan Renstra pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kubu Raya masih belum sempurna;
- 2) Penyusunan data base potensi produksi pangan masih belum sempurna;
- 3) Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan (tingkat Kabupaten dan Kecamatan) belum dapat terlaksana dengan baik;
- 4) Pemanfaatan perkarangan sebagai sumber bahan pangan lokal belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat;
- 5) Sosialisasi terhadap pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif (pada hari pangan sedunia) belum secara menyeluruh di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya;

- 6) Belum semua program kegiatan pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan terbatasnya SDM dan dana yang tersedia;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, sehingga terhambatnya proses penyelesaian kegiatan, administrasi dan teknis di lapangan;
- 8) Untuk program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya bersumber dari dana Dekonsentrasi Provinsi Kalbar (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik sedangkan dana APBD kegiatannya berupa pembinaan dan pendampingan non fisik;
- 9) Perlunya dana sharing dari APBD dalam mendukung program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, pada kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat, Desa Mandiri Pangan serta Daerah Rawan Pangan terutama dalam pembinaan dan evaluasi; serta penguatan modal kelompok yang sudah berjalan;
- 10) Perlu adanya keberpihakan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebanyak 100 ton ekuivalen setara beras untukantisipasi bencana alam, banjir musim paceklik dan gagal panen.

2.3.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terbentuknya Unit Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan;
- 2) Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional;
- 3) Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD terkait cakupan Indikator rehabilitasi sosial, walaupun TIM jejaring telah terbentuk;
- 4) Terbatasnya anggaran yang tersedia atau belum tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Belum adanya sarana atau shelter untuk penampungan korban;

- 6) Sulitnya melakukan pengumpulan data, dikarenakan data yang dibutuhkan terkait dengan Kejaksaan Negeri, pengadilan Negeri dan Polres yang keberadaannya diluar wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- 7) Adanya 2 (dua) Polres pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPPA Polres Kota dan UPPA Polres Pontianak di Mempawah).

2.3.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB khususnya dalam penggunaan KB MKJP;
- 3) Masih kurangnya penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang dibiayai oleh APBD;
- 4) Masih kurangnya media luar ruang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang KB KS;
- 5) Masih kurang terkoordinirnya sistem pelaporan dari desa dan Kecamatan.

2.3.16 Urusan Perhubungan

Permasalahan Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya tenaga PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
- 3) Kesadaran PNS dalam melaksanakan Tupoksi belum optimal;
- 4) Pengawasan berjenjang dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
- 5) Fungsi koordinasi diantara Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
- 6) Terbatasnya Anggaran SKPD.

2.3.17 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Bandwith di Kominfo hanya 5 MB, sedangkan kebutuhan untuk melayani SKPD dan Kecamatan se-Kab Kubu Raya kurang lebih 50 MB;
- 2) Konektivitas jaringan antara SKPD tidak terkoneksi dengan baik;
- 3) Kurangnya fasilitas ruangan maintenance server dan sistem LPSE;
- 4) Kurangnya tenaga operator pengelolaan website Kubu Raya;
- 5) Kementerian Kominfo tidak melakukan koordinasi dalam mendistribusikan PLIK dan PLIK wifi di Kab. Kubu Raya;
- 6) Kekuatan sinyal program Teleinfo tuntas dari Kementerian Kominfo di Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya kurang maksimal sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat;
- 7) Perubahan SPK MPLIK dari PT. WEB terhadap pembiayaan membingungkan karena anggaran yang sudah terealisasi tak bisa digunakan, karena pasal pada SPK yang baru tidak memperbolehkan biaya operasional dibebankan pada APBD.

2.3.18 Urusan Pertanahan

Permasalahan Urusan Pertanahan adalah lambatnya penyelesaian penerbitan sertifikat hak pakai selama dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dikarenakan masalah personil seksi pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang terbatas dan alas hak atas tanah yang tidak ada sehingga sulit untuk mengajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

2.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Personalia terbatas (8 orang) berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang;
- 2) Terbatasnya sarana/prasarana kerja berdampak pada kecepatan dan ketepatan waktu kerja.

2.3.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Bagian Pemerintahan

Permasalahan Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya segmen batas antar daerah dan segmen batas wilayah kecamatan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, SDM yang memiliki kemampuan teknis serta waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- 3) Penegasan Batas Wilayah antar Daerah harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 4) Kesulitan dalam memperoleh data dari SKPD sebagai bahan penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 dan Memori Bupati Kubu Raya Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 serta batas batas waktu yang diberikan dalam penyampaian dokumen-dokumen tersebut;
- 5) Kesulitan dalam memperoleh data sebagai syarat kelengkapan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Pemekaran / ~~Pembentukan Kecamatan~~;
- 6) Belum terakomodir Program/Kegiatan dan anggaran fasilitasi kegiatan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Unsur Alami pada TA. 2013.

u
n
f
f

2. Bagian Hukum dan HAM

Permasalahan Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana tempat penyimpanan arsip/produk hukum;
- 2) Tidak tersedianya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan di daerah yang jauh;
- 3) Kurangnya fasilitas komputer, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan computer (komputer yang ada dalam keadaan rusak).

3. Bagian Umum

Permasalahan Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggaran yang dibutuhkan belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai program yang diminta;
- 2) Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang berada di Bagian Umum belum sesuai dengan kebutuhan terutama untuk penata taman, pramusaji baik di rumah Bupati dan Wakil Bupati maupun di lingkungan Kantor Bupati, serta untuk operator komputer;
- 3) Sarana dan prasarana untuk ruangan kami belum memenuhi standar, ruangan yang belum layak bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan dalam melaksanakan tugas sering mendapatkan hambatan.

4. Bagian Administrasi

Permasalahan Bagian Administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) ~~Tenaga honor dan jumlah honor yang dibayarkan bagi tenaga kerja non PNS di lingkungan Setda Kabupaten Kubu Raya masih belum mendekati UMP Provinsi Kalbar;~~
- 2) Masih adanya unit kerja tertentu / bagian jika mengirim surat menyurat tidak melewati bagian TU dan kepegawaian Bagian Administrasi;
- 3) Data yang diberikan oleh unit kerja / bagian masih belum valid sehingga menghambat penyelesaian penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 4) Anggaran untuk pemeliharaan rutin/berkala sistem komputerisasi dan santel sangat kurang;
- 5) Belum diberikan bimbingan teknis penataan arsip bagi pegawai di bagian administrasi.

5. Bagian Organisasi

Permasalahan Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan analisis jabatan (Anjab) serta masih kesulitan dalam menyusun Anjab;

- 2) Masih beberapa SKPD yang belum/terlambat dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja sehingga mempersulit dalam menyusun LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Renstra SKPD yang masih pada tahap verifikasi;
- 4) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara lengkap dan menyeluruh;
- 5) Ada beberapa SKPD yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Permasalahan Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional kerja;
- 2) Masih kurang tanggapnya SKPD dalam melaporkan pelaksanaan program dan kegiatannya dan koordinasi antara instansi terkait belum optimal;
- 3) Belum tersedianya dukungan database dan sistem informasi monitoring dan evaluasi dalam menyajikan data pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian dan pembangunan.

7. Bagian Kesejahteraan Sosial

Permasalahan Bagian Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;
- 2) Perlu penambahan dan perbaikan peralatan pendukung seperti Komputer PC serta Pengadaan Sistem Komputerisasi Data Base Hibah dan Bansos dengan tujuan keakuratan data dan meminimalisir kesalahan dalam hal pemberian bantuan sosial dan hibah.

8. Bagian Hubungan Masyarakat

Permasalahan Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 ini masih terbatas, sehingga untuk melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Bagian Humas masih belum dapat optimal;
- 2) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;
- 3) Perlu peningkatan kualitas SDM pada Bagian Humas dengan memberikan kesempatan mengikuti diklat bidang kehumasan, fotografi, editing dan lainnya;
- 4) Perlu penambahan peralatan pendukung seperti tripod kamera, lampu sorot kamera video, media penyimpanan digital, PC pengelola dan penyimpan data, dan lainnya;
- 5) Perlu kendaraan operasional berupa mobil dinas untuk kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemkab Kubu Raya.

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah

Permasalahan Urusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan dan tantangan internal
 - a. Sumber daya manusia yang terbatas baik segi jumlah maupun kualitas;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung terutama ruang kerja yang belum dapat menampung seluruh pegawai DPPKAD.
- 2) Permasalahan dan tantangan eksternal
 - a. Belum tertib dan belum disiplinnya SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Adanya peningkatan beban kerja secara signifikan, sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan maupun peningkatan anggaran Pemerintah Kabupaten.

10. Sekretariat DPRD

Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2014 sudah memadai, hal ini terkait dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Plapond dan kebijakan Anggaran yang ada walaupun pada kegiatan tertentu ada yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
- 2) Sumber Daya Manusia.
Kondisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPRD masih kurang terutama pada Bidang Risalah dan Persidangan, sedangkan bagian teknis lainnya yaitu Bagian Umum dan Aparatur serta Keuangan dari jumlah data Kepegawaian yang ada perlu penambahan Personil untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas.
- 3) Sarana dan Prasarana.
Dari segi sarana dan Prasarana masih perlu ditambah berkaitan dengan kondisi Ruang Sidang dan Ruangan lain dilantai 3 (Tiga) masih terasa sempit atau kurang luas yang mana untuk anggota Fraksi-Fraksi, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Perda belum tertampung pada suatu ruangan yang luas dan memadai.
- 4) Permasalahan Internal dan Eksternal
Pada dasarnya dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya yang baru maka untuk lingkungan kantor yang ada seperti sekarang dapat kita maklumi hubungan Internal sudah cukup baik dan hubungan dengan pihak luar juga baik, hanya perlu peningkatan pada masa yang akan datang.
- 5) Untuk kantor dibuat pada lokasi yang lebih memadai dan permanen, Kantor DPRD seperti kita lihat pada daerah-daerah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

ph
n
f
t

11. Inspektorat Daerah

Permasalahan Urusan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian tugas pemeriksaan regular belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sebagaimana telah di atur dalam PKPT;

- 2) Beberapa lokasi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua, terutama pada musim penghujan, sehingga pemeriksaanya ditunda atau belum diperiksa;
- 3) Sarana kendaraan roda empat, roda dua, kendaraan air dan peralatan lainnya (peralatan untuk uji kualitas bangunan/jalan, dll) untuk menunjang tugas kelapangan sangat terbatas/belum tersedia;
- 4) Sarana komputerisasi dirasakan masih sangat terbatas terutama Komputer Jinjing (Laptop) untuk digunakan para pemeriksa dilapangan belum tersedia;
- 5) Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kwalitasnya masih belum memadai dan perlu ditingkatkan;
- 6) Obyek pemeriksaan (Objek) kadang-kadang terlambat menanggapi hasil pemeriksaan (temuan) yang disebabkan kurangnya keseriusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya penilaian terhadap kinerja APIP dan keterlambatan pembuatan LHP;
- 7) Lambannya obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

pu
n
f
f

12. Badan Kepegawaian Daerah

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan kepegawaian adalah belum terselesaikannya permasalahan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kubu Raya (CPNS) Tahun 2010 dan hasil seleksi ulang CPNS yang dilaksanakan pada Tahun 2012.

13. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM, yang memadai baik kualitas maupun kuantitas;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
- 3) Kesejahteraan yang kurang, dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dihadapi;

- 4) Belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan Urusan Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib;
- 2) Masih kurangnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal;
- 3) Belum terselenggaranya upaya pemenuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Belum terbentuknya system koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten peningkatan kualitas aparatur/SDM serta peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

u
n
R
K

15. Kecamatan Sungai Raya

Permasalahan Kecamatan Sungai Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, kegiatan.

16. Kecamatan Sungai Kakap

Permasalahan Kecamatan Sungai Kakap adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil, terbatasnya sumber daya manusia sehingga terkendalanya dalam memproses laporan.
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.

- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

17. Kecamatan Sungai Ambawang

Permasalahan Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Aparatur

Masih terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada PNS dan masyarakat. Masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan, wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia saat ini belum memadai, seperti peralatan komputer, meubelair, sarana telekomunikasi, dan kendaraan operasional sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pelayanan dan pembinaan kepada PNS dan masyarakat. Masih kurangnya dukungan pengadaan sarana dan prasarana kerja dari pemerintah tingkat atas sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

3) Pembiayaan

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Langsung (program dan kegiatan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Tidak Langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

18. Kecamatan Kuala Mandor B

Permasalahan Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya SDM personil/staf yang dibutuhkan di kecamatan baik secara kuantitas mau pun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan ;
- 3) ~~Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.~~

19. Kecamatan Rasau Jaya

Permasalahan Kecamatan Rasau Jaya adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (Personil) yang belum memadai;
- 2) Proses Pelaksanaan Kegiatan maupun penyusunan laporan cenderung lamban sehingga menghambat penyerapan dana anggaran untuk kegiatan dan memperlambat kegiatan;
- 3) ~~Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.~~

20. Kecamatan Teluk Pakedai

Permasalahan Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Wilayah
Keadaan wilayah/medan Kecamatan Teluk Pakedai terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dan sungai, lokasi pemukiman penduduk di sekitar pegunungan cukup jauh, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sungai ~~sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas lapangan~~ dan memerlukan waktu, biaya yang besar, serta tidak semua jenis pertanian/ dapat berkembang dengan baik karena jenis tanah yang terdapat di dataran rendah yaitu gambut.
- 2) Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama ~~dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan~~

pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Teluk Pakedai.

3) Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja/berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai, seperti jalan, jembatan, listrik, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa sungai Nibung, Desa Kuala Karang, Tanjung Bunga, sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya.

5) Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih relative rendah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil / pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat.

6) Dukungan Pembiayaan, Personil dan Perlengkapan Kerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan pembiayaan, personil dan perlengkapan kerja. Alokasi ketiga faktor tersebut.

7) **Batas Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat**

Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Teluk Pakedai baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi.

21. Kecamatan Kubu

Permasalahan Kecamatan Kubu adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

22. Kecamatan Terentang

Permasalahan Kecamatan Terentang adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

23. Kecamatan Batu Ampar

Permasalahan Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan, listrik yang belum nyala 24 jam dan kelengkapan kerja.

2.3.21 **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Anggaran :

Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesenkretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

- a. Belanja Jasa Administrasi Keuangan
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan makan dan minum rapat
- f. Pengadaan peralatan gedung kantor
- g. Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
- h. Pengadaan mebeleur
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Kondisi SDM

Untuk SDM di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, pada eselon IV kekurangan 2 jabatan struktural yang sampai Desember 2014 belum terisi. Sedangkan jumlah pegawai BPMPD yang berjumlah 23 orang masih dianggap kurang. Untuk mengatasi kekurangan staf tersebut dengan merekrut beberapa tenaga honorer untuk diperbantukan di Sekretariat dan bidang.

3) Lingkungan Internal

Untuk hubungan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya sangat baik dan rasa kekeluargaan.

4) Lingkungan Eksternal

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya untuk koordinasi dengan Legeslatif, antar SKPD Kabpaten, Provinsi dan pusat dalam rangka koordinasi dan konsultasi berjalan baik dan tidak ada permasalahan. Demikian dengan Aparatur Pemerintahan di Desa berlangsung baik dalam

rangka pembinaan pemberdayaan pemerinnntah dan masyarakat desa.

2.3.22 Urusan Sosial

Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Sosnakertrans;
- 2) Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang riil di Kabupaten Kubu Raya.

2.3.23 Urusan Kebudayaan

Permasalahan Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum terakomodirnya para pekerja seni, budayawan, yang berprestasi sedangkan mereka perlu sebuah penghargaan khusus dari pemerintah setempat;
- 2) Dalam pelaksanaanya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum dapat menampilkan seluruhnya kesenian yang berakar pada tradisi dikarenakan terbentur oleh keterbatasan dana yang dimilikinya. Untuk menampilkan kesenian tradisional berbentuk seni tari dan music tradisional;
- 3) Kurangnya berbagai elemen suku yang berada di Kab. Kubu Raya dalam peran serta pada kegiatan pagelaran lintas budaya dikarenakan keterbatasan waktu yang dinilai kurang siap oleh para paguyuban keluarga besar suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Kurangnya penghargaan yang diperoleh para pelaku seni dan ruang pengapresiasian karya seni yang telah dihasilkan oleh sanggar dan para pekerja seni;
- 5) Budaya dan kesenian tradisional semakin punah, banyak orang mulai melupakan atau bahkan tidak mengetahui ragam seni budaya, maka sesuai program dan kegiatan yang ada di bidang kebudayaan, agar dapat mengenalkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah;
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat akan kekayaan budaya berupa barang peninggalan sejarah dan asset budaya baik benda dan tak benda.

2.3.24 **Urusan Statistik**

Permasalahan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Data PDRB dan Kabupaten Dalam Angka belum bisa tersaji pada Tahun berjalan;
- 2) Pemerintah daerah masih tergantung terhadap data-data BPS, dalam kaitanya dengan perencanaan pembangunan daerah tidak semua data dapat disediakan oleh BPS;
- 3) Keterlambatan mitra kerja dalam hal ini BPS dalam menyelesaikan produk pekerjaan;
- 4) Sering terjadi perbedaan data antara BPS dengan SKPD di Pemerintahan Kabupten Kubu Raya;
- 5) Jarangnya sinkronisasi antara BPS dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.25 **Urusan Kearsipan**

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) ~~Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di~~ Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakaan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
- 4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.26 Urusan Perpustakaan

Permasalahan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakaan pada Kantor ~~Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya~~ tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
- 4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.27 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2014 telah tercapai, diantaranya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap, pengolahan hasil perikanan serta peningkatan sarana dan prasarana perisisir telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi pencapaian indikator kinerja ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat perikanan karena peningkatan pendapatan masyarakat masih rendah karena usaha yang dimiliki masyarakat pembudidaya ikan pada umumnya masih skala kecil;
- 2) Sarana dan prasarana dinas perikanan yang diserahkan kepada ~~masyakat banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal~~;
- 3) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu dinas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat

perikanan. Salah satu program yang ada adalah pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan bantuan kepada masyarakat perikanan, yang menjadi masalah saat ini adalah jumlah usulan yang diajukan masyarakat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan masih banyak yang belum dapat diakomodir karena terbatasnya jumlah anggaran yang ada;

- 4) Terbatasnya jumlah SDM khususnya staf, karena itu dalam penyelesaian pekerjaan banyak yang belum tepat waktu dan banyak kegiatan yang baru dapat diselesaikan pada akhir Tahun.
- 5) Masih banyak Desa yang belum memiliki Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2.3.28 Urusan Pertanian

Permasalahan Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

- 2) Masalah Sarana dan Prasarana

Di samping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

- 3) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

2.3.29 Urusan Kehutanan

Permasalahan Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya upaya pemberian peran kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- 2) Kemampuan pasokan produksi kayu bulat dari hutan alam semakin berkurang yang berimbas banyaknya industri pengolahan kayu yang tutup;
- 3) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan;
- 4) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan, perkebunan dan pertambangan;
- 5) Masih sering terjadi gangguan keamanan hutan (illegal logging, kebakaran hutan) maupun klaim terhadap lahan perkebunan oleh masyarakat;
- 6) Adanya kecenderungan konflik sosial antara masyarakat didalam dan sekitar hutan dengan pelaku usaha dibidang kehutanan dan perkebunan;
- 7) Tingkat ekonomi sosial masyarakat sekitar hutan masih rendah;
- 8) Belum adanya komitmen yang kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran dibidang kehutanan dan perkebunan;
- 9) Kemampuan dan potensi hasil perkebunan dalam memenuhi kebutuhan industri dan mengakomodir kebutuhan lokal masyarakat belum tercukupi dengan baik dan belum terkelola dengan azas manfaat;
- 10) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- 11) Kebakaran hutandan lahan masih sering terjadi dimusim kemarau dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan atau penyiapan lahan pertanian dengan cara membakar;
- 12) Rehabilitasi hutan melalui program belum dapat mengimbangi laju kerusakan hutan dan rehabilitasi lahan masih bertumpu pada dana yang dikucurkan oleh pemerintah sehingga pengurangan lahan kritis berjalan lambat;
- 13) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan;

- 14) Pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengembangan pemanfaatan hasil perkebunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- 15) Keberadaan fungsi kawasan hutan masih kerap berbenturan dengan masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan;
- 16) Usaha pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa rotan, damar, kulit medang dan lain-lain masih memiliki potensi untuk dikembangkan namun belum digali dan dikelola dengan baik;
- 17) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 18) Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

2.3.30 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- 1) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang pertambangan.
- 2) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan.
- 3) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan pertambangan.

2.3.31 Urusan Pariwisata

Permasalahan Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Promosi (Arakan Pengantin)

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Promosi ini (Festival Arakan Pengantin) merupakan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2014 yang menjadikannya terlalu mendadak untuk dilaksanakan sehingga waktu untuk melakukan persiapan dalam mengikuti kegiatan ini menjadi terlalu sempit.

2) Kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi ini adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah masalah Plotting Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menampilkan hiburan musik tersebut masih belum terakomodir.

3) Kegiatan Pengembangan Desain Kreatif

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desain Kreatif ini tidak mengalami kendala yang berarti, hanya saja dalam proses pencetakan terhambat karena file Desain dengan hasil yang diaplikasikan kemesin cetak mengalami perubahan sehingga harus di Desain ulang untuk menyesuaikan lagi, belum adanya usaha cetak batik di Kabupaten Kubu Raya sehingga proses pencetakan sedikit mengalami kesulitan karena harus mencetak di luar Kabupaten Kubu Raya.

4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek Pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Hambatan :

Belum adanya pengelolaan terhadap objek dan atraksi wisata di Kabupaten Kubu Raya serta kurangnya koordinasi dengan lembaga/dunia usaha.

5) Penyusunan rencana pengembangan wisata Gunung Ambawang

Hambatan :

Belum terencananya pengembangan objek wisata yang difokuskan pada wisata alam untuk pemanfaatan keasrian alam dan aksesibilitas yang kurang memadai.

6) Kajian potensi dan peluang Investasi Pariwisata Daerah KKR

Hambatan :

Berdasarkan hasil Analisis yang telah dilakukan pada 3 (tiga) objek Wisata Unggulan Kabupaten Kubu Raya, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih minimnya Atraksi Wisata yang ditawarkan pada masing-masing objek Wisata yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Rendahnya akses menuju objek Wisata terutama Pantai Paloh Nibung dan Gunung Ambawang.

3. Minimnya sarana Wisata di objek-objek Wisata di Kabupaten Kubu Raya mulai dari sarana pokok, sarana pelengkap hingga sarana penunjang Pariwisata.
- 7) Valuasi Ekonomi Pembangunan Pariwisata KKR
Hambatan :
Kurangnya usaha kecil pada sektor Pariwisata yang berdampak pada penggandaan pendapatan ekonomi Pariwisata.
- 8) Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Hambatan :
Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan pengiriman kontingen Promosi Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Explore Exotica Of Borneo yang diselenggarakan di Anjungan Kalimantan Selatan TMII Jakarta Tahun 2014 ini adalah kurangnya anggaran dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 9) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Hambatan :
Dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2014 ada beberapa hambatan dan kendala tetapi dapat diantisipasi dengan melibatkan Duta-duta Wisata Kabupaten Kubu Raya yang dikenal dengan nama GEMA, hanya saja peserta yang dikirim dari Kecamatan banyak yang tidak memenuhi persyaratan diantaranya kurangnya tinggi badan yang sudah ditentukan oleh Tingkat Nasional.
- 10) Monitoring dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan di bidang Pariwisata
Hambatan :
 1. Kurangnya kuantitas SDM untuk menangani perizinan saat turun lapangan.
 2. Belum maksimalnya penyampaian laporan tingkat hunian kamar (THK) dari pengusaha hotel kepada dinas.

2.3.32 Urusan Industri

Permasalahan Urusan Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM masih minim karena masih banyak pelaku IKM belum terbina;

- 2) Tidak maksimalnya penyerapan uji analisa laboratorium dan belanja bahan percontohan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER5/2009 tentang ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa. Arahan dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

2.3.33 Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyak agenda pameran yang tidak dapat diikuti karena anggaran tidak mencukupi untuk memehui semua undangan kegiatan pameran;
- 2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, tidak maksimalnya penyerapan dikarenakan kesulitan dalam hal mencari pihak kompeten sebagai tenaga ahli dalam tim monitoring gula terpadu;
- 3) Belum terlasananya penataan PKL yang diharapkan dapat berdagang dengan lokasi yang layak;
- 4) Belum terdatanya seluruh PKL dan pedangan tradisional di Kubu Raya dengan akurat.

2.3.34 Urusan Ketrasmigrasian

Permasalahan Urusan Ketrasmigrasian adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya kuantitas dan terbatasnya SDM yang ada, bila dibandingkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosnakertran Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Minimnya anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan Dinas.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 serta proyeksi perekonomian tahun 2016 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kubu Raya berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai langkah antisipasi dan informasi penting arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 harus menggambarkan:

- a. Asumsi indikator makro ekonomi daerah.
- b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Sesuai dengan sasaran nasional kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, untuk itu konsep pembangunan ekonomi yang pro poor, pro job dan pro growth akan terus dilanjutkan.

Pertumbuhan ekonomi didorong untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan minat investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor tetap diupayakan dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dalam maupun luar negeri dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, dan diupayakan memberikan insentif dan kemudahan investasi, harmonisasi kebijakan di semua tingkatan dan sektor, mendorong fasilitasi pembiayaan, memberikan fasilitasi ekspor.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan ragam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan. Implementasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dalam bentuk indikator makro sangat diperlukan untuk melihat gambaran tentang kondisi suatu daerah yang dilihat dari perspektif masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, serta perkembangan kinerja perekonomian daerah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi. Adapun Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

NO	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas	5,99	3,03
2.	Bengkayang	6,04	2,30
3.	Landak	6,21	3,24
4.	Mempawah	5,08	5,66
5.	Sanggau	6,04	0,78
6.	Ketapang	6,97	4,70
7.	Sintang	6,34	4,03
8.	Kapuas Hulu	6,01	1,51
9.	Sekadau	6,71	1,44
10.	Melawi	6,73	3,99
11.	Kayong Utara	6,00	4,66
12.	Kubu Raya	6,79	9,26
13.	Kota Pontianak	6,91	6,12
14.	Kota Singkawang	6,36	4,59
Kalimantan Barat		6,50	4,03

Sumber: Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya lebih tinggi diatas rata-rata Kalimantan Barat dan berada di peringkat ke 3 (tiga) setelah Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Perekonomian Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan angka lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 6,51% pada tahun 2011, tahun 2012 mencapai 6,69% dan mencapai 6,79% pada tahun 2013 serta tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat.

Akan tetapi pertumbuhan positif perekonomian Kabupaten Kubu Raya tidak diiringi dengan penanggulangan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai angka 9,26 % karena mengalami trend naik yakni dari 4,52 % pada Tahun 2011, Tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,06 %. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kubu Raya perlu mendapat perhatian yaitu sebagian besar atau sekitar 31,01% penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja tidak mendapatkan upah secara resmi, dan produktivitasnya juga cenderung belum/kurang optimal. Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya menempati urutan tertinggi di Kalimantan Barat.

Selain upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka, upaya untuk menurunkan penduduk miskin juga akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Upaya tersebut akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaanya dengan akses dan harga terjangkau.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan. Berbagai perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan.

Dengan demikian prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2016, secara umum tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap diusahakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 6,79 %, dan Tahun 2016 diharapkan relatif tidak jauh berbeda, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun 2015 adalah sebesar 6,90% dan 7,00 % untuk Tahun 2016.

Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,00% pada Tahun 2016 tersebut, tidak semata-mata sekedar pertumbuhan dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan-kabupaten) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Ditargetkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 6,27%.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan tingkat pengangguran.
- d. Upaya pencapaian dari sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tujuan MDG's, Standar Pelayanan Minima (SPM), Food Estate serta penanganan komoditi unggulan secara signifikan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan memecahkan permasalahan penting dan mendesak menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sektor), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2016 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur,

maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan pokok-pokok kebijakan suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya. Secara umum pokok-pokok kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016, didasarkan pada :

- a. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan kegiatan yang mendukung *program pro growth, pro poor, pro job dan pro enviroentment*.
- b. Pelaksanaan kebijakan keuangan didasarkan pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan penggunaanya diarahkan kepada upaya mengatasi masalah pembangunan dengan intensitas keterdesakan tinggi, yang menjadi kendala utama pembangunan.
- c. Kebijakan Keuangan Daerah mengedepankan keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Keuangan daerah dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh pengeluaran maupun penerimaan.
- f. Meningkatkan peran redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antardaerah, atau antar golongan pendapatan.

- g. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada upaya menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- h. Keuangan daerah harus dapat memberikan keleluasaan kepada para pelaksananya untuk memaksimumkan pengelolaan dananya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk seluruh siklus anggaran pengelolaan keuangan daerah harus taat azas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggung-jawabannya baik dalam kerangka hukum maupun dalam kerangka administrasi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2013-2015 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengingat besarnya potensi perolehan PAD Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berakibat pada penciptaan ekonomi biaya tinggi, inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Upaya peningkatan pendapatan daerah selain *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- b. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya diprediksi mengalami peningkatan sebesar 10% tiap tahunnya.

Realisasi dan proyeksi target Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	64.277.117.327,27	97.407.483.796,39	98.150.899.043,10	109.146.737.946,00	127.651.145.302,93
1.1.1	Pajak Daerah	48.513.648.885,95	64.729.599.444,05	80.488.049.986,00	90.552.299.983,00	104.672.616.268,09
1.1.2	Retribusi Daerah	11.575.759.260,00	25.180.126.655,62	7.074.697.775,00	8.006.286.680,00	9.208.913.590,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.756.499,13	563.736.663,41	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	3.576.303.498,32
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.020.952.682,19	6.934.021.033,31	7.838.151.282,10	7.838.151.282,10	10.193.311.945,63
1.2	Dana Perimbangan	774.980.539.716,00	841.715.445.482,00	913.894.089.000,00	913.894.089.000,00	913.894.089.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.438.716,00	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	627.894.391.000,00	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.923.710.000,00	82.076.280.000,00	103.521.030.000,00	124.602.430.000,00	124.602.430.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	116.410.365.638,00	153.166.891.640,91	227.153.417.351,90	230.581.995.000,00	230.581.995.000,00
1.3.1	Hibah	1.380.802.021,00	410.910.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.174.451.617,00	27.118.612.640,91	56.784.669.956,90	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.724.000.000,00	30.474.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	73.131.112.000,00	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00
A	JUMLAH PENDAPATAN	955.668.022.681,27	1.092.289.820.919,30	1.218.198.405.395,00	1.253.622.821.946,00	1.272.127.229.302,04

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Sedangkan Target Pendapatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3

Target Pendapatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	14.843.909.619,00	88.138.698.876,80	94.308.407.744,21	100.909.996.286,90	107.973.639.025,72
1.1.1	Pajak Daerah	8.902.316.568,20	47.122.347740,00	50.420.912.082,00	53.950.375.928,00	57.726.902.242,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.219.980.489,00	10.831.710.970,00	11.589.930.738,00	12.401.225.890,00	13.269.311.702,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.721.612.561,80	30.184.640.166,80	32.297.564.924,21	34.558.394.468,90	36.977.482.081,72
1.2	Dana Perimbangan	623.799.571.814,020	837.455.694.000,00	921.263.400.000,00	100.909.996.286,90	1.114.653.527.704,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.922.298.160,00	55.678.984.000,00	61.246.882.400,00	67.371.570.640,00	74.108.727.704,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	549.838.274.854,00	699.700.430.000,00	769.670.473.000,00	846.637.520.000,00	931.301.272.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.038.998.800,00	82.076.280.000,00	90.283.908.000,00	99.312.298.000,00	109.243.528.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.003.513.049,20	144.403.606.735,00	191.810.967.408,00	210.992.064.149,00	232.091.270.534,00
1.3.1	Hibah	10.980.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.700.858.049,20	56.525.330.000,00	62.177.863.000,00	68.395.649.300,00	75.235.214.200,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	10.321.905.000,00	0,00	0,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	30.000.000,00	33.000.000.000,00	36.300.000.000,00	39.930.000.000,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	0,00	87.848.276.735,00	96.633.104.408,00	106.296.414.849,00	116.926.056.334,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	JUMLAH PENDAPATAN	671.646.994.482,20	1.069.997.999.611,80	1.207.320.638.552,21	1.325.223.449.075,90	1.454.718.494.263,72

Sumber : *) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014

**) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

Dari Tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 955.668.022.681,27 atau naik sebesar 42,29% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 671.646.994.482,20 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.277.117.327,27 atau naik sebesar 333,02% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun

2009-2014 sebesar Rp. 14.843.909.619,00. Dana Perimbangan Rp. 774.980.539.716,00 atau naik sebesar 24,24% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 623.799.571.814,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 116.410.365.638,00 atau naik sebesar 252,72% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 33.003.513.513.049,20.

Tahun 2015 target pendapatan sebesar Rp. 1.264.418.153.000,00 atau naik sebesar 4,73% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21. dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 98.157.399.043,10 atau naik sebesar 4,08% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 94.308.407.744,21, Dana Perimbangan Rp. 913.894.089.000,00 atau turun sebesar 0,79% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 921.201.263.400,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 252.366.664.956,90 atau naik sebesar 31,57%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 191.810.967.408,00.

Tahun 2016 proyeksi target pendapatan sebesar Rp. 1.253.622.821.946,00 atau turun sebesar 5,40,% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Berkurangnya target pendapatan Tahun 2016 ada pada komponen dari Dana Perimbangan dikarenakan pada Tahun 2016 masih mengikuti angka Tahun 2015 sebesar Rp. 913.894.089.000,00 atau berkurang 9,81% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.013.321.388.640,00. Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 proyeksi sebesar Rp. 109.146.737.946,00 atau naik sebesar 8,16% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 100.909.996.286,90, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah proyeksi sebesar Rp. 230.581.995.000 atau naik sebesar 9,28%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 210.992.064.149,00. Sedangkan Tahun 2017 proyeksi target pendapatan sebesar Rp. 1.272.127.229.302,04 atau turun sebesar 12,55,% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang menargetkan sebesar Rp. 1.454.718.494.263,72. Berkurangnya target pendapatan Tahun 2016 ada pada komponen dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dearah Yang Sah dikarenakan pada

Tahun 2017 masih mengikuti angka Tahun 2016 sebesar Rp. 1.144.476.084.000,00 atau turun sebesar 15,02% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.346.744.798.238,00. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 127.651.145.302,04 atau naik sebesar 18,22% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang hanya sebesar Rp. 107.973.696.025,72.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan Belanja Langsung.

Belanja Daerah yang akan disusun dalam Alokasi Belanja Tak Langsung dan Alokasi Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

- a. Tujuan, Sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
- b. Indikator kinerja harus jelas;
- c. Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus tetap memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin

dicapai, dan diprioritaskan kepada strategi untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 yaitu:

- a. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas;
- c. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Daerah;
- d. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini :

Handwritten signature or initials in blue ink.

Tabel 3.4

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	564.527.250.044,00	618.749.667.806,31	618.749.667.806,31
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.663.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	51.728.720.495,00	124.312.653.000,00	124.312.653.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.854.901.789,60	522.075.355.561,23	623.795.970.539,00	758.812.320.806,31	758.812.320.806,31
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	45.297.946.626,00	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	202.234.525.117,00	-	-

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	402.917.806.986,00	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	461.487.906.788,00	509.807.831.069,00	650.450.278.729,00	550.753.968.700,00	686.174.753.269,00
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	948.342.808.577,60	1.031.883.186.630,23	1.274.246.249.268,00	1.288.320.919.757,00	1.444.987.074.075,31
	Surplus/(Defisit)	7.325.214.103,67	60.406.634.289,07	(56.047.843.873,00)	(64.672.097.811,00)	(202.833.844.773,27)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Sedangkan Target Pendapatan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Target Belanja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Belanja Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	533.014.991.714,00	444.158.038.679,00	488.573.842.547,00	537.431.226.802,00	591.174.349.482,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.075.916.500,00	24.102.000.000,00	24.584.000.000,00	25.075.000.000,00	25.577.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.280.281.709,00	6.067.000.000,00	6.370.000.000,00	6.688.000.000,00	7.023.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.118.060.200,00	25.519.680.000,00	27.306.057.000,00	29.217.481.000,00	31.262.705.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.196.150.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	1.200.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	577.685.400.123,00	500.146.718.679,00	547.433.899.547,00	599.311.707.802,00	656.237.054.482,00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	19.614.405.536,00	47.385.176.742,00	49.754.435.579,00	52.242.157.358,00	54.854.265.225,00

NO	Uraian	Jumlah Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Realisasi 2013 *)	Realisasi 2014 **)	Target 2015 **)	Proyeksi 2016 **)	Proyeksi 2017 **)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.888.435.864,00	209.778.988.022,04	230.756.886.824,21	253.832.575.506,90	279.215.833.058,00
2.2.3	Belanja Modal	146.129.585.063,00	373.641.971.060,00	379.375.416.602,00	419.837.008.409,00	464.411.341.499,00
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	250.632.426.463,00	630.806.135.824,04	659.886.739.005,21	725.911.741.273,90	798.481.439.782,00
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	828.317.826.586,00	1.130.952.854.503,04	1.207.320.638.552,21	1.325.223.449.075,90	1.454.718.494.264,00
	Surplus / (Defisit)	(156.670.832.103,80)	(60.954.854.891,24)	0,00	0,00	(0,28)

Sumber : *) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014

***) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 948.342.808.577,60 atau naik sebesar 14,49% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 828.317.826.586,00. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 486.854.901.789,60 atau turun sebesar 15,72% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 577.685.400.123,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 461.487.906.788,00 atau naik sebesar 84,13% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 250.632.426.463,00.

Tahun 2015 jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 1.299.459.496.873,00 atau naik sebesar 7,63% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 640.035.218.144,00 atau naik sebesar 16,92% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 547.433.899.547,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 659.424.278.729,00 atau turun sebesar 0,07% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 659.886.739.005,21.

Tahun 2016 Proyeksi jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 1.444.987.074.075,31 atau naik sebesar 9,04% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Proyeksi Belanja tidak langsung sebesar Rp. 758.812.320.806,31 atau naik sebesar 26,61% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 599.311.707.802,00. Proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp. 686.174.753.269,00 atau turun sebesar 5,47% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 725.911.741,273,90. Dan Proyeksi Tahun 2017 masih mengikuti proyeksi belanja Tahun 2016.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.

Revisi

Tabel 3.6

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,00	1.599.417.546,39	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,00	1.599.417.546,39	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	1.470.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.523.626.000,00	7.000.000.000,00	3.970.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	885.413.026,65	1.210.627.130,32	57.647.261.419,00	(6.500.000.000,00)	(6.500.000.000,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Jumlah pengeluaran pembiayaan netto Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 885.413.026,65 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 34.409.039.026,65 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 33.523.626.000,00. Tahun 2014 jumlah pengeluaran pembiayaan netto sebesar Rp. 1.210.627.130,32 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 8.210.627.130,32 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 56.047.843.873,00 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 60.017.843.873,00 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.970.000.000,00 sedangkan untuk proyeksi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp. 6.500.000.000,00 dari jumlah pengeluaran pembiayaan.

Dari jumlah realisasi pendapatan dikurangi jumlah realisasi belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 terdapat Surplus sebesar Rp. 7.325.214.103,67 begitu juga Tahun 2014 Surplus sebesar Rp. 60.406.634.289,07. Tahun 2015 sementara sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 masih terdapat defisit sebesar Rp. 56.047.843.873,00 yang diakibatkan dari target pendapatan yang belum tercapai dari target pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Proyeksi Tahun 2016 Surplus sebesar Rp. 6.500.000.000,00. Sedangkan Sisa Silpa Tahun 2013 sebesar Rp. 8.210.627.130,32 dan Tahun 2014 sebesar Rp. 633.042.353.907,78.

Untuk lebih jelas Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Handwritten signature or initials in blue ink.

Tabel 3.7

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	64.277.117.327,27	97.407.483.796,39	98.150.899.043,10	109.146.737.946,00	127.651.145.302,93
1.1.1	Pajak Daerah	48.513.648.885,95	64.729.599.444,05	80.488.049.986,00	90.552.299.983,90	104.672.616.268,09
1.1.2	Retribusi Daerah	11.575.759.260,00	25.180.126.655,62	7.074.697.775,00	8.006.286.680,00	9.208.913.590,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.756.499,13	563.736.663,41	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	3.576.303.498,32
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.020.952.682,19	6.934.021.033,31	7.838.151.282,10	7.838.151.282,10	10.193.311.945,63
1.2	Dana Perimbangan	774.980.539.716,00	841.715.445.482,00	892.894.089.000,00	892.894.089.000,00	892.894.089.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.438.716,00	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	627.894.391.000,00	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.923.710.000,00	82.076.280.000,00	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	116.410.365.638,00	153.166.891.640,91	227.153.417.351,90	221.607.995.000,00	221.607.995.000,00
1.3.1	Hibah	1.380.802.021,00	410.910.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.174.451.617,00	27.118.612.640,91	56.784.669.956,90	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.724.000.000,00	30.474.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	73.131.112.000,00	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00
A	JUMLAH PENDAPATAN	955.668.022.681,27	1.092.289.820.919,30	1.264.418.153.000,00	1.253.622.821.946,00	1.272.127.229.304,04
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	564.527.250.044,00	618.749.667.806,31	618.749.667.806,31
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.663.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	67.967.968.100,00	124.312.653.000,00	124.312.653.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.854.901.789,60	522.075.355.561,23	640.035.218.144,00	758.812.320.806,31	758.812.320.806,31
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	45.297.946.626,00	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	211.208.525.117,00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	402.917.806.986,00	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	461.487.906.788,00	509.807.831.069,00	659.424.278.729,00	686.174.753.269,00	686.174.753.269,00
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	948.342.808.577,60	1.031.883.186.630,23	1.298.959.496.873,00	1.444.987.074.075,31	1.444.987.074.075,31
	Surplus/(Defisit)	7.325.214.103,67	60.406.634.289,07	(35.041.343.873,00)	(191.364.252.129,31)	(172.859.844.773,27)

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	1.470.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.523.626.000,00	7.000.000.000,00	3.970.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	885.413.026,65	1.210.627.130,32	57.647.261.419,00	(6.500.000.000,00)	(6.500.000.000,00)

G	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rencana (SILPA)	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	0,00	0,00	0,00
H	PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)	477.909.161.048,64	633.042.353.907,78	682.030.196.275,00	488.310.501.139,69	506.814.908.495,73

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna memadukan langkah para pemangku kepentingan untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Dari masalah-masalah yang ada, maka disusunlah sasaran-sasaran pencapaiannya menunjukkan tingkat kinerja program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 sebagai tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memiliki arti strategis karena meletakkan landasan bagi pencapaian target-target pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dan melanjutkan pembangunan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja pembangunan tahun 2016 tersebut tidak terlepas dan saling terkait pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yaitu : *“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta Memiliki Daya Saing”* yang dapat dijelaskan bahwa:

Maju, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Harmonis dan Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Memiliki Daya Saing, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*);
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas;

3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah;
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Visi dan Misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, telah ditetapkan dan dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

TAHUN					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah	Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, maka arah kebijakan tahunan yang akan menjadi Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yaitu Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 memprioritaskan fokus pembangunan daerah yang ditujukan pada peningkatan dan pemantapan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah, serta membuka isolasi daerah dan mendorong berkembangnya sektor perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2015 ini juga sudah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sosial budaya sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya pada Tahun 2017 pembangunan infrastruktur wilayah dan prasarana umum lain masih terus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor sektor unggulan Kabupaten Kubu Raya terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pada Tahun 2018 dalam rangka memberikan akselerasi pada pertumbuhan ekonomi dilakukan pembangunan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan sentra-sentra ekonomi unggulan Kabupaten Kubu Raya khususnya pada kawasan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan tanaman pangan berkelanjutan (food estate), kawasan industri, jasa dan perdagangan. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan nilai tambah pada usaha-usaha ekonomi berbasis agroindustri, sumber daya alam dan potensi masyarakat.

Pada akhir RPJMD kedua Tahun 2019 diharapkan target-target prioritas pembangunan jangka menengah sebagian besar sudah dapat dicapai sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan pada semua aspek prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur wilayah sehingga dapat memberikan daya tarik dan nilai tambah bagi Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi tujuan investasi yang kondusif dan tempat hunian yang didukung oleh infrastruktur wilayah, sarana dan prasarana yang memadai.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing				
MISI I : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>)				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Meningkatkan aparatur yang berkualitas dan profesional	1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional	
			2. Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	
			3. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi	
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Mendorong keterlibatan dan peran serta aktif stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan	1. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel	
			2. Memberikan akses informasi sistem perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan public	1. Mengembangkan kapasitas dan mengefektifkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
			2. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			3. Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja
		2. Menyediakan akses layanan pengaduan yang cepat	1. Membentuk unit layanan pengaduan yang responsive dan akuntabel
			2. Memberikan kemudahan/fasilitasitas dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan publik

FR 17

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing				
MISI II : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas Dan Memiliki Kreativitas				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat	1. Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat	
			2. Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi siswa miskin	
			3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak	
			4. Pemerataan jumlah sekolah	
		2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	
			2. Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata	
		3. Mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan daerah	1. Membangun sekolah kejuruan	
			2. Menyediakan sarana penunjang/fasilitas bagi sekolah kejuruan	
		4. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Memberikan insentif pendidikan bagi penduduk miskin	
			2. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan	

Handwritten signature/initials in blue ink.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat
			2. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah
			3. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap
			4. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan desa siaga
			5. Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pedesaan
			6. Meningkatkan kualitas surveilance berbasis masyarakat
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB Mandiri
		2. Peningkatan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
			2. Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat

Handwritten signature/initials in blue ink.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
3. Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> dalam pelestarian budaya	1. Meningkatkan <i>stakeholder</i> kepedulian terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas	1. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam melestarikan seni dan budaya	3. Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan seni budaya yang kreatif
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Meningkatkan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama	1. Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat 2. Membina kerukunan kehidupan beragama 3. Mengembangkan lembaga Pembina keagamaan 1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> keagamaan 2. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing				
MISI III : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	1. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif	1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	
			2. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat	
			3. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah	
			4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	
		2. Peningkatan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang ekonomi kreatif masyarakat	1. Meningkatkan akses pemodalalan bagi UMKM dan koperasi	
			2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna	
			3. Memfasilitasi pemenuhan standart mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	2. Meningkatkan investasi penanaman modal daerah	1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan investasi untuk menunjang perekonomian daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	1. Mempermudah proses perizinan
		2. Peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah	2. Meningkatkan perekonomian daerah
			3. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah
	3. Meningkatkan masyarakat	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	1. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja
			2. Meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi usaha
			3. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung perekonomian daerah
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatkan sumber daya berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan	1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat
			2. Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri
			3. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha
			1. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			2. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan
			3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh
		2. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dengan fungsi lingkungan hidup	1. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
			2. Melakukan perlindungan/konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan
	2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan kualitas pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan
			2. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian
			3. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan
			4. Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing				
MISI IV : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
1. Menyediakan Infrastruktur wilayah yang layak	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatkan penyediaan sarana pelayanan transportasi	1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah	
			2. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman	
			3. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar	
			4. Pengembangan, peningkatan dan fasilitas penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi	
	2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi	1. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir	
			2. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan	
	3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik	1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas	
			2. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	1. Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman infrastruktur	3. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih 1. Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman. 2. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni 3. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya	1. Menetapkan rencana umum dan rancangan rinci Kabupaten Kubu Raya 2. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan 3. Meningkatkan dalam kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang	1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan 1. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup 2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan 1. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		4. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang	1. Penetapan ruang terbuka hijau
	2. Terkendalinya pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Persampahan	1. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif
			2. Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak
			3. Penambahan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
			4. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi
		2. Peningkatan kapasitas personil pengolahan persampahan	1. Penambahan petugas pengelola persampahan
			2. Memberikan jaminan sosial dan kesehatan petugas pengelola persampahan

Handwritten signature/initials in blue ink.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2020 atau disebut “**Nawacita**” adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tema pembangunan Nasional Tahun 2016 yang berkenaan dengan Nawacita adalah **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas”**, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah **“Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Sinergitas Sektor-Sektor Pembangunan”**

Dengan mengacu agenda Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, maka tema Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah **“Peningkatan dan Pemanapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan serta Mendorong Percepatan Pembangunan Konektivitas Wilayah Kalimantan Barat”**

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tetap mengacu kepada Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Kubu Raya dengan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat
Dan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

NASIONAL	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA
1	2	3
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas.	Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Sinergitas Sektor-Sektor Pembangunan.	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur Dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Serta Mendorong Percepatan Pembangunan Konektivitas Wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa tema pembangunan daerah tahun 2016 secara umum selaras dan saling terkait, dimana pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai pondasi menunjang pembangunan yang berkualitas, diantaranya menunjang prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan kemandirian pangan serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga memprioritaskan peningkatan dan pemantapan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat yang seiring dan sejalan dengan tema nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi dengan Kabupaten Kubu Raya yang tercermin dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur, didukung dengan upaya:
 - a. Peningkatan Infrastruktur.
 - b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
2. Peningkatan dan Pemantapan Pelayanan Dasar, didukung dengan upaya:
 - a. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan.
 - b. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa.
 - c. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual.
3. Mendorong Percepatan Pembangunan, didukung dengan upaya:
 - a. Peningkatan Kesejahteraan.
 - b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.

c. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif.

Selain keselarasan tema, keselarasan prioritas pembangunan juga sangat menentukan terwujudnya sinkronisasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Keselarasan antara prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat dengan Prioritas Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Provinsi Dan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PRIORITAS KABUPATEN
1	2	3	4
1	Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	- Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya Dan Mental Spiritual
2	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya	Peningkatan Kecerdasan Sumberdaya Manusia	- Peningkatan Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa
3	Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	- Peningkatan Infrastruktur
4	Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	- Peningkatan Kesejahteraan
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	- Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PRIORITAS KABUPATEN
1	2	3	4
6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional	Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan	- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah - Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian serta Ketahanan Budaya	- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	- Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya Dan Mental Spiritual
9	Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	- Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya Dan Mental Spiritual

Prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya menentukan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yaitu dengan menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan masyarakat dengan melihat indikator :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Kemiskinan.
- c. Tingkat Pengangguran.
- d. Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran pembangunan kewilayahan Tahun 2016 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Keselarasan Kewilayahan Tahun 2016

NO	INDIKATOR SASARAN KEWILAYAHAN	TAHUN 2013	
		KALBAR	KUBU RAYA
1	2	3	4
1	IPM	70,9	69,3
2	Kemiskinan	7,96	6,27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,79	9,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,50	6,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut di atas, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya masih berada dibawah IPM Provinsi Kalbar, sementara Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 6,79% berada diatas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Handwritten signature/initials in blue ink.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		2. Peningkatan revitalisasi pertanian dan pengembangan pusat agrobisnis dan agroindustri	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan 2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian 3. Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri 4. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri
		3. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	1. Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan 3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan 1. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup 3. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup

FR 7 RF

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016

5.1 Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, Prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas;
3. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah; serta
4. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

A. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Penyediaan Operasional Sekolah
9. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

13. Program Penyehatan Lingkungan
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
19. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
20. Program Keluarga Berencana
21. Program Pelayanan Kontrasepsi
22. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
23. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
24. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
25. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
26. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
27. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
28. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
29. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
30. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
31. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

B. Peningkatan Kesejahteraan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

C. Peningkatan Infrastruktur

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Pemanfaatan Ruang
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)
19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
20. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)
21. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)
22. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

D. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

E. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama

F. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
12. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan
16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
19. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

G. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

H. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
5. Program Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2016

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten diperkirakan sebesar Rp. 1.154.696.793.527,00. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 737.566.951.057,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 550.753.968.700,00.

Proyeksi dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.253.622.821.946,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0,00 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung tidak semuanya terakomodir dalam dokumen RKPD.

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 603.942.824.827,00 dengan rincian Belanja Gaji sebesar Rp. 409.261.434.299,00 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 194.681.390.528,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 6.261.473.230,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.500.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 124.312.653.000,00 dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 34.437.653.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 89.000.000.000,00, dan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) sebesar Rp. 875.000.000,00 serta Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 550.000.000,00. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 550.753.968.700,00 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rekapitulasi estimasi jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Estimasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	425.229.423.085,00	85.053.855.709,00	510.283.278.794,00
2	Dinas Kesehatan	48.075.861.101,00	51.435.033.928,00	99.510.895.029,00
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	3.960.162.392,00	100.497.947.884,00	104.458.110.276,00
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan	3.526.450.682,00	99.088.692.888,00	102.615.143.570,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.015.955.074,00	3.910.804.452,00	6.926.759.526,00
6	Dinas Perhubungan	4.410.434.829,00	4.379.420.100,00	8.789.854.929,00
7	Badan Lingkungan Hidup	2.353.305.325,00	4.639.854.048,00	6.993.159.373,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.182.406.368,00	2.200.000.000,00	5.382.406.368,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2.687.211.119,00	5.917.891.500,00	8.605.102.619,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	3.890.075.607,00	2.900.000.000,00	6.790.075.607,00
11	Dinas Koperasi dan UMKM	2.788.845.687,00	3.100.000.000,00	5.888.845.687,00
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.736.785.873,00	2.900.000.000,00	5.636.785.873,00
13	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	2.293.425.566,00	2.900.000.000,00	5.193.425.566,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	859.989.532,00	600.000.000,00	1.934.823.475,00

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.334.823.475,00	4.590.028.500,00	5.450.018.032,00
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.954.735.100,00	-	11.954.735.100,00
17	Bupati dan Wakil Bupati	588.554.221,00	-	588.554.221,00
18	Sekretariat Daerah	10.143.859.000,00	59.000.000.000,00	69.143.859.000,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.727.235.473,00	19.000.000.000,00	21.727.235.473,00
20	Inspektorat Daerah	4.104.432.983,00	3.100.000.000,00	7.204.432.983,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	2.802.241.864,00	5.000.000.000,00	7.802.241.864,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.939.671.885,00	6.000.000.000,00	10.939.671.885,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	2.225.622.568,00	5.700.000.000,00	7.925.622.568,00
24	Kecamatan Sungai Raya	2.197.430.490,00	690.000.000,00	2.887.430.490,00
25	Kecamatan Kuala Mandor B	1.489.228.428,00	590.000.000,00	2.079.228.428,00
26	Kecamatan Sungai Ambawang	1.660.468.905,00	600.000.000,00	2.260.468.905,00
27	Kecamatan Terentang	1.431.711.709,00	600.000.000,00	2.031.711.709,00
28	Kecamatan Batu Ampar	1.770.104.733,00	700.000.000,00	2.470.104.733,00
29	Kecamatan Kubu	1.779.069.042,00	580.000.000,00	2.359.069.042,00
30	Kecamatan Rasau Jaya	1.696.563.058,00	640.000.000,00	2.336.563.058,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
31	Kecamatan Teluk Pakedai	1.624.725.080,00	620.000.000,00	2.244.725.080,00
32	Kecamatan Sungai Kakap	1.994.046.883,00	800.000.000,00	2.794.046.883,00
33	Dinas Pedapatan Daerah	3.193.881.772,00	4.400.000.000,00	7.593.881.772,00
34	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.492.237.594,00	2.700.000.000,00	5.192.237.594,00
35	Kantor Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	1.217.501.663,00	900.000.000,00	2.117.501.663,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.331.704.009,00	3.000.000.000,00	5.331.704.009,00
37	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.178.177.307,00	34.423.952.000,00	39.602.129.307,00
38	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	9.053.993.613,00	4.086.157.500,00	13.140.151.113,00
39	Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan	8.609.951.617,00	9.099.076.765,00	17.709.028.382,00
40	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.591.046.193,00	9.981.063.626,00	13.572.109.819,00
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.799.473.922,00	9.981.063.626,00	7.229.663.722,00
	Sub Total (A)	603.942.824.827,00	550.753.968.700,00	1.154.696.793.527,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
1	Belanja Hibah	6.261.473.230,00	-	6.261.473.230,00
2	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.312.653.000,00	-	124.312.653.000,00
4	Belanja Tidak Terduga	550.000.000,00	-	550.000.000,00
	Sub Total (B)	133.624.126.230,00	-	133.624.126.230,00
	Jumlah Total (A + B)	737.566.951.057,00	550.753.968.700,00	1.288.320.919.757,00

Sumber : Data Kompilasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 ini, dikemukakan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Tahun 2016. Rencana Program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Lampiran I.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan terdapat 419 usulan program dan 2.507 kegiatan yang berhasil dihimpun dengan mencantumkan asal sumber dana untuk program dan kegiatan yang mereka usulkan. Dari usulan tersebut usulan yang bersumber pendanaan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 905.220.210.300, Pendanaan dari APBD Provinsi sebesar Rp. 389.900.010.100, Pendanaan dari APBN Rp. 1.174.527.500.000 sedangkan dari APBDes sebesar Rp. 1.467.500.000. Akan tetapi usulan hasil musrenbang Kecamatan ini akan dipertimbangkan oleh SKPD yang memang menjadi kewenangan mereka dan kegiatan tersebut memang telah masuk dalam Renstra SKPD mereka. Rekapitulasi daftar usulan Musrenbang Kecamatan disajikan pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2

Rekapitulasi Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA					KECAMATAN
			APBD KAB (Rp)	APBD PROV (Rp)	APBN (Rp)	APBDES (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6	9
1	57	476	156.714.750.000,00	38.525.000.000,00	1.004.030.000.000,00	110.000.000,00	1.199.379.750.000,00	Batu Ampar
2.	25	103	22.615.000.200,00	114.350.000.000,00	58.100.000.000,00	15.000.000,00	195.080.000.200,00	Kuala Mandor B
3.	53	250	99.684.800.000,00	9.500.000.000,00	47.500.000.000,00	209.500.000,00	156.894.300.000,00	Kubu
4.	40	114	30.957.660.000,00	2.250.000.000,00	6.625.000.000,00	-	39.832.660.000,00	Rasau Jaya
5.	41	301	99.625.000.000,00	8.850.000.000,00	6.200.000.000,00	38.000.000,00	114.713.000.000,00	Sungai Ambawang
6.	74	406	139.955.000.000,00	157.860.000.100,00	43.712.500.000,00	1.095.000.000,00	342.622.500.100,00	Sungai Kakap
7.	53	515	173.950.000.100,00	5.385.010.000,00	6.000.000.000,00	-	185.335.010.100,00	Sungai Raya
8.	46	249	71.858.000.000,00	27.180.000.000,00	2.360.000.000,00	-	101.398.000.000,00	Teluk Pakedai
9	30	93	109.860.000.000,00	26.000.000.000,00	-	-	135.860.000.000,00	Terentang
	419	2.507	905.220.210.300,00	389.900.010.100,00	1.174.527.500.000,00	1.467.500.000,00	2.471.115.220.400,00	

Sumber : Data Kompilasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian diprioritaskan pada rencana pembangunan tahun 2016 dalam program dan kegiatan bagi pencapaian visi dan misi serta Tahapan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya 2014-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yang juga merupakan penjabaran dari tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah pada tahun awal periode RPJMD di Tahun 2016. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2016 dengan mendasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2016 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2016.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing”***.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 18 Mei 2015
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI